

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 08 Tahun 2015

TANGGAL : 22 Juni 2015

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA BOGOR TAHUN 2016**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Bogor setiap tahun melaksanakan pembangunan daerah secara terencana dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Perencanaan disusun secara spesifik, terukur, dan didukung ketersediaan sumber daya serta tepat waktu. Berbagai kriteria perencanaan harus dipenuhi agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Berbagai sumberdaya di Kota Bogor dimanfaatkan dan proses pembangunan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada azas prioritas.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dan menyiapkan kemandirian masyarakat Kota Bogor dalam berbagai bidang. Untuk itu semua pihak dituntut lebih fokus, tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor.

RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja beserta pendanaannya. Dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan OPD menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2016

RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 mencantumkan 5 (lima) tahap perencanaan pembangunan lima tahunan yang diarahkan untuk mewujudkan Visi Kota Bogor sebagai “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”. Terwujudnya visi Kota Bogor dalam 20 tahun mendatang terukur dari pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada.
2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supermasi hukum.

Upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan jangka panjang Kota Bogor berlangsung secara bertahap dengan mempergunakan capaian pembangunan jangka menengah. Pencapaian tersebut diukur dengan

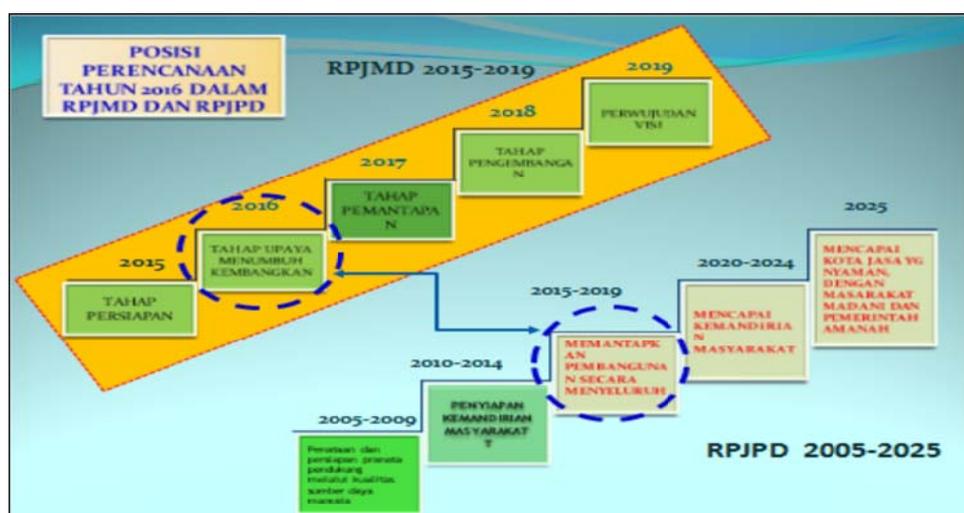
mempergunakan parameter peningkatan kualitas manusia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ditentukan bahwa status pembangunan manusia terkategori tinggi dengan capaian IPM=80. Capaian tersebut diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan RPJMD ketiga, dan hal itu merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. RPJMD Tahun Pertama (2005-2009) mengacu kepada Renstra Kota Bogor Tahun 2005-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 yang diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima.
2. RPJMD Tahun Kedua (2010-2014) mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 yang diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima atau melanjutkan RPJMD tahun pertama.
3. RPJMD Tahun Ketiga (2015-2019), berdasarkan pelaksanaan pencapaian RPJMD kedua, RPJMD ketiga ditujukan untuk lebih menetapkan pembangunan secara menyeluruh.
4. RPJMD Tahun Keempat (2020-2024), ditujukan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.

Adapun posisi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagaimana gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1.
Posisi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015-2019 terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Bogor



RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 ditujukan untuk lebih menetapkan pembangunan secara menyeluruh, memuat 6 (enam) prioritas pembangunan yang perlu mendapat penanganan secara integral lintas OPD yaitu:

1. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum. Transportasi terdiri atas dua urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan

Pekerjaan Umum difokuskan pada pembebasan dan pembangunan jalan lingkar (R2, R3 dan Jalan Lingkar Dalam Selatan/ Inner Ring Road), Pembebasan dan Pembangunan Jalan Akses ke Stasiun Sukaresmi, perbaikan geometrik simpang jalan rawan macet serta pemeliharaan jalan dan drainase untuk mengurangi beban jalan-jalan utama, yang meliputi program penataan angkutan umum (*shift* angkutan umum, *re-routing*/ pengalihan jalur) dan pengembangan angkutan massal.

2. Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota. Kebersihan difokuskan kepada peningkatan kapasitas pengangkutan sampah ke TPA, peningkatan pengolahan sampah di TPA, peningkatan partisipasi masyarakat melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk penanganan sampah skala rumah tangga dan kawasan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan.
3. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi, pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan, merelokasi dan menertibkan para pedagang kaki lima ketempat yang telah ditentukan, mendata para PKL, membatasi pemanfaatan Ruang Terbuka Publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang.
4. Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan RTH. Menata Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan RTH merupakan bagian dari urusan Lingkungan Hidup, dengan sasaran Peningkatan kuantitas dan kualitas taman kota dan taman lingkungan serta Tertatanya lokasi eks PKL
5. Transformasi karakter Budaya dan Reformasi Birokrasi, dengan program peningkatan Pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan perizinan , peningkatan budaya pelayanan prima. Program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, program peningkatan kesejahteraan pegawai, dan program efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.
6. Penanggulangan Kemiskinan, dengan program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Perbaikan Gizi Masyarakat, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja,Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,Lingkungan Sehat Perumahan, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya,Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya),Pembinaan Anak Terlantar,Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, ingkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2016, disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang dicapai dan fenomena yang ada pada tahun pelaksanaan

RKPD sebelumnya. Di samping itu juga mempertimbangkan sinergitas antar program dan antar wilayah, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui koordinasi dengan kepala OPD dan melibatkan pelaku pembangunan lainnya. Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan, RKPD memuat rencana pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Tahun 2016, merupakan tahun kedua pada upaya mencapai tujuan Visi Kota Bogor yaitu “Kota Bogor yang Nyaman, Beriman, dan Transparan”. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2015-2019, visi tersebut dijabarkan kedalam 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada industri pariwisata dan industri kreatif;
2. Menjadikan masyarakat Bogor yang sehat dan makmur;
3. Menjadikan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan;
4. Menjadikan masyarakat Bogor yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani;

Penyusunan RKPD Tahun 2016 juga mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISRENBANGNAS) dengan prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing Daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana Tata Ruang dengan rencana Pembangunan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan Dinamika Perkembangan Daerah dan Nasional.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 diawali dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang tingkat Kota Bogor, Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang tingkat Nasional, sebagaimana gambar 1.2. berikut:

Gambar 1.2
Proses penyusunan RKPD Tahun 2016



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 54 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai penjabaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, RKPD tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun. Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Penyusunan RKPD ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan Tingkat Provinsi dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya di Kota Bogor, sehingga terjadi sinergitas perencanaan.

RKPD Kota Bogor Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010, MDGs sebagaimana gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3
Hubungan Antar Program Pusat, Provinsi Jawa Barat
dan Kota Bogor



1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing
- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014
 - 2.5.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2014
- 2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.6.1. Permasalahan Empat Prioritas
 - 2.6.2. Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kota Bogor

- 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor
 - 3.1.2.1 Global dan Nasional
 - 3.1.2.2 Provinsi Jawa Barat
 - 3.1.2.3 Kota Bogor
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan
- 4.3. Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

- 5.1. Rencana Indikatif Belanja Langsung Tahun 2016
- 5.2. Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung 2016

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2016, dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD);
- b. Pedoman bagi Penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2016.
- c. Mensinergikan berbagai potensi sumber daya baik pemerintah maupun swasta (masyarakat) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2016.

Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2016 ditujukan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu untuk menciptakan sinergitas antar sektor pembangunan dan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Karakteristik wilayah Kota Bogor

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi diantara 106 derajat 43'30"BT-106 derajat 51'00"BT dan 30'30" LS-6 derajat 41'00" LS, atau kurang lebih 60 Km ke arah Selatan Ibukota Jakarta, dengan luas wilayahnya mencapai 118.50 Km² terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat : Kecamatan Darmaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 m s/d 350 m di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 Ha merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2%, seluas 891,27 Ha merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15%, seluas 109,89 Ha merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-125%, seluas 764,96 Ha merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40%, dan lahan sangat curam seluas 119,94 Ha dengan kemiringan lebih dari 40%.

Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Berdasarkan pemanfaatannya, 4.151,69 Ha atau 35,48% lahan Kota Bogor sudah menjadi kawasan pemukiman. Sedangkan sisanya dipergunakan antara lain untuk lahan pertanian seluas 2.112,72 Ha (18,6%), lahan industri 92,59 hektar (0,79%), perdagangan dan jasa 81,02 Ha (0,69%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 129,74 Ha (1,11%), taman dan lapangan olahraga 264 Ha (2,25%), serta kuburan 134,64 Ha (1,15%), sungai dan situ 138,99 Ha (1,19%).

Kondisi udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu rata-rata tiap bulan mencapai 25,0 °C dengan suhu terendah 21,40 °C dan suhu tertinggi mencapai 33,10 °C. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi udara tersebut antara lain berupa guyuran hujan dengan intensitas rata-rata antara 3.500 sampai 4.000 mm per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 250-800 mm dengan rata-rata hujan 21 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan

kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikular tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, yang melebihi kriteria baku. Kondisi serupa juga ditemukan pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu, sedangkan air sumur penduduk, nilai PH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri koli sedikit diatas kriteria yang disyaratkan

2.1.2 Potensi Pengembangan wilayah Kota Bogor

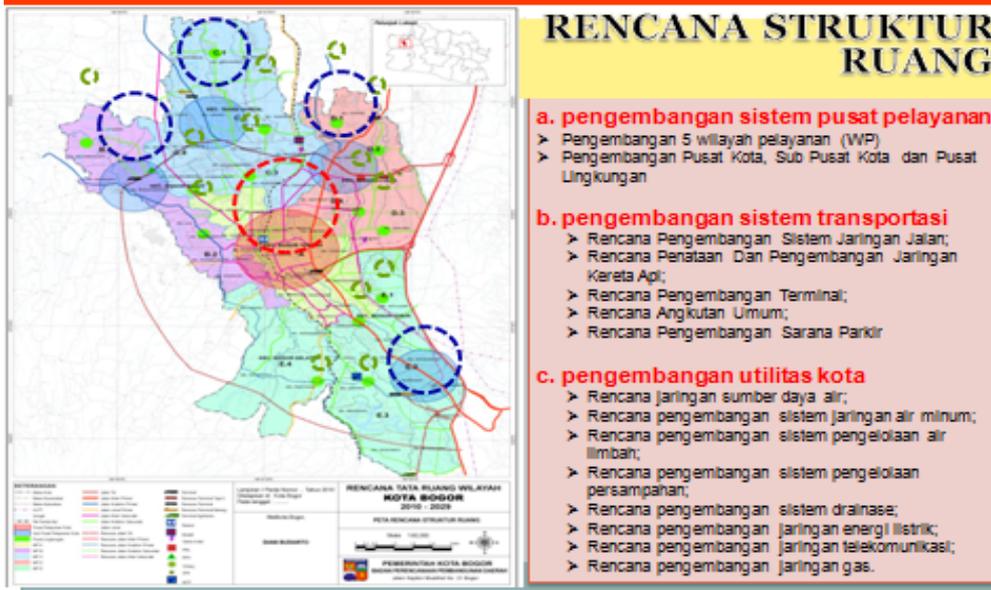
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi menjadi 5 Wilayah Pelayanan (WP) yaitu :

1. Wilayah Pelayanan (WP) A, meliputi Kecamatan Bogor Tengah dengan lokasi pusat kota adalah kebun raya dan sekitarnya;
2. Wilayah Pelayanan (WP) B, meliputi Kecamatan Bogor Barat dengan lokasi pusat pengembangan kawasan bubulak;
3. Wilayah Pelayanan (WP) C, meliputi Kecamatan Tanah Sareal dengan lokasi pusat pengembangan di kawasan Yasmin-Pasar TU Kemang;
4. Wilayah Pelayanan (WP) D, meliputi Kecamatan Bogor Utara dengan lokasi pusat pengembangan di kawasan BORR Kedung Halang Sentul dan Warung Jambu;
5. Wilayah Pelayanan (WP) E, meliputi Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan dengan lokasi pusat pengembangan di kawasan Tajur – R3 Inner Ring Road.

Berikut gambar 2.1. Struktur ruang Kota Bogor

Gambar 2.1.
Peta Struktur Ruang Kota Bogor

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG KTRW KOTA BOGOR



2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jenis-jenis Bencana terdiri dari :

1. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Banjir, Kekeringan, Angin Topan dan Tanah Longsor.
2. **Bencana Non Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa Kebakaran, Gagal Teknologi, Gagal Modernisasi, Epidemii dan Wabah Penyakit.
3. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi Konflik Sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan Teror.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kota Bogor dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. IPM meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli). Pencapaian IPM Tahun 2012 sebesar 76,47 poin dan tahun 2013 meningkat menjadi 76,82 poin. Pencapaian itu menempatkan Kota Bogor sebagai kota dengan pembangunan manusia yang termasuk kategori/kelas menengah ke atas (UNDP; nilai IPM 66-80 termasuk kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas). Selama kurun waktu Tahun 2012-

2013 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami peningkatan.

Tabel 2.1
Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2010-2013

Tahun	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	75.75	76.08	76.47	76.82
Indeks Kesehatan	73.12	73.28	73.45	73.75
- Angka Harapan Hidup	68.87	68.96	69.07	69.25
Indeks Pendidikan	87.60	87.64	87.78	87.86
- Angka Melek Huruf (%)	98.77	98.79	98.97	99.05
- Rata - rata Lama Sekolah (tahun)	9.79	9.80	9.81	9.82
Indeks Daya Beli	66.53	67.31	68.17	68.86
- Daya Beli (Rp)	647.890	651.250	655.000	657.970

2.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah di Kota Bogor difokuskan pada pemerataan ekonomi dan kualitas masyarakat di bidang sosial. Fokus pemerataan ekonomi berada pada indeks daya beli, pemerataan pendapatan, dan PDRB Perkapita. Ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Bogor tahun 2013 sebesar Rp. 19.535.008,93 juta, mengalami laju pertumbuhan sebesar 12,77% dibandingkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2012. Pertumbuhan PDRB ini terjadi di semua sektor produksi, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,31 persen.

Jika ditinjau Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Bogor tahun 2013 adalah Rp. 5.710.336,54 juta, mengalami pertumbuhan 5,86 persen dibanding tahun 2012. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 lebih menggambarkan perkembangan ekonomi Kota Bogor ditinjau dari peningkatan output produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi.

Keadaan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2009 – 2013 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1	2009	11.904.599,66	4.508.705,07
2	2010	13.908.899,57	4.785.434,36
3	2011	15.487.433,93	5.081.482,69
4	2012*	17.323.335,99	5.394.303,88
5	2013**	19.535.008,93	5.710.336,54

Sumber : BPS Kota Bogor

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Terlihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 11.904.599,66 juta, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 19.535.008,93 juta pada tahun 2013 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pun mengalami peningkatan dari Rp. 4.508.75,07 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 5.710.336,54 pada tahun 2013. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi peningkatan riil yang cukup signifikan di Kota Bogor. Pertumbuhan ekonomi bukan akibat kenaikan harga maupun inflasi, melainkan merupakan peningkatan output produksi sektoral.

Salah satu indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi yang bisa dilihat dari pertumbuhan nilai PDRB. Indikator ini menunjukkan perkembangan/pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut pada kurun waktu tertentu.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor menurut Sektor Lapangan Usaha dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012 - 2013 (%)

Kode Sektor	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konsisten	
		2012*)	2013**)	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	7,67	9,49	2,22	1,95
2	Pertambangan&Penggalian	-2,57	-0,31	-9,20	-6,90
3	Industri Pengolahan	14,59	12,63	6,14	6,59
4	Listrik,Gas dan air Bersih	12,23	6,92	7,02	1,72
5	Bangunan	9,18	10,90	4,02	3,25
6	Perdagangan,Hotel,dan Restoran	10,58	11,29	5,31	5,27
7	Angkutandan komunikasi	10,10	18,14	7,03	6,59
8	keuangan, persewaan & jasa perusahaan	13,94	13,81	8,51	7,71
9	Jasa-Jasa	9,93	9,32	5,22	4,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11,86	12,77	6,16	5,86

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menjadi sektor dengan pertumbuhan paling tinggi yaitu 7,71 persen. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan negatif adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan minus 6,90 persen. Itu terjadi karena adanya penurunan kuantitas yang sangat signifikan selama tahun 2013 pada sektor tersebut.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan PDRB yang disebabkan faktor perubahan kuantitas tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat digunakan sebagai alat analisis yang lebih valid untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan PDRB yang disebabkan faktor perubahan kuantitas tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu PDRB Atas Dasar

Harga Konstan dapat digunakan sebagai alat analisis yang lebih valid untuk melihat perkembangan riil produktivitas secara riil di suatu wilayah pada suatu periode tertentu karena mengabaikan pengaruh fluktuasi harga secara umum. Untuk lebih jelasnya gambaran kemajuan ekonomi suatu daerah biasanya dilakukan pengelompokan Sektor ekonomi yang terdiri atas :

1. **Sektor Primer**, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian
2. **Sektor Sekunder**, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari Sektor Primer maupun dari Sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas dan Air Minum dan Sektor Bangunan (Konstruksi).
3. **Sektor Tersier** atau dikenal sebagai Sektor Jasa, merupakan sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa.

Bila Lapangan Usaha dikelompokkan ke dalam kelompok Sektor Primer, Sekunder dan Tersier, maka Laju Pertumbuhan Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2013, masing-masing 9,42 persen, 12,05 persen dan 13,16 persen. Pengaruh harga yang cenderung meningkat dan tinggi di Sektor Tersier, yaitu Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengakibatkan Laju Pertumbuhan Sektor Tersier cukup tinggi

Sedangkan Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2013 masing-masing 1,89 persen, 5,60 persen dan 6,04 persen. Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pertumbuhan sektor tersier mengalami pertumbuhan tercepat dibanding sektor primer dan sekunder dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013 sektor tersier tumbuh sebesar 6,04 persen. Pertumbuhan yang cukup cepat di sektor ini dipicu oleh makin melambatnya pertumbuhan sektor primer dan sektor sekunder di Kota Bogor. Sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan perusahaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa berkembang cukup pesat di Kota Bogor karena hal ini sesuai dengan karakteristik perekonomian perkotaan secara umum. Laju Pertumbuhan menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Sektor Tersier dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kelompok Sektor Tahun 2012 – 2013
(%)

Kode Sektor	KELOMPOK SEKTOR	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
		2012*)	2013**)	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Primer	7,59	9,42	2,14	1,89
2	Sekunder	13,63	12,05	5,85	5,60
3	Tersier	10,95	13,16	6,37	6,04

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11,86	12,77	6,16	5,86
---------------------------------------	-------	-------	------	------

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor secara umum sangat dipengaruhi oleh distribusi persentase PDRB secara sektoral yang menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB. Semakin besar persentase suatu sector, berarti semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu kurang tepat apabila hanya melihat perkembangan suatu sektor dalam kurun waktu tertentu, tanpa memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB secara keseluruhan dengan kurun waktu yang sama. Jadi persentase ini dapat dianggap sebagai penimbang apabila ingin melihat perkembangan sektoral secara lebih teliti. Jika peranan suatu sektor sangat besar, maka perubahan sekecil apapun pada sektor tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya jika peranannya kecil maka perubahan besar maupun kecil dalam sektor tersebut, kurang signifikan pengaruhnya terhadap perubahan ekonomi daerah.

Struktur Ekonomi Kota Bogor ditunjang oleh Sektor Tersier dan Sektor Sekunder, hal ini dapat dilihat dari Tabel 4. di bawah ini :

Tabel 2.5
Kontribusi Sektor Dalam Perekonomian Kota Bogor
Tahun 2012 - 2013

No	Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
		2012*)	2013**)	2012*)	2013**)
	A. PRIMER	0,17	0,17	0,28	0,26
1	Pertanian	0,17	0,17	0,28	0,26
2	Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. SEKUNDER	34,56	34,34	38,16	38,07
3	Industri Pengolahan	27,51	27,47	28,31	28,51
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,01	1,91	3,32	3,19
5	Bangunan	5,04	4,96	6,53	6,37
	C. TERSIER	65,27	65,49	61,56	61,67
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	36,23	35,76	28,74	28,58
7	Angkutan dan Komunikasi	15,05	15,77	10,36	10,44
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,33	10,42	15,33	15,6
9	Jasa-jasa	3,66	3,54	7,13	7,05
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Struktur perekonomian Kota Bogor merupakan struktur yang didominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan (Sub

Sektor Industri non-Migas) dan Sektor Angkutan dan Komunikasi. Dengan kata lain Sektor Tersier merupakan Sektor paling besar kontribusinya disusul Sektor Sekunder dan Sektor Primer.

Selama kurun waktu 2012 – 2013 terlihat, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kota Bogor (Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan) disusul oleh Sektor Industri Pengolahan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Pengangkutan dan Komunikasi.

2.2.3 Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita)

Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita) merupakan hasil bagi antara Pendapatan Regional (Nilai PDRB) dengan jumlah penduduk (pertengahan tahun). Saat ini indikator ekonomi makro yang menyajikan perolehan pendapatan wilayah, baru terbatas pada PDRB yang menjadi indikator kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian PDRB perkapita merupakan pendekatan yang masih valid terhadap pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita menunjukkan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk.

Hal yang perlu diperhatikan, pendapatan yang dimaksud dalam PDRB merujuk pada konsep “*product originated*”, yang merupakan indikator kemampuan suatu daerah menghasilkan pendapatan faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima penduduk sulit dilakukan karena belum tersedianya data arus pendapatan.

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Pendapatan perkapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari Rp. 12,79 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 19,28 juta di tahun 2013. Selama periode 2009-2013, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 50,79 persen atau rata-rata sebesar 10,16 persen pertahun. Sedangkan selama tahun 2012-2013 saja, kenaikannya sebesar 9,92 persen, yaitu dari Rp. 17,54 juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 19,28 juta pada tahun 2013.

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan yang cukup pesat selama periode 2009-2013, yaitu sebesar Rp. 4,84 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 5,64 juta pada tahun 2013. Peningkatan itu sekitar 16,38 persen atau rata-rata 3,28 persen per tahun. Kenaikan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 adalah sebesar 3,19 persen. Nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
PDRB Perkapita Kota Bogor Tahun 2012 – 2013
(Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun	
		2012*	2013**
1	2	3	4
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	17.543.542,53	19.283.951,17
2	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000	5.462.873,87	5.636.949,10

**) Angka Perbaikan **) Angka Sementara*

2.2.4 Indeks Perkembangan

Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,86 persen (dilihat dari PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2000) berarti kondisi ekonomi Kota Bogor tahun 2013 mengalami perkembangan yang relatif lebih lambat dibanding tahun 2012. Selain dilihat dari LPE perkembangan ekonomi juga dapat ditinjau dari segi pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pendapatan perkapita. Adapun rinciannya sebagaimana tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Indeks Perkembangan Kota Bogor
Tahun 2009 – 2013

No	Indek Perkembangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	445,60	520,62	579,70	648,42	731,21
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	168,76	179,12	190,20	201,91	213,74
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	123,98	126,57	128,85	131,52	134,92
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	359,41	411,32	449,92	493,04	541,95
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000	136,12	141,52	147,62	153,53	158,42

**) Angka Perbaikan **) Angka Sementara*

Kondisi tahun 2013 dibanding tahun 2009 berdasarkan hasil penghitungan Indeks Atas Dasar Harga Konstan, maka terlihat bahwa peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan nilai PDRB secara umum.

2.2.5 Indeks Harga Implisit

Indeks Harga Implisit adalah suatu indeks harga yang menggambarkan perbandingan antara nilai produk Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Jadi Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat Inflasi yang terjadi dalam suatu periode. Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu Harga Konsumen, Harga Produsen, Harga Perdagangan Besar, Harga Eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap Sektor. Adapun rinciannya sebagaimana tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Indeks Harga Implisit PDRB Kota Bogor
Tahun 2009 – 2013

NO	Sektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
1	2	3	4	5	6	7
	PRIMER	177,25	185,40	195,64	206,09	221,33
1	Pertanian	177,32	185,44	195,64	206,06	221,30
2	Pertambangan & Penggalian	169,98	180,83	195,76	210,05	224,93
	SEKUNDER	227,63	254,29	270,91	290,83	308,59
3	Industri Pengolahan	238,98	268,93	289,00	312,01	329,69
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	167,69	179,91	185,38	194,40	204,33
5	Bangunan	209,39	229,00	236,26	247,97	266,34
	TERSIER	287,29	313,91	326,38	340,44	363,30
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	340,02	368,13	385,55	404,86	428,00
7	Angkutan dan Komunikasi	379,19	443,21	453,36	466,36	516,88
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	187,55	196,61	205,98	216,29	228,52
9	Jasa-jasa	143,73	151,23	157,67	164,73	171,96
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	264,04	290,65	304,78	321,15	342,10

*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Tabel diatas menunjukkan, pada tahun 2013 telah terjadi Inflasi (Perubahan Indeks Harga Implisit) berbagai jenis produk sebesar 6,53 persen, yang berarti lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2012 yaitu 5,37 persen. Sektor yang mengalami inflasi terbesar adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,83 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari Sub Sektor Pengangkutan. Sedangkan inflasi produksi yang terendah adalah Sektor Jasa-jasa yaitu sebesar 4,39 persen

2.2.6 Kesejahteraan Sosial

Capaian Indeks Kesehatan pada Tahun 2013 yaitu 73,75 poin dengan AHH 69,25 yang didukung indikator lainnya antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Kasus kematian bayi tahun 2013 berjumlah 62 orang dan pada tahun 2014 menurun menjadi 55 orang. Sedangkan kematian ibu tahun 2013 sebanyak 13 orang dan tahun 2014 menurun menjadi 6 orang.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya di bidang kesehatan.

Pada periode 2010-2013 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. AHH penduduk Kota Bogor tahun 2011 mencapai 68,96 tahun dan meningkat di tahun 2012 menjadi 69,07 dan menjadi 69,25 pada tahun 2013. Meskipun mengalami peningkatan, namun pada periode tersebut kenaikan AHH sesungguhnya kurang dari 0.5 pertahun. Untuk itu maka diperlukan adanya usaha meningkatkan kesehatan yang lebih komprehensif agar perbaikan derajat

kesehatan melalui penurunan Angka Kematian Bayi dapat terlaksana. Tingkat kesehatan bayi juga dipengaruhi kondisi kesehatan ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) karena ibunya kurang gizi.

Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2013 mencapai 69,30 poin dengan Angka Melek Huruf (AMH) 99,05 dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9,82 tahun. Didukung Indikator lain seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat PAUD Sederajat 60,48%, APK SD Sederajat 108,89% dengan angka partisipasi murni (APM) SD Sederajat 94,74% dari 4.684.536 siswa usia 7-12 th dan turun 2,36% APK SMP Sederajat 95,35% dengan APM 72,17% dan APK SMA Sederajat 61,19.% dengan APM 44,71%.

Pencapaian pendidikan yang cukup baik merupakan cermin keberhasilan perencanaan pembangunan masa lalu. Saat ini yang diperlukan adalah memelihara dan mempertajam upaya-upaya positif yang sudah dirintis sehingga dapat dicapai hasil yang lebih baik.

Indeks pendidikan yang merepresentasikan pengetahuan dalam IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan Rata-rata Lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Capaian Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, sehingga perlu adanya standarisasi. Agar satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standarisasi, kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan

Kemampuan daya beli masyarakat Kota Bogor mengalami peningkatan selama periode 2010-2013, yaitu dari 651.250 rupiah pada tahun 2010 menjadi 655.000 rupiah ditahun 2012, dan tahun 2013 menjadi 657.970 atau naik sebesar 2.970 rupiah. Dengan nilai 656.500 rupiah, artinya kemampuan daya beli masyarakat Kota Bogor pada tahun 2013 rata-rata sebesar Rp.657.970 perkapita sebulan pada kelompok pengeluaran paket komoditas 27 komoditi dengan *deflate* (pembanding) harga komoditi di DKI Jakarta (Jakarta Selatan). Artinya bila di DKI Jakarta kemampuan daya beli 27 paket komoditas misalnya rata-rata Rp.700.000 per kapita perbulan maka di Kota Bogor hanya Rp. 657.970 perkapita perbulan ditahun 2013.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebanyak 189 negara anggota PBB bersepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam satu

paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi

tujuan pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*).

Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya dan

menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan memiliki tenggat waktu serta kemajuan yang terukur. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah diadopsi oleh komunitas internasional sebagai kerangka kegiatan pembangunan di lebih dari 190 negara di sepuluh wilayah dan telah dikembangkan menjadi lebih dari 20 target dan lebih dari 60 indikator. Sebagai komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; MDGs yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global. MDGs juga mendorong pemerintah, lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil di manapun untuk mengorientasikan kembali kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang spesifik, ada tenggat waktu dan terukur kedalam 8 tujuan pembangunan milenium yaitu;

1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan target untuk 2015: mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US\$ sehari dan mengalami kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar secara universal target 2015, memastikan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Target 2005 dan 2015, mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anak target 2015, mengurangi tingkat

kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua pertiga.

5. Meningkatkan kesehatan ibu target 2015, mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya target 2015, menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.
7. Menjamin keberkelanjutan lingkungan target, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang layak dikonsumsi berkurang setengahnya. Pada Tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan Kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan target, mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan

secara nasional dan internasional. Membantu kebutuhan-kebutuhan

khusus negara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-

negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Secara komprehensif

mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Analisis kinerja atas layanan umum dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, diantaranya urusan pendidikan dan urusan kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

2.3.1 Urusan Pendidikan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk yang mendominasi struktur umur di Kota Bogor memperoleh pendidikan layak. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas/ ketidakmerataan ketersediaan sarana pendidikan.

Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat pada tahun 2013 yang mencapai 94,74%. APM SMP sederajat mencapai 72,17%. APM SMA sederajat mencapai 44,71 %. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat sebesar 98,73% Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat sebesar 89,60%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA sederajat sebesar 57,06%,

Pada tahun 2013 angka kelulusan SD sederajat sebesar 15.499 orang, Angka Kelulusan SMP sederajat sebesar 12.531 orang. Angka Kelulusan SMA sederajat sebesar 5.876 orang. Sedangkan perkembangan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendidikan di Kota Bogor sebagaimana tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
TK/RA	151	150	162
SD/MI	283	288	286
SMP/MTs	114	113	117
SMA/SMK/MA	118	123	134
Guru TK/RA	723	709	1117
Guru SD/MI	4.608	4.697	4.44
Guru SMP/MTs	2760	2737	2365

Guru SMA/SMK/MA	4018	4041	5000
-----------------	------	------	------

Sumber : Bogor Dalam Angka tahun 2014.

Untuk mendukung meningkatnya kualitas pendidikan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada jenjang SD sebanyak 95,240 siswa, jenjang SMP sebanyak 19,278 siswa dan jenjang SMA sebanyak 9,780 siswa dan SMK sebanyak 5.014 siswa

2.3.2 Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

- Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan klinik;
- Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker;
- Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan sarana pelayanan publik berupa laboratorium kesehatan serta pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Selain itu, pelayanan kesehatan yang dikelola pihak swasta juga merupakan kekuatan dan potensi Kota Bogor. Perkembangan dan pertumbuhan sarana layanan kesehatan milik swasta yang pesat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun perlu pengawasan dan pembinaan sehingga tidak merugikan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana layanan kesehatan baik milik Pemerintah Kota Bogor maupun milik swasta adalah sabagaimana tabel 2.10. berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun 2011 -2013

NO	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Jumlah Rumah Sakit	10	12	12
2	Jumlah Puskesmas	24	24	24
3	Jumlah Pustu	28	29	29
4	Jumlah BP/Klinik	114	117	117
5	JumlahDokter Umum	211	867	867
6	JumlahDokter Spesialis	166	390	390
7	Jumlah Doter Gigi	55	489	489

Sumber : Kota Bogor dalam angka tahun 2014

Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk

pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan Rumah Sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

2.3.3 Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan salah satu sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat memberikan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Kota Bogor sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tergambar pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Dan Prasarana Peribadatan Tahun 2011 -2013

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
Masjid	742	751	763
Mushola	591	610	1109
G. Protestan	19	64	67
G. Katolik	8	8	8
Vihara	9	9	7

2.3.4 Jaringan Listrik

Pelayanan dan pengelolaan energi listrik ditangani oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bogor. Pada tahun 2013 jumlah pelanggan listrik tercatat 201.850 pelanggan. Terbanyak berada di Kecamatan Tanah Sareal yaitu 43.336 pelanggan dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Bogor Tengah yaitu 20.380 pelanggan. Secara rinci pelanggan listrik dan daya tersambung menurut kecamatan tergambar pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung Di Kota Bogor Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Langganan	Daya Tersambung
1	Bogor Selatan	34,721	53,865,690
2	Bogor Timur	20,491	57,342,380
3	Bogor Utara	41,321	76,906,410
4	Bogor Tengah	20,380	67,525,210
5	Bogor Barat	41,601	53,389,971
6	Tanah Sareal	43,336	76,140,920
	Jumlah	201.850	335,268,691

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, Tahun 2013

2.4 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor secara umum sangat dipengaruhi oleh distribusi persentase PDRB secara sektoral. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor tahun 2013 mengalami perlambatan jika disbanding tahun 2012. Namun tetap ada indikasi geliat kegiatan ekonomi yang menjanjikan, terutama untuk mendorong investasi daerah. Struktur ekonomi Kota Bogor yang didominasi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 35,76 persen dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 27,48 persen, membuat Kota Bogor sangat menarik bagi para investor, baik nasional maupun asing

Melihat tingginya kontribusi sektor-sektor tersebut maka sektor tersebut dapat dijadikan *leading sector* bagi pembangunan ekonomi Kota Bogor. Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terendah, karena kurang dari 1 persen. Gambaran kontribusi sektoral ini sangat sesuai dengan karakteristik Kota Bogor sebagai urban

LPE Kota Bogor tahun 2013 sebesar 5,86 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara riil di Kota Bogor masih relatif tinggi dan dinamis. LPE ini mencerminkan pertumbuhan riil produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Bogor. Selain pertumbuhan riil produksi, pertumbuhan ekonomi secara umum di Kota Bogor juga dipengaruhi oleh faktor perubahan harga-harga atau inflasi, baik dari sektor produksi maupun konsumsi

Jika ditinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan paling tinggi pertumbuhannya yaitu 7,71 persen dan sektor yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu minus 6,90 persen. Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian minus pada tahun 2013 karena produksi sektor ini sangat bersifat musiman dan tidak potensial di Kota Bogor

Jika dikelompokkan menurut Sektor Primer, sektor Sekunder dan Sektor Tersier, maka Sektor Tersier memiliki pertumbuhan tercepat dibanding kelompok sektor lainnya, yaitu sebesar 6,04 persen. Kelompok Sektor Tersier juga merupakan kelompok sektor dengan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 65,49 persen

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Bogor tahun 2013 adalah Rp. 19.283.951,17 atau terjadi perubahan positif sebesar 9,92 persen dibandingkan PDRB perkapita tahun 2012. Peningkatan PDRB perkapita ini diharapkan dapat menggambarkan secara riil tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.4.2 Infrastruktur Transportasi

Pembangunan jaringan jalan baru masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari 25,3 km panjang ruas jalan baru yang ditargetkan pada RPJMD 2010 –

2014, hanya tercapai sekitar $\pm 3,5$ km. Target tersebut terdapat pada pembangunan beberapa ruas jalan, diantaranya ruas jalan R-3 seksi I dan II dan sebagian ruas jalan tembus KH.Soleh Iskandar - Sukaresmi. Hingga saat ini masih terus dilakukan pencapaian target yang tersisa, dalam bentuk pengadaan/ pembebasan lahan sekitar $\pm 18,35$ km. Diantaranya kelanjutan pembebasan R3 $\pm 1,3$ km, Inner Ring Road Selatan $\pm 12,5$ km, lanjutan jalan tembus STA Sukaresmi ± 0.7 km dan frontage toll R-2 $\pm 3,85$ km.

Untuk mendukung dan menunjang sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas; kegiatan preservasi rutin dilaksanakan dan terbagi dalam tiga wilayah. Wilayah I meliputi Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal, wilayah II meliputi Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor selatan, wilayah III meliputi Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Barat.

Dalam program preservasi jalan/pemeliharaan jalan target yang ditetapkan adalah 635 km atau sama dengan seluruh ruas jalan berkondisi baik. Namun hingga akhir tahun 2014 hanya tercapai 55,37% atau lebih dari setengahnya dari target.

2.4.3 Sumber Daya Manusia

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Penanganan masalah penduduk tidak saja mengarah pada upaya pengendalian penduduk, tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2013 tercatat 1.013.019 jiwa. Terdiri dari laki-laki 514.797 jiwa dan perempuan sebanyak 498.222 jiwa. Pada periode 2010-2013 rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,87 persen. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin (sex ratio), yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah 103. Berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 103 penduduk laki-laki.

Pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai 9,92 % dan tahun 2014 turun menjadi 9,48 %,

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

MISI I : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Bertumpu Pada Jasa Perdagangan

1. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan ditangani Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

serta Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan membangun struktur perdagangan dalam negeri yang kokoh, dengan sasaran mengembangkan pasar dan distribusi barang atau produk yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya
Kegiatan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan pemantauan harga dilakukan 36 kali di 7 pasar tradisional, yang terfokus pada 34 komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Terkait dengan itu juga dilakukan pemasangan papan informasi elektronik tentang harga di Pasar Baru Bogor, Pasar Gunung Batu, dan Pasar Kebon Kembang.
- 2) Pameran dan Misi Dagang dalam Negeri
Melalui kegiatan ini Kota Bogor telah memfasilitasi beberapa pelaku IKM untuk ikut serta di dalam 3 pameran yang berlangsung di dalam negeri, yaitu :
 - a) Pameran INAcraft
Pameran INAcraft di Jakarta, berlangsung selama 5 hari dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 April 2014. Pameran Kerajinan terbesar ini menyuguhkan kerajinan-kerajinan khas daerah bekerjasama dengan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia (ASEPHI) Provinsi Jawa Barat.
 - b) Jawa Barat Expo 2014 (JABEX)
Jawa Barat Expo berlangsung di Gedung Graha Manggala Siliwangi Jl. Aceh No. 66 Bandung, selama 5 hari dari tanggal 10 sampai dengan 14 September 2014. Pameran berskala nasional ini diikuti oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi se Indonesia, Dekranasda, BUMN, BUMD, Perusahaan Bina Mitraan dan Koperasi serta Swasta.
 - c) Manado Tourism Trade Investasi Expo 2014
Berlangsung di Manado Town Square, Kota Manado, pameran ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 20 sampai dengan 23 November 2014.
- 3) Pelatihan Manajemen Bagi Pelaku Usaha
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih 50 pelaku usaha Kota Bogor, agar mereka memiliki pengetahuan manajerial sehingga dapat bekerja lebih profesional, mampu mengembangkan usahanya membangun kemitraan diantara UKM, standar mutu, HAKI, dan tata cara pemasaran yang baik.
- 4) Pengawasan Perizinan Perusahaan
Kegiatan Pengawasan Perizinan Perusahaan yaitu melakukan pengecekan perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor, baik perusahaan yang bergerak diperdagangan barang ataupun jasa.

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengendalian dan pengawasan distribusi barang beredar dan pengujian mutu barang.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut amanat UU No. 8 Tahun 1999 dan untuk meningkatkan kualitas peredaran barang yang ada di wilayah Kota Bogor, telah dilakukan pengendalian dan pengawasan distribusi barang beredar dan pengujian mutu barang.

2) Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Idealnya konsumen dan pelaku usaha memiliki posisi yang seimbang, konsumen mempunyai hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban. Perluasan ruang gerak transaksi barang/jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara bermanfaat bagi kepentingan konsumen, karena semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang/jasa. Dalam situasi dan kondisi seperti ini kedua belah pihak dituntut mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen mencoba mengakomodirnya melalui workshop dan seminar Perlindungan Konsumen.

3) Pengawasan Cukai (DBHCT)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun Anggaran 2013. Kegiatan ini bertujuan mencegah/meminimalisir beredarnya hasil tembakau kemasan yang tidak dilekati pita cukai atau yang menggunakan pita cukai palsu di wilayah Kota Bogor. Pengawasan rokok yang menggunakan cukai ilegal dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari aparat di Pemerintah Daerah Kota Bogor sebanyak 20 orang.

4) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBHCT 2013)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Tahun Anggaran 2013 dan dilaksanakan bagi 80 aparat dan 40 pedagang.

5) Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pada tahun 2014 kegiatan Penyelenggaraan Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mempunyai target sebanyak 29 kasus, dan terealisasi sebanyak 21 kasus.

6) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTT

Pelaksanaan Kegiatan Tera dan Tera Ulang UTT (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya) terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Tera dan Tera Ulang UTT dan Pos Ukur Ulang

7) Pendataan, Pengujian dan Pembinaan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, khususnya pada produk makanan, minuman dan barang penting lainnya yang berada dalam sebuah kemasan, maka, diadakan pengujian terhadap produk yang dikategorikan Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Pengujian dilaksanakan di seluruh kecamatan dan sasarannya 40 perusahaan BDKT

8) Pengawasan dan Pembinaan Kemetrolagian

Pengawasan dan Pembinaan Kemetrologiaian selama tahun 2014 sudah terlaksana di 7 Pasar Tradisional, 6 Kecamatan dan 30 Pasar Modern di Kota Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengawasi/mendata alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP), dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan jaminan terhadap setiap transaksi jual beli barang, sehingga produsen dan konsumen tidak merasa dirugikan karena pengguna UTTP secara tidak benar.

9) Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG

Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Pendataan, Ukur Ulang SPBU dan Pendataan

dan ukur ulang Gas LPG.

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pameran dan Misi Dagang Luar Negeri

Kegiatan Pameran dan Misi Dagang Luar Negeri yang dilaksanakan pada tahun 2014, oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Bidang Perdagangan, Seksi Perdagangan Luar Negeri telah mengikuti 1 kali pameran berskala internasional.

2) Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha UKM Melalui Pelatihan Ekspor-Import

Pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha Melalui Pelatihan Ekspor-Import, Seksi Perdagangan Luar Negeri melaksanakan Pelatihan Ekspor-Import Bagi Pelaku Usaha yang diikuti oleh 30 Pelaku Usaha di Kota Bogor, khususnya para UKM di Kota Bogor. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Hotel Bahtera, Jl. Raya Cipayung, Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 September 2014.

3) Sosialisasi Kebijakan Perdagangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Peluang Pasar

Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor menyatakan bahwa penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014.

2. Urusan Industri

Urusan perindustrian ditangani dengan melakukan pembinaan bidang sarana, usaha dan produksi dalam rangka mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri. Untuk itu telah dilaksanakan Program Pengembangan Industri Rumah Tangga Kecil dan Menengah serta Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Tujuan kedua program tersebut adalah untuk memperkuat usaha industri kecil dan menengah, agar mampu berdaya saing tinggi dan tangguh serta mandiri.

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan membangun kekuatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah, melalui peningkatan produktivitas dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah, dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan

Pelatihan manajemen dan desain kemasan ditujukan untuk meningkatkan kualitas para pelaku IKM agar lebih mampu bersaing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, agar sesuai dengan standar mutu produk, dengan indikasi kegiatan pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas industri kecil dan menengah.

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sistem Jaminan Halal
Persepsi konsumen atas konsepsi halal saat ini tidak hanya mempertimbangkan murni karena masalah keagamaan, melainkan karena halal telah menjadi simbol pula untuk jaminan mutu dan pilihan gaya hidup. Terminologi Halal juga mengakomodasi bahwa halal telah menjadi kebutuhan konsumen dan menjadi salah satu tolok ukur baru untuk keamanan pangan.
- 2) Peningkatan Daya Saing
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan desain produk IKM beserta pemasarannya.
- 3) Sosialisasi Standar Nasional Indonesia
Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan mutu produk dan meningkatkan penghasilan IKM dalam bentuk Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI dan ISO) kepada 30 IKM.
- 4) Pengawasan, Monitoring dan Pemetaan IKM
Monitoring dan Pemetaan IKM dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem penyusunan database dan penyajian data peta potensi IKM di Kota Bogor melalui media website dan aplikasi perangkat seluler berbasis android,
- 5) Pemasyarakatan dan Penerapan GKM (Gugus Kendali Mutu)
Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai upaya meningkatkan mutu dan daya saing produk IKM. Gugus Kendali Mutu (GKM) bertujuan untuk:
 - a. Membudayakan GKM di kalangan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Memberikan dan menumbuhkan motivasi dalam lingkungan Industri Kecil dan Menengah (pimpinan dan karyawan) agar secara kontinyu melaksanakan penerapan GKM;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas usahanya;
 - d. Peningkatan mutu dan peningkatan nilai tambah;
 - e. Peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target;
 - f. Peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku;
 - g. Peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja;
 - h. Peningkatan kepuasan kerja
- 6) Penerapan dan Pengembangan Teknologi
Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dengan menerapkan teknologi yang tepat sehingga sesuai dengan standard mutu produk akan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan IKM.
- 7) Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Bagi IKM
Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku IKM akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi IKM, disamping itu juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh IKM. Bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) kepada 100 IKM, Fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada 43 IKM Pendaftaran Merek dan Pelatihan Fasilitator Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi aparatur kepada 50 aparatur yang ada di 6 kecamatan

3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. Pembangunan Koperasi dan UMKM difokuskan kepada pengembangan Usaha berskala mikro, kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal. Pembinaan di bidang koperasi dititik-beratkan pada peningkatan kinerja koperasi terutama koperasi masyarakat.

Penanganan urusan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui 2 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Target Pencapaian Program sebesar 20%.
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Target Pencapaian Program 9%.

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 bertempat di Wisma Bogor Permai Jalan Sawojajar No. 38 Bogor, dengan diikuti oleh 50 pengurus koperasi se-Kota Bogor.
- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi aktif di Kota Bogor. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dapat dicatat adanya 12 koperasi baru. Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi penambahan jumlah koperasi dari 738 unit di tahun 2013, menjadi 750 unit di tahun 2014. Koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 180 unit.
Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 mengalami penambahan. Pada tahun 2014, koperasi aktif naik sebanyak 52 koperasi dari 301 unit koperasi menjadi 353 unit koperasi, atau naik 17,3 %. Sedangkan koperasi tidak aktif mengalami penurunan jumlah di tahun 2014, dari 437 unit koperasi tidak aktif di tahun 2013, telah berkurang sebanyak 40 unit koperasi menjadi 397 unit koperasi (9,2%).
- 3) Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Ke 67 Tahun 2014
Hari Ulang Tahun Koperasi diperingati setiap tanggal 12 Juli dengan kegiatan berupa: Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Bogor
- 4) Kegiatan Temu Koperasi
Kegiatan temu koperasi merupakan sarana bagi koperasi, stakeholder dan penentu kebijakan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, Dewan Koperasi Indonesia Daerah) untuk bekerjasama membangkitkan koperasi sebagai penyangga ekonomi Kota Bogor.

- 5) Kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Bogor.
Pelatihan Perpajakan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2014 di Aula Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Kementerian Pertanian RI, Jalan Tentara Pelajar Nomor 1A Kampus Penelitian Cimangu Bogor. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 30 unit Koperasi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI). dengan narasumber Narasumbernya Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Induk KPRI di Jakarta, Lembaga Pendidikan Perkoperasian Nasional (Lapenkopnas).

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- 1) Bimbingan teknis Pembuatan Proposal Pengajuan Pinjaman.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan secara teknis dalam menyusun laporan keuangan usaha yang sesuai dengan kriteria perbankan dan memberikan materi tentang pembuatan pengajuan proposal pinjaman permodalan kepada pihak perbankan. Kegiatan ini diikuti 100 orang peserta dan dilaksanakan dalam 2 angkatan
- 2) Intermediasi bagi KUMKM dengan Perbankan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan peserta pelatihan dari koperasi dan UMKM dengan pihak perbankan demi mempermudah pengajuan proposal pengajuan pinjaman modal usaha. Kegiatan ini diikuti 100 orang peserta, dan dilaksanakan dalam dua angkatan
- 3) Temu usaha bagi UMKM.
Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan bagi para pelaku UMKM dan koperasi dalam hal pengembangan usaha, pemasaran, manajemen, kemitraan dengan pengusaha besar. Kegiatan ini diikuti 100 orang peserta, dan dilaksanakan dalam dua angkatan
- 4) Gelar produk UMKM
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan meningkatnya jaringan pemasaran pelaku UMKM Kota Bogor, yang dilaksanakan melalui Pameran Gelar Inovasi UMKM Koperasi & PKBL Expo 2014, Pameran Cooperative Fair ke 11 Tahun 2014, Pameran Harkopnas Expo Tahun 2014, Pameran Produk Unggulan Daerah (PPUD) Expo Tahun 2014, Pameran Produk Unggulan UMKM, Koperasi & PKBL Smesco Expo 2014.
- 5) Seminar Sehari Motivasi Usaha UMKM.
Seminar ini diikuti 100 peserta, dan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2014 di Graha Pool Jl. Merdeka No. 110 Bogor.
- 6) Kegiatan pembinaan bagi UMKM Kota Bogor yang dilaksanakan oleh OPD lain di Kota Bogor yaitu :
 - Dinas Pertanian Kota Bogor sebanyak 696 UMKM.
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor sebanyak 104 UMKM.
 - Dinas Kesehatan Kota Bogor sebanyak 106 UMKM.
 - Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor sebanyak 581 UMKM.
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor sebanyak 31 UMKM.
- 7) Kegiatan pembinaan bagi UMKM Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa barat, yaitu : Pelatihan Tata Boga bagi IKM – UMKM sebanyak 30 UMKM.

- 8) Kegiatan pembinaan bagi UMKM Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu:
 - Temu Mitra dalam Peningkatan Kualitas Kemasan Produk UMKM sebanyak 40 UMKM.
 - Pelatihan Tata Boga Berbasis Kompetensi sebanyak 30 UMKM.
 - Peningkatan Daya Saing dan Identitas Produk Makanan dan Minuman sebanyak 80 UMKM.
 - Pelatihan Capacity Building dengan materi motivasi untuk meraih sukses sebanyak 40 UMKM.
- 9) Kegiatan pembinaan bagi UMKM Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Kemenkum HAM, yaitu Bimtek HKI bagi kalangan IKM-UMKM sebanyak 27 UMKM.
- 10) Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor. Sasaran kegiatan ini adalah pengrajin binaan Dekranasda Kota Bogor sebanyak 81 pengrajin. Berhasilnya kinerja kegiatan ini ditandai dengan:
 - Terlaksananya Dekranasda dengan mengikuti pameran sebanyak 4 kali, baik pameran regional, nasional, maupun internasional.
 - Tersusunnya laporan tahunan Dekranasda Kota Bogor.
 - Terlaksananya pemutakhiran dan upgrade website Dekranasda Kota Bogor.
- 11) Optimalisasi Data Sarana Perekonomian dan Produksi. Sasaran kegiatan ini bukan saja dinas/instansi, melainkan juga masyarakat dan pelaku ekonomi di Kota Bogor. Kinerja kegiatan ini dinilai dari berhasilnya hal-hal sebagai berikut; tersusunnya buku Evaluasi Perkembangan Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya, tersedianya buku Laporan Tahunan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor Tahun 2014, terlaksananya Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Database Sarana Perekonomian dan Produksi.

Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan di atas, target RPJM pada tahun 2013 sebesar 8% atau 2.606 UMKM sedangkan target pada tahun 2014 sebesar 9% atau 2.932 UMKM. Dalam hal ini ada peningkatan target sebesar 1% atau 326 UMKM. Pencapaian realisasi pada tahun 2013 sebesar 23,33 % atau 608 UMKM dari target sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar 77% atau 2.257 UMKM. Dalam hal ini mengalami peningkatan sebesar 53,67% atau sebesar 1.649 UMKM

4. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilaksanakan melalui dua program yaitu program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, serta program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Dua program tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Rencana Umum Penanaman Modal adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, yang berlaku sampai dengan tahun

2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang dipromosikan.

- 2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Dalam Negeri
Promosi penanaman modal dilakukan sebanyak 4 kali sesuai target dengan rincian sebagai berikut:
 - CITY EXPO di Kota Dumai pada tanggal 21 - 25 Mei 2014. CITY EXPO ini merupakan agenda tingkat nasional untuk memperkenalkan produk unggulan serta berbagai potensi daerah. CITY EXPO ini merupakan kegiatan pendukung Rakernas APEKSI se-Indonesia.
 - *Pekan Raya Jakarta (PRJ)* tanggal 6 Juni s/d 6 Juli 2014 Kota Bogor ikut berpartisipasi dalam promosi penanaman modal pada event ini di Anjungan Jawa Barat bersama dengan kabupaten/kota di Jawa Barat.
 - *De Syukron di Bandung* tanggal 19 - 20 September 2014 yang merupakan rangkaian kegiatan promosi daerah sekaligus merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Barat ke 67 di Halaman Gedung Sate, Bandung yang diikuti 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.
 - *Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) pada acara Trade and Investment Forum 2014 di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 8 s/d 12 Oktober 2014* yang diselenggarakan oleh BKPM RI. Pada kegiatan Expo ini Kota Bogor mengikuti pameran potensi daerah bersama dengan BKPPMD provinsi Jawa Barat.
- 3) Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKPPMD)
FKPPMD merupakan forum koordinasi lintas *stakeholder* penanaman modal, yaitu pemerintah daerah para pengurus asosiasi pengusaha, para pelaku usaha besar, UMKMK, perbankan, dan lain-lain. FKPPMD dilaksanakan untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dan perbankan dengan kebutuhan para pelaku usaha, dan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha.
- 4) Sinergitas Perencanaan Dan Pengembangan Investasi
BKPM dan BKPPMD memiliki kegiatan rutin untuk mensinergikan perencanaan dan pengembangan investasi di daerah. Kegiatan tersebut melibatkan semua instansi penanaman modal di daerah.
- 5) Pelayanan Perizinan Pembangunan Fisik
Pada tahun 2014 dari 267 permohonan izin fisik, telah diterbitkan sebanyak 165 izin.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,

Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan Perizinan Perekonomian
Pelayanan Perizinan Perekonomian merupakan kegiatan pelayanan perizinan perekonomian dalam melayani masyarakat atau pelaku usaha yang mempunyai usaha di Kota Bogor melalui pelayanan yang tepat waktu, perizinan yang mudah, murah, cepat dan transparan. Kegiatan ini berupa pelayanan izin melalui survei lokasi, pelayanan mobil keliling, rapat pembahasan, perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi komparasi dan koordinasi kebijakan perizinan perekonomian.
Untuk realisasi redistribusi izin gangguan pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp, 11.395.168.576,- atau 106 pesen dari target sebesar Rp.

- 10.680.000.000,-. Atau telah melebihi target sebesar Rp. 715.168.576,-
- 2) Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesra
Sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Bidang Kesejahteraan Rakyat melayani 16 jenis perizinan, dan semua tidak dikenakan retribusi (0 Rp).
Di tahun 2014, Bidang Kesejahteraan Rakyat menerbitkan 200 SK Perizinan diantaranya:
 - a. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal 19 SK
 - b. Izin Pendirian PAUD sejenis sebanyak 83 SK
 - c. Izin apotik sebanyak 29 SK
 - d. Izin mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D 5 SK
 - e. Izin Laboratorium Kesehatan 9 SK
 - f. Izin Optikal 10 SK
 - 3) Kegiatan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan Fisik
Ada 16 jenis perizinan dan non perizinan bidang pelayanan perizinan pembangunan fisik sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dari 16 jenis perizinan tersebut, yang dikenakan retribusi hanya pelayanan IMB dan PPTR sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu.
Di tahun 2014, realisasi retribusi IMB telah mencapai Rp. 358.303.026,- atau 111,97% persen dari target sebesar Rp. 320.000.000,- atau surplus sebesar Rp. 38.303.026,-.
 - 4) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan
Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi, menindaklanjuti laporan pengaduan, baik pengaduan melalui aduan langsung, surat, telepon, e-mail, website BPPTPM, dan kontak pengaduan. Selama tahun 2014, telah difasilitasi sekitar 35 kasus pengaduan
 - 5) Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal
Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, pembuatan buku saku sosialisasi, sosialisasi pada media cetak dan sosialisasi front office. Sosialisasi perizinan dilakukan pada bulan April, Mei, Juni dan Desember melalui media cetak Radar Bogor, Jurnal Bogor, Koran Metro dan Harian Bogor.
 - 6) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Perizinan On Line
Kegiatan ini sebagai bagian untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan, dengan memanfaatkan faktor teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan aplikasi. Langkah ini diperkuat dengan perbaikan infrastruktur jaringan internet untuk mendapatkan internet yang stabil.

Di tahun 2014, nilai realisasi investasi sebesar Rp. 2.805.642.264.788,- yang terdiri dari nilai PMA sebesar Rp 5.000.000.000,- dan nilai PMDN sebesar Rp 2.800.642.264.788,-. Realisasi nilai investasi di tahun 2014 mencapai 246,44 % dari target RPJMD tahun 2014 sebesar Rp. 1.138.471.000.000,-. Realisasi investasi ini ditopang satu perusahaan PMA dan 1.594 PMDN dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.705 orang.

5. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bogor melalui Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dengan sasaran meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Urusan pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Promosi Pariwisata Kota Bogor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pameran Gebyar Wisata Nusantara, dilaksanakan pada Bulan Mei 2014 di Jakarta Convention Center (JCC) yang diikuti oleh seluruh pemerintah propinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, di samping perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan berbagai negara di Asia.
- b. Penyelenggaraan Istana Untuk Rakyat (Istura) dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal: 9, 10, 11, 12 dan 14 Juni 2014, dan telah menghadirkan pengunjung sebanyak 35.000 pengunjung, yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Palembang, Medan, Kalimantan, serta dari Jepang, China, Jerman, Australia, Amerika, Maroco, Nigeria, Singapore, Philipina dan Malaysia. Kegiatan ini dilengkapi dengan pameran Pekan Pesona Pariwisata Kota Bogor dan Museum Open yang terdiri dari Museum Peta, Museum Perjuangan, dan Museum Ethnobotani.
- c. Penyelenggaraan Pasanggiri Mojang dan Jajaka, dilaksanakan untuk memilih Duta Pariwisata yang akan diikutsertakan dalam mempromosikan Pariwisata Kota Bogor baik di nusantara maupun di mancanegara. Diselenggarakan pada bulan April 2014, diikuti oleh 250 orang peserta yang kemudian diseleksi menjadi 100 peserta terbaik. Dari jumlah tersebut telah terpilih 9 pasang mojang jajaka terbaik, yang diumumkan pada grand final pemilihan mojang dan jajaka pada tanggal 24 Mei 2014 sekaligus menjadi rangkaian memperingati hari jadi Kota Bogor. Mereka terdiri dari 3 pasang Mojang dan Jajaka juara I, II, dan III serta Juara Unjuk Kabisa,
- d. Keikutsertaan Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Propinsi Jawa Barat Malam grandfinal Pasanggiri Mojang Jajaka diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2014 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Jl. Tamansari No. 73 Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 27 pasang Mojang Jajaka dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.
- e. Pameran Produk Wisata Kota Bogor, Acara dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Anjungan Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada bulan Juni 2014.
- f. Pameran Destinasi Pariwisata dan Kreatif Nusantara Diselenggarakan di Discovery Mall Kuta Bali pada tanggal 24 – 28 April 2014. Anjungan Kota Bogor menampilkan data dan visualisasi objek wisata dan budaya Kota Bogor, informasi hotel dan restoran serta menyebarkan informasi menggunakan leaflet, booklet, cd dan city map.
- g. Pameran Pariwisata, Investasi, Perdagangan dan Kerajinan Diselenggarakan pada acara Belitung Fair dan Pesona Bahari Nusantara Expo tahun 2014, yang bertempat di Pantai Wisata pada tanggal 20 – 24 Agustus 2014 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.
- h. Pameran dan Ekonomi Kreatif Indonesia Parekras Expo, Dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 September 2014 di Mataram Mall Nusa Tenggara Barat.

- i. Pameran China Internasional Travel Mart
Merupakan acara pameran perjalanan (travel) pariwisata profesional terbesar di Asia, diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 16 November 2014 di Shanghai International Expo Centre China International Travel Mart (CITM). diikuti 106 negara dan wilayah dengan 2.427 peserta, terdiri dari 1.491 peserta dari luar negeri Tiongkok dan 936 peserta dari dalam negeri Tiongkok. CITM 2014 Disponsori oleh China Nasional Tourism Administration (Kementerian Pariwisata Tiongkok) dan Pemerintah Kota Shanghai. Kota Bogor berpartisipasi dalam rangka memperluas jaringan dan akses pemasaran produk pariwisata Kota Bogor ke tingkat Internasional.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Jasa sarana Pariwisata,
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata
 - b. Rapat Koordinasi
Diselenggarakan di Wisma Bogor Permai Jl. Sawojajar No. 5 dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor dengan narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.
 - c. Pelatihan SDM Pariwisata
Berlangsung di Hotel Ririn Jl. Ciburial Indah Bogor, dengan 50 peserta dari PHRI, PHRI, ASITA, SANGGAR, HPI, Pengelola Objek Wisata, Dewan Kesenian, dan Pengrajin di Kota Bogor.
 - d. Pendataan Jumlah Wisatawan di Kota Bogor
Kegiatan dilakukan untuk mendata jumlah wisatawan pada obyek-obyek wisata dan okupasi hotel di Kota Bogor per triwulan dalam satu tahun. Rekapitulasi hasil pendataan tersebut pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - Wisatawan Nusantara : 4.148.650 orang
 - Wisatawan Mancanegara : 202.280 orang
 - Total : 4.350.930 orang.Setiap tahun kunjungan wisatawan ke Kota Bogor mengalami kenaikan sekitar 10,05%
 - e. Cetak Buku Data Potensi Pariwisata Tahun 2014
Buku data potensi pariwisata dicetak sebanyak 150 eksemplar dan didistribusikan ke instansi-instansi, OPD, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan data potensi pariwisata.
- 3) Kegiatan pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah
Kegiatan ini berbentuk :
 - a. Penyelenggaraan Seminar “Pengembangan Promosi Objek dan Daya Tarik Wisata Bagi Pelaku Pariwisata Kota Bogor” bertempat di Hotel Ririn pada tanggal 19 November 2014, diikuti 50 peserta
 - b. Kegiatan Pengawasan Objek Wisata.
Dilakukan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan dan pengembangan objek-objek wisata di Kota Bogor agar berjalan sesuai kebijakan Pemerintah Kota Bogor dan peraturan perundang-undangan, serta terolahnya data dan informasi akurat tentang objek-objek wisata di Kota Bogor.

- 4) Kegiatan Pengadaan Bahan Promosi wisata
Pelaksanaan kegiatan ini telah menghasilkan :
- DVD Profil Pariwisata Kota Bogor 1250 keping
 - Booklet Pariwisata Kota Bogor 2500 buah
 - Leaflet Saku Pariwisata Kota Bogor 2500 buah
 - Paper Bag Kota Bogor 2500 buah
 - Bogor City Map 2500 buah
 - Rolling Banner Pariwisata Kota Bogor 2 buah
 - Standing Banner Pariwisata Kota Bogor 2 buah
 - Flyer Banner Pariwisata Kota Bogor 4 buah

6. Urusan Ketenagakerjaan

Penanganan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor, melalui 3 Program yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator capaian program ini adalah ratio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung program diatas:

1) Kegiatan Bursa Kerja Expo

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pengguna jasa tenaga kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September - 01 Oktober 2014 bertempat di Gelanggang Olahraga Padjajaran Bogor dan diikuti oleh 37 Perusahaan yang menyediakan lowongan sebanyak 3.147 lowongan

Kegiatan ini telah berhasil menarik 1.337 pencari kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah terserapnya pencari kerja di perusahaan sebanyak 164 orang pencari kerja

2) Kegiatan Pemberian Kerja Sementara (Padat Karya)

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur dan Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara melalui pengerjaan normalisasi saluran air. Target dari kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin serta korban PHK di Kota Bogor. Kegiatan ini dialokasikan agar dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 200 orang dengan alokasi masing-masing 100 orang dari tiap kelurahan. Pada realisasi pelaksanaan kegiatan, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 140 orang.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator capaian program ini adalah persentase tenaga kerja yang terlatih dari jumlah tenaga kerja. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung program diatas adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Latihan Kerja

Kegiatan ini mempunyai *output* yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja, diantaranya adalah :

- a. Pemeliharaan Komputer dan Alat-alat pelatihan
- b. Pengecatan Gedung
- 2) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pencari Kerja dan Penganggur
Kegiatan ini diikuti oleh 96 peserta melalui pemberian keterampilan kerja berupa keterampilan menjahit/garmen apparel 2 paket (32 orang), teknik las 2 paket (32 orang), dan teknik computer 2 paket (32 orang).
- 3) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin)
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi keluarga miskin untuk dapat berwirausaha sehingga dapat menambah penghasilan bagi keluarganya dan bukan untuk mengisi lowongan di perusahaan.
- 4) Kegiatan Pelatihan Melalui Pemagangan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas keahlian pencari kerja sebagai bekal memasuki dunia usaha berupa pemberian pelatihan (pemagangan) pada 8 (delapan) perusahaan di Kota Bogor, yaitu sebanyak 75 orang peserta
- 5) Kegiatan Pembinaan Lembaga Latihan Swasta
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas bagi para instruktur di Lembaga Latihan Swasta, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah 45 orang pengelola Lembaga Latihan swasta yang berupa salon, lembaga latihan kerajinan / keterampilan dan lain-lain.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui:

- 1) Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh
Kegiatan ini mempunyai indikator capaian program berupa UMK yang sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan meningkatnya kesejahteraan pekerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemilihan pekerja teladan tingkat Kota Bogor yang diikuti sebanyak 20 Orang pekerja yang berasal dari perusahaan di wilayah Kota Bogor
- 2) Kegiatan Penelitian dan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)
Kegiatan ini mempunyai indikator capaian program berupa UMK yang sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
Kegiatan ini bertujuan menciptakan kesamaan bahasa dan gerak langkah dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam memandang, memecahkan dan menyelesaikan serta menciptakan kerjasama dalam menangani masalah ketenagakerjaan.
- 4) Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja
Indikator capaian program dari kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja asing yang dibina dengan hasil terpenuhinya syarat administratif tenaga kerja asing di perusahaan.
- 5) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Tenaga Kerja Asing
Kegiatan pembinaan terhadap tenaga kerja asing dilakukan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja asing khususnya yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kerja asing.
- 6) Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan terlaksananya bulan K3 serta timbulnya kesadaran kolektif untuk melaksanakan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap

perusahaan dan dilaksanakan melalui sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja dan monitoring sistem penerapan keselamatan dan kesehatan kerja .

7. Urusan Ketahanan Pangan

Penanganan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan melalui 2 program, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Penjabaran dari program – program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan merupakan sebuah upaya meningkatkan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga baik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, merata di setiap wilayah dan harga yang terjangkau. Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini terukur berdasarkan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2014 skor PPH dari sisi Konsumsi Kota Bogor sebesar 82,6 dengan Tingkat Konsumsi Energi sebesar 1.797 kkal/kapita/hari, sementara Skor PPH dari sisi Ketersediaan sebesar 90,7 dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.230,8 kkal/kapita/hari atau sebesar 101,4%.

Program peningkatan ketahanan pangan dijabarkan dengan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
Tercakup di dalam kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan seperti terurai di bawah ini:
 - Pengolahan data harga dan penyusunan laporan.
 - Sosialisasi Demplot Budidaya ubi jalar dan talas,
 - Sosialisasi Demplot Pembuatan Pupuk Organik dengan Aktivator EM-4
 - Demplot tanaman ubi jalar dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar, yang dilakukan oleh Kelompok Tani Wanita (KWT) Bunga Matahari di Pamoyanan
 - Demplot Tanaman Talas
 - Fasilitas Lumbung Pangan
- 2) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (Distribusi Raskin)
Tercakup di dalam kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Beras Miskin (Raskin)
 - Musyawarah Kelurahan (Musykel), bertujuan untuk memvalidasi data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) hasil PPLS 2011 dan memverifikasi nama dan alamat sebanyak 39.002 RTS-PM Raskin.
 - Realisasi penyaluran Raskin Kota Bogor tahun 2014 mencapai 100% pagu sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebanyak 12 bulan alokasi, sebesar 7.020.360 kg.
 - Pembayaran raskin tahun 2014 telah lunas 100 %
 - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Raskin
 - Prestasi Pelaksanaan Program Raskin, prestasi yang diraih Kota Bogor dalam pendistribusian raskin adalah pada tahun 2014 Kota Bogor mendapatkan predikat terbaik dalam penyaluran Raskin se-

Wilayah I Sub Divre Cianjur dan di Tingkat Propinsi Jawa Barat mendapatkan peringkat I dalam penyaluran Raskin tahun 2013 yang penghargaannya diberikan pada tahun 2014 oleh Gubernur Jawa Barat

- Operasi Pasar Khusus (OPK), berfungsi untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan dan mengatasi lonjakan harga beras. selain menyalurkan raskin reguler, Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Perum Bulog juga berencana akan melaksanakan OPK (Operasi Pasar Khusus) yang rencananya akan disalurkan bulan Januari 2015. Berhubung dalam pendistribusian OPK tidak ada biaya operasionalnya maka kepastian pelaksanaannya masih dalam proses.

- 3) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG)
Tercakup di dalam kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi P2KPG
 - b. Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal,
 - c. Kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kota Bogor
 - d. Kegiatan Festival Kuliner Pangan Lokal Kota Bogor (5). Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi Jawa Barat,
 - e. Mengikuti Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Propinsi Jawa Barat sekaligus mengikuti agenda pameran dengan membawa produk-produk olahan pangan lokal yang berasal dari Kota Bogor
- 4) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak di Lingkungan Sekolah,
 - b. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan,
 - c. Uji Mutu Pangan dan
 - d. Pembuatan bahan promosi berupa poster, brosur dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat.
- 5) Analisis Konsumsi Pangan Kota Bogor
Kegiatan Analisis Konsumsi Pangan memiliki tujuan untuk (1) Menganalisis situasi konsumsi pangan wilayah berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di wilayah Kota Bogor, (2) Menganalisis sasaran dan proyeksi konsumsi pangan wilayah berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di wilayah Kota Bogor dan (3) Menganalisis estimasi kebutuhan pangan wilayah berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di wilayah Kota Bogor.
- 6) Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bogor
Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen data statistik yang dapat memberikan informasi mengenai situasi ketahanan pangan di suatu wilayah, khususnya untuk aspek ketersediaan pangan, baik di tingkat nasional maupun propinsi dan kabupaten/kota. Melalui analisis situasi ketersediaan pangan secara kuantitatif dengan menggunakan NBM yang memberikan informasi mengenai data produksi, pengadaan serta semua perubahan yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui sejauh mana kondisi bahan makanan yang tersedia dan siap untuk dikonsumsi penduduk.
- 7) Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor
Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor mempunyai tugas yaitu (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman pangan dan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi, dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi; (2) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan nasional; (3) Melaksanakan evaluasi dan Pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dan (4) Menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini ditujukan untuk membantu meningkatkan pendapatan petani. Dalam menjabarkan program ini, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1) Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program Provinsi Jawa Barat yang digulirkan sejak tahun 2009 dimana masing-masing kelompok mendapat dana bantuan bergulir sebanyak Rp 40.000.000,-. Pada tahun pertama disebut tahap pertumbuhan, tahun kedua tahap pengembangan dan tahun ketiga tahap kemandirian, untuk Kota Bogor ada terhadap 6 kelompok penerima UEP yaitu:

- Kelurahan Cikaret, Kec. Bogor Selatan
- Kelurahan Kertamaya, Kec. Bogor Selatan
- Kelurahan Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan
- Kelurahan Margajaya, Kec. Bogor Barat
- Kelurahan Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat
- Kelurahan Situ Gede, Kec. Bogor Barat

Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) merupakan program Kementerian Pertanian yang digulirkan sejak tahun 2010 dimana masing-masing kelurahan mendapat dana bantuan bergulir sebanyak Rp 100.000.000,-. Pada tahun pertama disebut tahap pertumbuhan, tahun kedua tahap pengembangan dan tahun ketiga tahap kemandirian, untuk Kota Bogor ada terhadap 3 kelurahan penerima DEMAPAN yaitu Kelurahan Pamoyanan di Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Kencana di Kec. Tanah Sareal dan Kelurahan Balumbang Jaya di Kecamatan Bogor Barat. Dan verifikasi

2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani

Tercakup di dalam kegiatan ini adalah sub – sub kegiatan sebagai berikut:

- (1). Pelaksanaan Pertemuan Nasional Kelompok Tani Nasional Andalan yang biasa disebut dengan Pertemuan Nasional (PENAS) ke XIV Tahun 2014 di Stadion Kanjuruhan, Desa Pendarangan, Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang – Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Nasional (PENAS) ke XIV dari tanggal 7 s/d 12 Juni 2014,
- (2). Pelaksanaan Pertemuan Daerah Kelompok Tani Tingkat Provinsi Jawa Barat yang biasa disebut dengan Pertemuan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Jawa Barat di laksanakan di SMK Pembangunan Pertanian Negeri Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
- (3). Pelaksanaan Workshop Manajemen Kelompok Tani,
- (4). Pelaksanaan Kegiatan Benah Kelompok Tani
- (5). Penyuluhan dan Pendampingan Petani
- (6). Penyusunan dan Pengolahan

Data Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2014

- 3) Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga
Tercakup di dalam kegiatan ini adalah kegiatan – kegiatan sebagai berikut
(1). Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Petani dan Penyuluh Pertanian,
(2). Perlombaan Kelompok Tani Berprestasi (3). Perlombaan Tingkat
Provinsi Jawa Barat

Realisasi pencapaian skor PPH Kota Bogor baru mencapai 82,6% dari target pencapaian 86% pada tahun 2014, hal ini dikarenakan peningkatan skor PPH dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: pengetahuan dan pemahaman pentingnya konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), preferensi atau kecenderungan masyarakat hanya menyukai makanan tertentu, budaya atau pola konsumsi pangan, daya beli dan akses pangan. Untuk meningkatkan skor PPH perlu didukung dari berbagai pihak baik dalam bentuk anggaran, strategi program, kegiatan dan SDM yang berkualitas

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB). Urusan ini diurai melalui 3 program meliputi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Kegiatan-kegiatan dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Program ini dijabarkan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Pencapaian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Kegiatan tersebut sebagai sarana memperkenalkan berbagai jenis alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada atau baru serta cocok digunakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Syariah
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi ekonomi syariah dikalangan remaja mesjid yang berada di pesantren Darul Ullum di kelurahan Baranangsiang, Al Falaq di Kelurahan Gunung Batu dan Miftahul Ullum di Kelurahan Pasir Kuda.
- 3) Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE), dari target sebanyak 2650 KK yang memperoleh guliran dana, pada tahun 2014 telah mencapai lebih dari target yaitu sebanyak 2866 KK atau sebesar 115,3%.
- 4) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan–Simpan Pinjam (UEK-SP)
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan sinergitas pengelolaan keuangan UEK-SP bagi para pengelola UEK-SP. Melalui pelatihan manajemen/administrasi UEK-SP yang diikuti 142 ketua UEK petugas kelurahan dan petugas kecamatan se-Kota Bogor. Penyelenggaraan Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi bagi Para Pelaku Usaha di 6 Kecamatan UEK-SP se-Kota Bogor yang diikuti 204 peserta. Adapun dana yang bergulir pada tahun 2014 diberikan kepada 868 KK di 16 kelurahan, terdiri dari:
 - Kelurahan Batutulis : 42 KK

- Kelurahan Ranga Mekar : 13 KK
- Kelurahan Muarasari : 147 KK
- Kelurahan Bondongan : 25 KK
- Kelurahan sindang Barang : 11 KK
- Kelurahan Sukasari : 22 KK
- Kelurahan Baranangsiang : 25 KK
- Kelurahan Pakuan : 90 KK
- Kelurahan Curug Mekar : 62 KK
- Kelurahan Bubulak : 30 KK
- Kelurahan Pasir Kuda : 132 KK
- Kelurahan Kedung Badak : 30 KK
- Kelurahan Cibuluh : 149 KK
- Kelurahan Ciparigi : 25 KK
- Kelurahan tanah Baru : 16 KK
- Kelurahan Babakan : 71 KK

5) Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Poksus UP2K) PKK Kelurahan dan Penilaian UP2K terbaik Tingkat Kota dan Provinsi.

Kegiatan tersebut termasuk dalam program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan, dari target sebesar 68 kelurahan tercapai 100%.

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) di Kelurahan.
Dalam rangka menciptakan posdaya sebagai pusat organisasi pemberdayaan keluarga, wadah komunikasi dan kebersamaan masyarakat
- 2) Perlombaan Kelurahan
Berdasarkan indikator penilaian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan penilaian kepada Kelurahan se-Kota Bogor untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan yang mewakili Kota Bogor dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014 berhasil menyandang Juara I Tingkat Provinsi dan mewakili Provinsi Jawa Barat di tingkat Nasional berhasil menyandang juara 5 (lima).
- 3) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan kegiatan nasional yang diadakan rutin setiap tahun untuk menumbuh kembangkan budaya gotong royong masyarakat baik melalui kegiatan fisik maupun non fisik di bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya dan agama serta bidang lingkungan.
- 4) TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)
Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mensinergikan kerjasama antara pemerintah, TNI dan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan Sosialisasi TNI Manunggal Satata Sariksa dilaksanakan dilokasi Lomba Kelurahan Pamoyanan, dana kegiatan TMSS merupakan dana Pendamping dari Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang berasal

dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatannya pembangunan jalan setapak sepanjang 150 M² dan Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) yang menghubungkan jalan RW 08 ke RW 09 kelurahan Pamoyanan.

- 5) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPMK) Kelurahan dan Kecamatan. Program daerah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang bertujuan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Dalam Kegiatan ini BPMKB berperan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan, kelurahan bersama LPM. Peran BPMKB dalam monitoring program adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut.

Kegiatan PDPMK didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dialokasi bagi masing-masing Kecamatan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau secara keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan anggaran PDPMK dialokasikan tiap Kelurahan sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau secara keseluruhan untuk 68 kelurahan sebesar Rp. 11.900.000.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Kegiatan PDPMK tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kecamatan dan Kelurahan diprioritaskan pada kegiatan pembangunan fisik. Hasil kegiatan ini adalah pembangunan dan perawatan jalan setapak, jalan lintas, turap, drainase, pembangunan dan renovasi masjid, madrasah, PAUD, Posyandu, MCK, RTLH yang dikerjakan masyarakat, namun pengadaan barang dilaksanakan melalui penunjukan langsung (pihak ketiga).

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan dan Pembinaan PKK.

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran sebagai penggerak dalam proses pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut pembinaan dasa wisma PKK di lokasi lomba kelurahan, P2WKSS, Posyandu, UP2K dan 10 Program Pokok PKK dengan jumlah peserta 400 orang, pembuatan buku administrasi RT/RW sebanyak 4900 buku, bantuan kemasyarakatan untuk asosiasi LPM sebanyak 1 asosiasi serta pembinaan bagi LPM sebanyak 170 orang dan peserta pelatihan motivator KPM sebanyak 68 orang.
- 2) Kegiatan Pembinaan PKK merupakan salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan dengan berbagai kegiatan yang tersusun dalam 10 Program Pokok PKK:
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

- Gotong Royong
- Pendidikan dan Keterampilan
- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- Kesehatan
- Kelestarian Lingkungan Hidup
- Perencanaan Sehat.

d. Program pengembangan data/informasi statistik daerah.

Program pengembangan data/informasi statistik daerah dilaksanakan dengan Penyusunan Profil Kelurahan sebagai implemementasi dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2007. Tujuan program tersebut untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kelurahan dan ter-updatenya data profil kelurahan bidang ekonomi serta tercetaknya buku profil kelurahan.

9. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi ditangani Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi. Program ini bertujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin serta mengurangi jumlah pengangguran di Kota Bogor dengan menyalurkan para calon transmigran dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penjajakan ke Lokasi Transmigrasi
Penjajakan ke lokasi transmigrasi dilakukan ke Unit Pemukiman Transmigrasi Satay Lestari Kabupaten Kayong Utara provinsi Kalimantan Barat pada Januari Tahun 2014.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran
Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan calon Transmigrasi dilakukan di 68 kelurahan dengan menyampaikan informasi tentang program transmigrasi tahun 2014. Sosialisasi dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan September 2014 yang dilanjutkan dengan rekrutmen pada bulan Oktober 2014, serta seleksi calon transmigran pada bulan November 2014. Kegiatan itu telah menarik 3 kepala keluarga yang berminat bertransmigrasi,

MISI 2 : Mewujudkan Kota Yang Bersih Dengan Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas

1. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 7 program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Adapun sasaran program ini adalah terpantaunya kualitas air, udara dan tanah, serta meningkatnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Capaian sasaran program tahun 2014 dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan
Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan ini bertujuan agar terpantaunya kualitas udara (udara, ambien, emisi kendaraan, cerobong); terpantaunya kualitas air sungai, situ dan sumur,serta tersedianya data kualitas tanah.
- 2) Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar
Kegiatan ini bertujuan menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan dan atau usaha di Kota Bogor.
Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air terdiri dari sektor kegiatan industri, domestik, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, tempat pembuangan akhir, rumah sakit, hotel dan restoran, lapangan golf, laundry dan rumah potong hewan.
- 3) Pemantauan dan Pengawasan terhadap Amdal, UKL/UPL dan SPPL
Kegiatan ini bertujuan mengetahui upaya penataan terhadap dokumen lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemprakarsa kegiatan dan/atau usaha di Kota Bogor, terbina dan terawasinya kegiatan dan/atau usaha di Kota Bogor yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup agar terciptanya kegiatan dan/atau usaha yang berwawasan lingkungan.
- 4) Pengendalian Pencemaran Air
Kegiatan ini bertujuan mengendalikan pencemaran air yang diakibatkan dari adanya kegiatan/ usaha, sarana sanitasi masyarakat, dan peternakan.Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya informasi mengenai efisiensi penurunan beban pencemar dari IPAL sebanyak 43 unit, sanimas dan biogas.Anggaran kegiatan ini sebesar 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2014 terealisasi Rp. 18.807.500,- atau 12,79 %. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena gagal lelang, yang disebabkan karena perusahaan yang mengajukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan.
- 5) Penegakan Hukum Lingkungan
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini berupa penyelesaian berbagai kasus lingkungan yang terjadi di Kota Bogor, sesuai dengan SOP dan mekanisme penanganan pengaduan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Air (IPAL Biogas)
Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Air (IPAL Biogas)bertujuan mengurangi pencemaran terhadap badan air atau sungai, sebagai upaya pengendalian pencemaran air.
- 7) Inventarisasi dan Identifikasi Emisi Rumah Kaca
Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer.

Adanya berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak era pra-industri emisi gas rumah kaca ke atmosfer mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah pemanasan global dan perubahan iklim.

b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program diatas dilakukan melalui 3 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengujian dan Analisa Kualitas Limbah Cair
Kegiatan ini bertujuan agar terujinya kualitas limbah cair dari kegiatan usaha yang akan dipakai sebagai bahan pengendalian polusi limbah cair dari kegiatan usaha. Jumlah kegiatan usaha yang diuji sebanyak 41 sampel,
- 2) Pengumpulan Minyak Jelantah
Kegiatan Pengumpulan minyak jelantah merupakan kegiatan inovatif yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor
- 3) Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3
Kegiatan Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan kepedulian lingkungan hidup. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum, warga sekolah, dan para pelaku usaha.
- 2) Identifikasi Terhadap Kegiatan dan/atau usaha dan UKM di Kota Bogor terhadap Dampak Lingkungan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dan/atau usaha dan UKM yang berdampak terhadap lingkungan terutama kegiatan UKM bengkel umum kendaraan bermotor.
- 3) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi keadaan lingkungan baik penyebab maupun dampak permasalahannya di Kota Bogor. Penyusunan aporan SLHD merupakan hasil pengkajian lingkungan hidup guna memberikan gambaran atas dampak kegiatan manusia dan alam yang terjadi terhadap lingkungan hidup di Kota Bogor. Laporan SLHD ini selain bermanfaat sebagai acuan bagi penyelenggara pembangunan di daerah juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pengusaha, peneliti dan pemerhati lingkungan hidup.

d. Program Kemitraan Lingkungan Hidup

Sasaran program adalah meningkatnya kemitraan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat swasta, swasta dalam bidang lingkungan hidup.

e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan lahan kritis dan meningkatnya konservasi sumberdaya air dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah**
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah di Kota Bogor sehingga konservasi air tanah tetap terjaga dan berkelanjutan.
Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan air tanah dari kegiatan dan/atau usaha industri di Kota Bogor yang memiliki izin pemanfaatan air tanah dan yang belum memiliki izin air tanah
- 2) **Perlindungan, pelestarian dan pengembangan biodiversity dengan Sehati, Kehati dan Pemerhati Serta Arboretum.**
Tujuan kegiatan adalah meningkatkan penanganan lahan kritis di Kota Bogor; meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal penanaman pohon (penghijauan lingkungan) secara swadaya; meningkatkan keanekaragaman hayati di Kota Bogor, serta melaksanakan penanaman pohon dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia tingkat Kota Bogor.
- 3) **Pembangunan Sumur Pantau**
Sumur pantau digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah sekaligus alat pemantauan kondisi air tanah di Kota Bogor dan hasil yang didapatkan adalah kondisi air tanah berupa rekaman data yang akan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam hal evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- 4) **Fasilitasi Implementasi Green Province (Banprov Jabar 2014)**
Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain ditunjukkan melalui upaya untuk menjadi provinsi hijau (Green Province). Salah satu upaya untuk mewujudkan provinsi hijau, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menargetkan pencapaian kawasan lindung sebesar 45 % dari luas daratan Jawa Barat. Target tersebut digariskan melalui pencapaian luas (kuantitas) dan peningkatan kualitas dari kawasan lindung. Perwujudan hijau secara fisik pada kawasan lindung merupakan unsur utama menuju tercapainya Provinsi Hijau (Green Province) di Jawa Barat.
- 5) **Pembangunan Sumur Resapan (Bantuan Provinsi DKI 2014)**
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengendalikan banjir di DKI Jakarta serta menambah cadangan air/konservasi dan rehabilitasi air tanah di Kota Bogor.

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tingkat capaian indikator kinerja penambahan luas taman sebesar 106,34% telah melampaui target capaian dengan kategori memuaskan. Uraian mengenai capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut: (1) Kegiatan Seksi Pemeliharaan Taman, (2). Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau, (3). Pengadaan Sarana dan Prasarana, (4). Penyediaan dan Pemutakhiran Data Pertamanan, (5).

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (6). Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (7). Pembangunan Hutan Kota Ahmad Yani (8). Pemanfaatan Ruang Kota Hijau (P2RKH) Tahun 2014

g. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Persampahan

Upaya pencapaian target tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan persampahan melalui pengelolaan biaya operasional pelayanan kebersihan, peremajaan dan pemeliharaan armada pengangkutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari sumber melalui pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) serta pengelolaan sampah di TPA Galuga yang berwawasan lingkungan

Data timbulan sampah Kota Bogor pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 2.673m³/hari, meningkat sebesar 189 m³/hari atau 7,07 % dari tahun 2013 yaitu sebesar 2.484m³/hari dan pelayanan persampahan berdasarkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA Galuga adalah sebesar 1884 m³/hari, meningkat sebesar 136 m³/hari atau 7,22% dari tahun 2013 yaitu 1748 m³/hari. Berdasarkan volume sampah terangkut tingkat pelayanan persampahan di Kota Bogor mencapai 70,48% dengan luasan cakupan wilayah pelayanan persampahan seluas 8.351.88 Ha dari luas wilayah Kota Bogor 11.850 Ha. Hal ini berarti Pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan prosentase pelayanan persampahan sebesar 0.11% atau 13.04 Ha dibandingkan tahun 2013 (70,37 % atau 8.338,84 Ha), serta melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2014 yaitu 70,4%.

Berikut disajikan volume timbulan sampah, sampah terangkut dan cakupan wilayah pelayanan Tahun 2009 – 2014:

TAHUN	Σ TIMBULAN SAMPAH (m ³ /hari)	Σ SAMPAH TERANGKUT (m ³ /hari)	CAKUPAN WILAYAH PELAYANAN (%)
2009	2,294	1,602	69.8
2010	2,337	1,636	70.0
2011	2,402	1,685	70.14
2012	2,447	1,718	70.21
2013	2,484	1,748	70.37
2014	2,673	1,884	70,48

Sumber : LKPJ tahun 2014

- 1) Penyediaan, Peremajaan dan Pemeliharaan Sarana Pengangkut Sampah Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan persampahan diperlukan dukungan sarana yang memadai, antara lain:
 - Peremajaan dan pengadaan dump truk sebanyak 20 unit
 - Peremajaan dan Pengadaan amroll roll sebanyak 5 unit
 - Pengadaan kendaraan mobil pick up sebanyak 1 unit
 - Penyediaan dan peremajaan bak container sebanyak 24 unit
 - Penyediaan gerobak sampah sebanyak 259 unit
 - Perbaikan dan Pembangunan landasan container 4 lokasi
 - Penyediaan dan peremajaan TPS sebanyak 119 lokasi
- 2) Perbaikan dan Pembangunan Landasan Container dan TPS Lokasi penempatan sarana pengumpulan sampah berupa container pada tahun 2014, adalah sebagai berikut :
 - Jln. Bina Marga
 - Bantarjati

- Gg. Kelor Semplak
- Jl. Pengadilan
- Jl. Cilebud Sukaresmi
- Eks. Pasar Tanah baru
- Jln. Kantor Batu
- Sukamulya Gardu
- Jln. Paledang
- Simpang Bangbarung
- Jln. Mayor Oking

Kegiatan pengumpulan sampah juga dilakukan di TPS (Tempat Penampungan Sampah) yang ditempatkan di pinggir jalan, pasar, toko dan permukiman. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdapat 957 unit TPS yang terdiri dari TPS satu warna sebanyak 807 unit dan TPS dua warna (organik dan an organik) sebanyak 150 unit. TPS satu warna rata-rata dapat menampung volume sampah sebanyak 1,5 m³ dan TPS dua warna dapat menampung volume sampah rata-rata 3 m³ sehingga daya tampung seluruh TPS seluruh Kota Bogor sebesar 1.660,5 m³.

3) Pengelolaan Sampah dengan program 3R dan Revitalisasi Sarana Prasarana 3R

Dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kota Bogor yaitu peningkatan pelayanan kebersihan, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kota Bogor, serta dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan yaitu melalui pengurangan timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat; meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengolahan persampahan melalui pengelolaan sampah dengan program 3R terutama di daerah yang belum terlayani oleh kendaraan angkutan sampah; memberdayakan masyarakat dengan pendekatan partisipatif melalui pemilahan dan pengurangan sampah di sumber sehingga target reduksi dan penyediaan fasilitas pengurangan sampah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 20% sampai tahun 2019 dapat tercapai. Sampai dengan tahun 2014 di Kota Bogor terdapat 12 lokasi TPS 3R berbasis masyarakat yang tersebar di Kota Bogor yaitu:

- RW X Perumahan Griya Katulampa, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur;
- RW XVII Perumahan Mutiara Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur;
- RW 06 Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan;
- RW 03 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan;
- RW 02 Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan;
- RW XV Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan;
- RW 04 Kampung Ciburial Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara;
- RW 02 UPTD Rusunawa Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat;
- RW 02 Kampung Situ Pete Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal;
- RW 04 Kampung Seremped Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal;
- RW 04 Kampung Salabenda Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal

- RW 13 Perumahan Dharmais Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal

4) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Upaya Pemberian Pemahaman kepada masyarakat dan sebagai bentuk program pendampingan dari DKP melalui kegiatan Pemerdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

5) Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Pola Padat Karya
Dalam kegiatan ini DKP mempekerjakan 699 orang tenaga padat karya yang penempatannya tersebar diseluruh Kota Bogor, dengan tugas penyapuan pengangkutan sampah. Perekrutan tenaga padat karya ini dilakukan karena jumlah tenaga kerja yang menangani bidang kebersihan hanya berjumlah 378 orang dan tidak dapat melayani seluruh wilayah Kota Bogor.

6) Penunjang Kegiatan Retribusi Kebersihan
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan target retribusi, berupa inventarisir wajib retribusi. Dalam kegiatan ini juga bekerjasama dengan PDAM. Dimana pembayaran retribusi pelayanan persampahan dilakukan dengan dua cara yaitu Non PDAM dimana pembayaran retribusi melalui petugas DKP dan cara PDAM yang pembayaran retribusi termasuk pembayaran PDAM.

7) TPA Galuga
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pengelolaan TPA Galuga dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dilakukan melalui Perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Galuga yang telah berakhir pada tanggal 24 Juli 2012. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Galuga antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 658.1/2/PRJN/KS/2012 dan 658.1/Perj.199-DKP/2012 tanggal 16 Juni 2012, berlaku selama 4 tahun enam bulan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2015.

Di dalam naskah perjanjian kerjasama pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Galuga tercantum hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bogor. Beberapa hal yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor diantaranya:

- Pengelolaan TPAS Galuga (termasuk pemrosesan akhir sampah, penataan, penyediaan sarana/prasarana dan pemeliharaan).
- Kontribusi yang diberikan kepada pihak kesatu dan masyarakat sekitar.
- Pengendalian dan pengawasan terhadap dampak lingkungan.
- Pengolahan air lindi/leachate dan penanganan gas methane
- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur
- Penghijauan dan pemeliharaan TPAS Galuga
- Penyediaan sarana prasarana air bersih dan pelayanan kesehatan
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Pembinaan pekerja pengolah sampah/pemulung.

Dalam rangka pengelolaan TPA Galuga yang berwawasan lingkungan serta pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Galuga. Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya adalah:

- Composting
- Pembangunan Jalan Kerja Dalam Areal TPA Galuga.

- Perbaikan Sarana TPA Galuga:
- Pengelolaan Sampah di TPA
- Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
- Kegiatan Penutupan Lahan Zona Tidak Aktif Dengan Tanah Merah (Controlled Landfill)
- Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Dampak Longsoran Sampah
- Kegiatan Perencanaan, Persiapan, dan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dampak Longsoran Sampah dan Air Lindi/Leachate di TPA Galuga
- Kegiatan Pembangunan Pagar Tembok Pembatas bertujuan.

2. Urusan Perumahan

Urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bantuan Teknis Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kegiatan Bantuan Teknis Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan sosial perbaikan RTLH di enam kecamatan. Untuk bantuan perbaikan RTLH yang bersumber dari dana bantuan gubernur, telah dilaksanakan verifikasi administrasi proposal permohonan bantuan dana perbaikan RTLH sebanyak tiga ratus unit yang tersebar di tiga belas kelurahan.
- 2) Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Muarasari
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya Dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
 - Jalan lingkungan permukiman/perumahan dengan target 21.666,67 m², tercapai 222,5 m²
 - Tembok Penahan Tanah dengan target 1.066,67 m³ tercapai 65,07 m³
 - Saluran Drainase, dengan target 833,33 m' tercapai 201 m'
- 3) Pendukung Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penataan lingkungan berbasis komunitas dari Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kelurahan pada Kecamatan Bogor Selatan, yaitu Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Bojongsarta dan Kelurahan Mulyaharja
Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan kawasan permukiman dengan melibatkan masyarakat dari mulai tahap awal yaitu penjaringan usulan kebutuhan kemudian direncanakan sampai tahap akhir yaitu proses pelaksanaan fisik pekerjaan. Anggaran yang dialokasikan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima langsung melalui

- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan penerima bantuan.
- 4) Penunjang Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
 Pada tahun 2014, kegiatan Penunjang Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Paledang – Panaragan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di wilayahnya.
 Target untuk kegiatan RPKPP masuk ke target penanganan kawasan kumuh, untuk pencapaian kinerjanya cukup di deskripsikan secara narasi yaitu sebagai berikut:
 Kegiatan RPKPP pada tahun ini dianggarkan oleh APBD Kota Bogor untuk kegiatan RPKPP yang berlokasi di Kelurahan Paledang dan Panaragan. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan rencana kegiatan selama 5 tahun dan dilaksanakan dari tahun 2012 – 2017. Tahun 2014 ini dilakukan pekerjaan sebagai berikut tembok penahan tanah, jalan lingkungan, saluran dan perbaikan jembatan
- 5) Kegiatan Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan
 Kegiatan dilaksanakan di lokasi binaan P2WKSS di RW. 06 Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara; lokasi binaan lomba kelurahan di Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan; lokasi binaan lomba Posyandu di kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah; dan lokasi binaan lomba 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan ini bertujuan menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan perumahan di lokasi binaan dengan rincian sebagai berikut :
- Jalan lingkungan perumahan dengan target 1.955 m² tercapai 3.002,43 M²
 - Tembok Penahan Tanah dan saluran drainase dengan target 248,13 m³ tercapai 241,75 m³
 - Prasarana dan Sarana Umum dengan target 4unit tercapai 5 unit
- 6) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana
 Kegiatan ini bertujuan untuk menangani dan menanggulangi bencana dengan terbangunnya sarana dan prasarana dikawasan bencana lingkungan perumahan dengan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana yaitu terbangunnya Tembok Penahan Tanah (TPT) di kawasan bencana lingkungan perumahan 1.066,67 m³ tercapai 425 m³
- 7) Kegiatan Pembangunan/perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
 Kegiatan ini bertujuan menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan perumahan di wilayahnya dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Data Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

Kegiatan	Uraian	Target	Tercapai
Pembangunan/ Perbaikan Sarana	Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Tanah Sareal :		

Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Tanah Sareal	1. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	75.698 m ²	9.491,49 m ²
	2. Tembok Penahan Tanah		3.1611 m ³
	3. Jembatan Lingkungan	6 Unit	1 Unit
	4. Saluran Drainase	5,514 m'	1.618,18 m'
Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Selatan	Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Selatan		
	1. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	59.205 m ²	79.587 m ²
	2. Tembok Penahan Tanah	7.278 m ³	5..044,96 m ³
	3. Jembatan Lingkungan	10 Unit	9 Unit
	4. Saluran Drainase	4.563 m'	4.066,43 m'
Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Barat	Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Barat:		
	1. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	86.410 m ²	144.985,66 m ²
	2. Tembok Penahan Tanah	8.311 m ³	5.383,3 m ³
	3. Jembatan Lingkungan	10 Unit	9 Unit
	4. Saluran Drainase	6.709 m'	2.329,8 m'
	5. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	86.410 m ²	144.985,66 m ²
Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Tengah	Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Tengah :		
	1. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	19.229 m ²	17.772,8 m ²
	2. Tembok Penahan Tanah	5.394 m ³	2.074,7 m ³
	3. Saluran Drainase	2.550 m'	785,11 m'
Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Timur:		
	1. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	36.450 m ²	42.810,42 m ²

Kec. Timur	Bogor	2. Tembok Penahan Tanah	2.411 m ³	1.811,69 m ³
		3. Jembatan Lingkungan	3 Unit	3 Unit
		4. Saluran Drainase	2.913 m'	1.701,8 m'
Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Utara	Terbangunnya sarana prasarana di wilayah Bogor Utara :			
	1. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak Perumahan/Permukiman	58.614 m ²	21.136,8 m ²	
	2. Tembok Penahan Tanah	3.488 m ³	561.496 m ³	
	3. Jembatan Lingkungan	6 Unit	4 Unit	
	4. Saluran Draenase	3.254 m'	2.303,42 m'	

8) Kegiatan Penunjang PNPM untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan infrastruktur Pemukiman APBN yaitu :

- Perbaikan/pembangunan drainase sepanjang 16.397 m'
- Perbaikan jalan lingkungan seluas 37.355 m²
- Perbaikan jembatan sebanyak 4 unit
- Perbaikan rumah tidak layak huni 492 unit
- Pembangunan Sarana Perdagangan 1 unit
- Pembangunan Sarana Pendidikan 1 unit
- Pembangunan MCK sebanyak 16 unit
- Pembuatan sarana persampahan 34 unit
- Perbaikan / pembangunan talud sepanjang 2.407 m
- Perbaikan pagar jalan sepanjang 100 m²

9) Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa Menteng Asri

Jenis pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilaksanakan terdiri dari:

- Perbaikan hunian antara lain adalah kebocoran/perembesan dihunian, perbaikan saluran pembuangan sampai ke drainase utama dan pembuatan sumur resapan sebanyak 6 buah
- Perbaikan jalan lingkungan Rusun
- Perbaikan kantor pengelola UPTD Rusun
- Pembuatan pagar balkon twin blok A dan B
- Pengecatan hunian twin blok C
- Perbaikan pagar taman halaman Rusunawa
- Perbaikan paving blok trotoar
- Perbaikan tangga dan pintu darurat hunian TB A, B, C dan D
- Normalisasi saluran air
- Perbaikan gapura dan pos satpam

10) Kegiatan Pengelolaan Rusunawa

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Rusunawa 4 Twin Block yang telah diserahkan aset TB D dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2014 dengan total aset sebesar Rp9.516.283.000,- Jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan terdiri dari:

- Belanja security dan cleaning service
- Simulasi penanganan bencana alam dan kebakaran lingkup Rusunawa
- Pengadaan kontruksi pemasangan instalasi
- Perbaikan jaringan antena hunian Blok A, B, C dan D

b. **Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Strategi dalam pengelolaan bencana kebakaran adalah dengan sistim *early warning* atau peringatan dini kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi bencana. Kebijakan yang ditempuh antara lain adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana. Upaya lain yang dilakukan adalah membantu dalam perencanaan maupun bangunan-bangunan yang terkena bencana alam.

Dalam upaya mewujudkan program ini dilakukan dengan upaya-upaya yang mendukung pencegahan dan penanggulangan melalui berbagai regulasi dan juga kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hidrant dengan tujuan mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan bencana kebakaran dan terpeliharanya alat pemadam kebakaran dan hidrant pada bangunan komersil dan bangunan umum. Dari target 250 bangunan, yang berhasil diperiksa ada sebanyak 286 bangunan. Permasalahan yang terdapat pada kegiatan ini adalah kekurangan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu, diperlukan penambahan SDM yang berkualitas dan bersertifikat dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Karena kondisi eksisting, baru tiga orang pemeriksa di UPTD Pemadam Kebakaran yang telah memiliki sertifikat.
- 2) Kegiatan Pemasangan Hidrant di 6 titik, yang lokasinya di Lawang Gintung, Bondongan, Kebon Kalapa, Sempur, Sindang Rasa, dan Tanah Baru.
- 3) Kegiatan piket petugas pemadam kebakaran bertujuan mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya sehingga dapat meningkatkan kecepatan waktu penanganan kebakaran serta kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam mengantisipasi kejadian kebakaran dan bencana alam dalam waktu 24 jam.
- 4) Kegiatan pemutakhiran dan pemeliharaan sistem komunikasi pencegahan kebakaran bertujuan memenuhi kebutuhan sarana penunjang petugas di dalam penanggulangan kebakaran secara *online* dengan optimalisasi sistem komunikasi pencegahan kebakaran *online* di 7 titik yaitu Kedung Halang, Bondongan, Barangsiang, Curug Mekar, Paledang, Kedung Waringin, dan Mekar Wangi. Alat berupa sistem komunikasi pencegahan kebakaran (alarm) ini dapat terhubung langsung ke sistem sentral monitor yang ada di UPTD Pemadam Kebakaran Kota Bogor.
- 5) Kegiatan gladi anggota pemadam kebakaran, latihan relawan, kebakaran dan latihan anggota kebakaran di Ciracas dengan tujuan meningkatkan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat dan tercapainya waktu tanggap kebakaran (*respon time*). Kegiatan ini dibagi dalam 3 kegiatan yaitu:

- Pembentukan BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran) sebanyak 150 orang terdiri dari unsur perwakilan kelurahan yang ada di Kota Bogor, Linmas, LSM, Polmas, Mahasiswa, Tagana; yang dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 April 2014
 - Gladi Bangunan/ Gedung Tinggi dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 120 orang yang pesertanya merupakan anggota pemadam kebakaran dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok serta pemilik perusahaan swasta yang dilaksanakan pada 25 s/d 26 Agustus 2014,
 - Pelatihan Anggota Pemadam Kebakaran Klasifikasi Inspektur Tk.I di Ciracas sebanyak 2 orang yang pesertanya merupakan anggota Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan pada 17 Oktober s/d 07 Nopember 2014.
- 6) Pengadaan alat-alat penanggulangan bencana dan kebakaran dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional penyelamatan penanggulangan bencana dan kebakaran.
 - 7) Pelayanan pemadam kebakaran dengan tujuan kesiapsiagaan mobil pemadam kebakaran, mobil operasional dan perlengkapannya dalam rangka meningkatkan kinerja operasional pemadam kebakaran. Kegiatan ini terdiri dari dua bagian yaitu belanja pemeliharaan mesin dan karoseri mobil pemadam kebakaran dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
 - 8) Pengadaan satu mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 5000 liter air dengan tujuan untuk menambah armada yang handal agar respon time kebakaran bisa lebih baik lagi. Unit baru tersebut ditempatkan di Pos Utama Pemadam kebakaran Yasmin.
 - 9) Kegiatan tindakan penanggulangan bencana dan kebakaran dengan tujuan penanggulangan bencana dan kebakaran dapat dilaksanakan secara optimal dengan meningkatnya kecepatan waktu dalam penanganan bencana dan kebakaran, tertanganinya kejadian-kejadian kebakaran dan bencana. Untuk tahun 2014 yang telah ditangani adalah kebakaran (77 kejadian), banjir (2 kejadian), longsor (38 kejadian), pohon tumbang (50 kejadian) dan orang hanyut/ bunuh diri (3 kejadian).

3. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan urusan wajib yang ditangani Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010 – 2014, bahwa urusan perhubungan dilaksanakan dalam upaya mendukung Misi-2, yaitu mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas, yang bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, dengan sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas dan terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu.

Pemerintah Kota Bogor telah merumuskan arah kebijakan Bidang Transportasi dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang, karakteristik sistem jaringan jalan dan kondisi fisik jalan yang ada. Jaringan transportasi kota Bogor saat ini cenderung berpola radial konsentrik dengan berpusat pada pusat kota. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kepadatan lalu lintas di beberapa titik-titik terutama pada jam-jam sibuk. Tingginya delay faktor yang mengurangi kapasitas jalan, besarnya hambatan sampung pada ruas-ruas

jalan tertentu, terbatasnya kapasitas jalan dan simpang serta kondisi kemantapan jalan yang belum optimal, merupakan gambaran kondisi jaringan jalan di beberapa ruas jalan di Kota Bogor. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan,

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan dan Tersedianya sarana prasarana perhubungan, dengan indikasi kegiatan, antara lain;

- 1) Kegiatan Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang di Kota Bogor
Kegiatan ini menghasilkan data kinerja jaringan jalan untuk 150 ruas jalan dan 54 simpang di Kota Bogor, sebagai data dan informasi dalam penanganan kawasan rawan kemacetan dan sebagai indikator pencapaian kegiatan serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan perhubungan di Kota Bogor
- 2) Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Kota dan Perkotaan
Kegiatan ini menampilkan data kinerja pelayanan angkutan umum di Kota Bogor dilayani oleh 23 Trayek Angkutan Kota (AK) dengan rekapitulasi jumlah armada sebanyak 3.412 unit dan 10 Trayek Angkutan Perkotaan (AKDP) dengan realisasi jumlah armada sebanyak 4.426 unit serta 3 (tiga) koridor trayek pelayanan Angkutan Massal Trans Pakuan dengan jumlah armada sebanyak 30 unit.
Sampai dengan tahun 2014, jaringan pelayanan angkutan umum dengan panjang lintasan trayek telah mencapai 328.560 Km atau mencakup 45,67 % apabila dibandingkan dengan panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor (719.385 Km).
- 3) Kajian Re-routing Angkutan Kota
Kajian re-routing angkutan akan dijadikan dasar dalam penataan jaringan pelayanan angkutan umum dan pengembangan jaringan pelayanan di wilayah Kota Bogor, berkaiatn dengan kebijakan pengembangan sistem angkutan massal – Trans Pakuan (sebanyak 7 Koridor sebagai trayek utama) dan re-routing angkutan kota (saat ini) sebagai angkutan pengumpan (trayek cabang).
Dari hasil re-routing 23 trayek angkutan kota sebanyak 3.412 kendaraan (saat ini) menjadi 28 trayek angkutan kota sebanyak 2.586 kendaraan, yang mana saat ini terjadi kelebihan kendaraan dan diperlukan reduksi/ pengurangan kendaraan angkutan kota sebanyak 826 kendaraan.
- 4) Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek
Berdasarkan evaluasi khususnya operasional becak, dari 38 lokasi pangkalan becak dengan jumlah 1.725 becak (berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Becak di Kota Bogor) saat ini tinggal 1.286 becak (telah berkurang sebanyak 439 becak). Sebagai upaya pengendalian dan penataan operasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap lokasi pangkalan (menjadi 36 lokasi termasuk lokasi kawasan permukiman), peningkatan penertiban operasional becak di ruas jalan yang dilarang untuk operasional becak, dan secara bertahap direncanakan reduksi/penghapusan becak (pada tahun anggaran 2015 sebanyak 325 becak).
- 5) Road Safety Audit (RSA) Lokasi Black Spot Area
Road Safety Audit (RSA) merupakan Audit Keselamatan Jalan (AKJ) pada

tahap operasional jalan khususnya pada ruas-ruas jalan di Kota Bogor yang berpotensi rawan kecelakaan (*Black Spot Area*), yang antara lain dilakukan pada ruas; Jl. Raya Tajur, Jl. KH. Sholeh Iskandar, Jl. Raya Semplak, Jl. Raya Bogor, Jl. Raya Pajajaran, Jl. Dr. Sumeru, Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Jl. Jenderal Sudirman). Dari AKJ direkomendasikan penanganan lokasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, lebih menjamin keselamatan pengguna jalan dan biaya kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin

- 6) Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Daerah Rawan Kemacetan
Dalam pelaksanaannya mengacu pada hasil evaluasi kinerja jaringan jalan dan simpang, dengan prioritas merekomendasikan skenario penanganan lalu lintas kawasan rawan kemacetan pada simpang BTM, simpang Pasar Bogor dan simpang Pasar Sukasari
- 7) Penilaian Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)
Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dalam rangka pembinaan dan mendorong penataan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan urusan perhubungan di daerah. Dengan ditetapkannya Kota Bogor menjadi salah satu kota percontohan penataan transportasi perkotaan (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.113 Tahun 2009), Pemerintah Kota Bogor berkomitmen dalam program penataan transportasinya, dan secara berkesinambungan berpartisipasi aktif dalam penilaian WTN, dengan pencapaian pada tahun 2014 berupa Penghargaan Presiden dalam bentuk Piala WTN Kategori Angkutan.
- 8) Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Telah diformalkan berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.45-130 Tahun 2014 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 9) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perparkiran dan Kajian Potensi On Street Parking
- 10) Kegiatan Sosialisasi Sadar Tertib Berlalu Lintas (DARTIBLANTAS)
Sebagai upaya peningkatan pemahaman penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan peningkatan kesadaran untuk menciptakan ketertiban dan kedisiplinan di jalan, selama tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan sosialisasi sadar tertib berlalu lintas kepada;
 - Pemilik dan pengemudi angkutan umum sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta 125 orang (500 laki-laki)
 - Kepada pelajar sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah peserta 125 orang (182 perempuan dan 443 laki-laki)
 - Kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah peserta 125 orang (70 perempuan dan 180 laki-laki)
 - Pembinaan dan pemilihan pengemudi angkutan kota teladan sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta 100 Orang (100 Laki-laki)
- 11) Kegiatan Public Campaign Fasilitas Pejalan Kaki
Sebagai bagian peran serta masyarakat, bersama Koalisi Pejalan Kaki Kota Bogor (KPK-B) secara berkesinambungan dilakukan Public Campaign sebagai upaya mengedukasi masyarakat mengenai fasilitas pejalan kaki, dimana pada tahun 2014 berkaitan optimalisasi fungsi underpass pejalan kaki di Jl. Raya Pajajaran sebagai akses pejalan kaki/pengunjung Kebun Raya Bogor.
- 12) Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)

Penataan dan pembangunan fasilitas parkir, berupa pengecatan marka parkir untuk pengendalian dan efisiensi penggunaan ruang jalan, serta pemasangan rambu tarif parkir sebagai dasar pengenaan retribusi yang lebih transparan, pada ruas Jl. Pengadilan, Jl. Suryakencana, Jl. Mayor Oking, Jl. MA. Salmun, Jl. Otto Iskandardinata dan Jl. Siliwangi.

- 13) **Pembangunan dan Pemeliharaan Pemisah Lalu Lintas (Median Jalan)**
Pembangunan dan pemeliharaan median jalan dan pemagaran sebagai pemisah jalur lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas pada ruas Jl. Kapten Muslihat (kawasan stasiun KA), Jl. Raya Pajajaran (underpass), Jl. KS. Tubun (Simpang Talang dan Simping Pomad), Jl. KH. Sholeh Iskandar (Bogor Country, Simping Yasmin), Jl. Otista (Pasar Bogor);
- 14) **Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Henti (Shelter) Angkutan Umum**
Pembangunan sebagai fasilitas pengguna jasa angkutan umum untuk menunggu naik dan turun penumpang, meliputi pembangunan shelter penunjang angkutan kota di 3 lokasi yaitu di Jl. Kapten Muslihat (DPRD, Budi Mulya, Paledang) dan rehabilitasi shelter penunjang angkutan massal Trans Pakuan di 6 lokasi; Jl. Pajajaran (depan VIP, simpang Bangbarung, Warung Jambu), Jl. KH. Sholeh Iskandar (Kampus LIA, Bukit Cimanggu City).
- 15) **Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan/ Fasilitas Lalu Lintas**
Pada kegiatan ini dilaksanakan pembangunan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan dalam rangka meningkatkan dan mendukung Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bogo
- 16) **Penerapan *Intelligent Transport System (ITS)***
Penerapan ITS (*Intelligent Transport System*) secara sederhana melalui elektronika, komputer dan telekomunikasi dengan membuat prasarana dan sarana APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) yang dikembangkan dalam ATCS (*Area Traffic Control System*) di 4 simpang, bertujuan untuk menghasilkan penghematan waktu perjalanan pada jaringan jalan melalui penerapan Waktu Hijau antar simpang secara terkoordinasi, meningkatkan keselamatan perjalanan, efisiensi dan keamanan dalam berkendara. Pengembangan koneksi CCTV (*Closed Circuit Television*) di 20 titik ruas jalan untuk memonitor situasi dan kondisi arus lalu lintas dalam rangka pengendalian di lapangan.
Pada tahun anggaran 2014 dilakukan rekondisi pelican crossing 6 lokasi, pembangunan APILL 3 lokasi (Simpang Aspol, Simping Gunung Batu, Simping Paledang), peningkatan kualitas jaringan dan/ rekondisi jaringan kabel dengan pemasangan kabel fiber optic (FO), pengadaan/pemasangan CCTV 3 lokasi (Under Pass IPB, simpang Paledang, simpang Ciheuleut) dan relokasi control room dari Balaikota Bogor ke kantor DLLAJ Kota Bogor.
- 17) **Pengembangan Kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)**
Pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas sebagai fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dikembangkan sebagai fasilitas peningkatan keselamatan pada kawasan sekolah pada 2 lokasi (SDN Kertamaya Bogor Selatan dan SDN Kedung Halang-1).

b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas,

Indikasi kegiatan; Manajemen dan rekayasa lalu lintas di zona kemacetan, Penyediaan dan pemeliharaan sarana pengaman lalu lintas,

Penetapan zona selamat sekolah, Pengamanan lalu lintas pada hari besar.

- 1) Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Pengendalian Operasional (DALOPS) Ketertiban Lalu Lintas, antara lain :
 - Melakukan penempatan petugas secara rutin di 11 titik lokasi rawan macet.
 - Penertiban secara rutin adanya aktifitas parkir ganda di Jalan Suryakencana, Jalan Siliwangi, Jalan Ir.H. Djuanda melalui penempatan petugas dan penderekan.
 - Penertiban di terminal dan di jalan untuk pemeriksaan secara rutin terhadap kelengkapan administrasi dan teknis laik jalan kendaraan Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) serta Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), baik dalam kegiatan Operasi terpadu dengan instansi terkait maupun penyelenggaraan angkutan lebaran 2014.
 - Pengendalian dan pengawasan lalu lintas secara mobile untuk melancarkan arus lalu lintas dan pengendalian adanya pelanggaran
 - Pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka keberangkatan dan kedatangan Jamaah Haji Kota Bogor.
 - Pengawasan, pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas dalam rangka pengamanan kunjungan kerja tamu VVIP negara dan Muspida Kota Bogor
 - Pemeliharaan terhadap hasil operasi penertiban angkutan tidak bermotor (becak) yang beroperasi di Kota Bogor berupa penindakan kepada becak yang mangkal diluar lokasi yang telah ditetapkan, melawan arah arus lalu lintas dan merupakan upaya penjarangan terhadap becak yang tidak memiliki perijinan.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran; meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum, meningkatkan kedisiplinan pengemudi, dengan indikasi kegiatan;
 - 1) Kegiatan Pengoperasian Angkutan Umum Melalui Penerapan Sistem Shift Angkutan
Pelaksanaan penataan angkutan umum dengan menerapkan operasional sistem shift merupakan kegiatan sejak tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dan pengusaha, menciptakan keseimbangan antara jumlah penumpang dengan kendaraan angkutan umum yang beroperasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum. Adapun realisasi penerapan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 16 trayek. Realisasi pengurangan jumlah kendaraan angkutan kota dan angkutan perkotaan AKDP sebanyak 16 trayek yang telah melaksanakan operasional system shift sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.153 kendaraan (15,3 %) tidak operasional per hari.
 - 2) Kegiatan Pemilihan Pengemudi Angkutan Kota Teladan
Sebagai salah satu pembinaan kepada para pengemudi angkutan umum, secara berkala dilakukan kegiatan Pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan dan pada tahun 2014 diikuti sebanyak 100 orang
 - 3) Kegiatan Operasi Penertiban Terpadu dengan Instansi Terkait
Pada kegiatan ini dilaksanakan Operasi Terpadu dengan melibatkan aparat instansi terkait terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan

umum di jalan maupun di terminal dan operasi penertiban becak dengan hasil sebagai berikut :

- Pelimpahan berkas bukti pelanggaran (Tilang) Angkutan Umum ke Pengadilan sebanyak 30 berkas.
- Peringatan operasional Becak sebanyak 51 berkas.

d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sasaran program ini adalah meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor, dengan indikasi kegiatan berupa :

- 1) Kegiatan Pelayanan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Sebagai jaminan keselamatan laik teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang sebagai kendaraan wajib uji, dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Penanganan urusan Pekerjaan Umum ditangani oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor dan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman. Urusan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi dan program antara lain sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase

Hasil dari kegiatan-kegiatan pada program ini secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tatget	Realisasi
1	Perencanaan Teknis Kebinamargaan		
	Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Jalan	1 set	1 Set Dokumen
	FS Simpang tdk sebidang perlintasan KA Jl. Kebon Pedes	1 set	1 Set Dokumen
	FS tdk sebidang perlintasan KA Jl. RE. Martadinata	1 set	1 Set Dokumen
	FS tdk sebidang perlintasan KA Jl. MA Salmun	1 set	1 Set Dokumen
	FS tdk sebidang perlintasan KA Jl. Tembus Ciheuleut-Graha Grande	1 set	1 Set Dokumen
	FS Jalan tembus Situ Gede - Dramaga	1 set	1 Set Dokumen
	FS Jln tembus Jl. Soleh Iskandar M. Yunus - Cilebut	1 set	1 Set Dokumen
	Review DED pemb. Jl. R3 Section 3	1 set	1 Set Dokumen
	Review DED pemb. Sarana & prasarana Jl. R3	1 set	1 Set Dokumen
	FS ruang milik jalan Jl. Jalak Harupat	1 set	1 Set Dokumen
	FS jembatan layang dr Batu Tulis ke Pamoyanan	1 set	1 Set Dokumen
	FS pelebaran Jalan Johar	1 set	1 Set Dokumen
	FS pelebaran Jl. Kayu Manis - Kencana	1 set	1 Set Dokumen
	FS pelebaran geometrik Simpang Katulampa	1 set	1 Set Dokumen
	FS penataan geometrik sp. Jl. Letjen Ibrahim Adjie-Bhayangkara-SBJ	1 set	1 Set Dokumen

	FS pelebaran Jl. SBJ		
	FS pelebaran Jl. Akses dr Jl. Raya Sukabumi-terminal Agribisnis	1 set	1 Set Dokumen
	DED penataan kawasan heritage Batu Tulis		1 set
	DED pedestrian Jl. Pajajaran depan Kebun Raya		1 set
	DED pelebaran Jln dr Offram Tanah Baru menuju Pandu Raya	1 set	1 Set Dokumen
	Pematokan ROW Jl. R3 yg sudah dibebaskan		1 set
	Pengadaan patok rumija		
	DED Jalan KS. Tubun		
	DED Jalan tembus Menteng Asri - Tentara Pelajar		1 set
	DED pembangunan jalan tembus stoplate Sukaesmi-Jl. Raya	1 set	1 Set Dokumen
2	Pembebasan lahan untuk jalan R3		
	Ruas Jalan R3 Section 2	110.000,00	68.400,00
3	Pembebasan lahan untuk jalan		
	Pembangunan jalan akses stasiun sukaesmi	9.775,00	9.775,00
4	Pembangunan jalan R3 section II	1.250,00	1.250,00
5	Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar – Sukaesmi	575,00	250,00

Pada tahun 2014, realisasi kegiatan pembangunan jaringan jalan baru masih jauh dari target yang diharapkan, dari 25,3 km panjang ruas jalan baru yang harus dibangun sesuai amanah RPJMD 2010 – 2014, baru tercapai sekitar $\pm 3,5$ km. Ruas jalan tersebut diantaranya untuk pembangunan beberapa ruas jalan, diantaranya ruas jalan R-3 seksi I dan II dan sebagian ruas jalan tembus KH. Soleh Iskandar Sukaesmi. Sisanya, hingga saat ini masih terus dalam proses pengadaan/ pembebasan lahan sekitar $\pm 18,35$ km yang diantaranya adalah kelanjutan pembebasan R3 $\pm 1,3$ km, Inner Ring Road Selatan $\pm 12,5$ km, lanjutan jalan tembus STA Sukaesmi $\pm 0,7$ km dan frontage toll R-2 $\pm 3,85$ km. Hal ini dikarenakan proses pembangunan ruas jalan tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar serta waktu yang tidak sedikit dari mulai tahapan perencanaan di mana berbagai persyaratan seperti dokumen rencana, dokumen lingkungan dan dokumen-dokumen terkait aspek pembebasan lahan harus dipenuhi.

b. Program Peningkatan jalan, jembatan dan drainase

Hasil dari kegiatan-kegiatan pada program ini secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tatget	Realisasi
1	PEMBANGUNAN JALAN, TROTOAR, JEMBATAN DAN DRAINASE WILAYAH I		8.123,00
	Pembangunan Trotoar dan Saluran Jl. Pajajaran		1.200
	Pembangunan Trotoar Adnawijaya (Lanjutan)		120
	Pengaspalan Jl. Lintas Wilayah dan		700

	Pembuatan Drainase Jl. RW 1 dan 2 Kel. Kayu Manis		
	Pengaspalan Jl. Lintas Wilayah RW 1,2,3,5,7,8 dan 14 Kel Mekar Wangi		1.500
	Pengaspalan Jl. Lintas Wilayah RW 6 dan 7 Kel. Kedung Waringin		200
	Perbaiki Jalan Lingkungan RW 05 Kel. Cibadak		500
	Pembangunan Drainase RW 08 Kel. Cibuluh		200
	Pembangunan Jembatan Raden Koyong Kel. Tanah Baru		14
	Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar - Sukaresmi		1.500
	Perbaiki Trotoar Jl. Pandawa Kec. Bogor Utara		1.000
	Pembangunan Jalan Guru Muchtar Kel. Cimahpar		500
	Pembangunan Pelebaran Jembatan Raden Kanan		14
	Pembangunan Drainase Jl. Tumenggung Wiradiredja (Lanjutan)		500
	Pembangunan Drainase RW 10 Kel. Tanah Baru		100
	Pembangunan Pengamanan Jalan Ashogiri		75
2	PENINGKATAN JALAN, TROTOAR, JEMBATAN DAN DRAINASE WILAYAH I		2.725,00
	Peningkatan Ruas Jalan Pool Bina Marga Kel. Kayu Manis (Terkait Relokasi Kantor Pemerintahan)		1.500
	Peningkatan Jalan Tembus Cimanggu Permai - Barata		300
	Perbaiki Drainase Jalan Cimanggu Permai		200
	Peningkatan Trotoar Jalan Adnawijaya		300
	Pengaspalan Jalan Lingkungan Perumahan Tasmania Kel. Tanah Baru		100
	Pengaspalan Jalan Hateup RW 07 Kel. Bantarjati		75
	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01/03 Kel. Cibuluh		100
	Pembuatan Jalan Lingkungan di Jl. Calincing Raya Kel. Tegal Gundil		150
3	PEMBANGUNAN JALAN, TROTOAR, JEMBATAN DAN DRAINASE WILAYAH II		3.073,00
	Pengaspalan Jalan RW.7,13 dan 14 Kel. Baranangsiang		975
	Pengaspalan Jalan RW. 12 Kel. Katulampa		422
	Pengaspalan Jalan RW.10 Kel. Empang		274
	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Kertamaya		170
	Pelebaran Jalan RW.04 Kel.Sindang Rasa		180
	Pembangunan Drainase Jl Utama Cibeurem RW.08 - 05 Kel. Mulyaharja		320
	Pembangunan Jalan Km Legok Muncang RW.15 Kel Cipaku		162
	Pengaspalan Jalan RW.01 Kel Harjasari		380
	Pengaspalan Jalan RT.03 RW.06 Kel. Muarasari		190
4	PENINGKATAN JALAN, TROTOAR,		3.903,50

	JEMBATAN DAN DRAINASE WILAYAH II		
	Perbaikan Drainase Jalan Bangka Kel. Baranangsiang		437
	Perbaikan Drainase Jalan Babakan Asem Kel. Baranangsiang		185,0
	Peningkatan Jalan dan Saluran Jalan Kapten Yusup		752
	Peningkatan Jalan Raya Cipaku		2.100
	Pengaspalan Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Mulyaharja		329
	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT.04 RW.03 Kel. Harjasari		77,5
	Peningkatan Drainase RT.03 RW.05 Sukasari		23
5	PEMBANGUNAN JALAN, TROTOAR, JEMBATAN DAN DRAINASE WILAYAH III		2.345,00
	Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan Lodaya 1 dan 2		1.100
	Pembangunan Saluran Drainase Jln. Aria Suryalaga		150
	Pembangunan Saluran Drainase Curug Mekar		120
	Pembangunan Saluran Drainase Bubulak Sindang Barang Jero (Lanjutan)		220
	Pembangunan Trotoar dan Drainase Samping Pusdikzi		200
	Pembangunan Jalan Bukit Tunggul		135
	Pembangunan Trotoar dan saluran Air Kel. Menteng Kec. Bogor Barat		100
	Pembangunan Drainase RW. 11 Gudang		50
	Pengaspalan RW. 06 Kebon Kalapa		100
	Pengaspalan Jalan Hegarmanah IV RT.1 RW. 8 KEL. Gunung Batu		100
	Pembangunan Saluran Buis Beton + Decker RT 1 RW 07 KEL. Paledang Bogor Tengah		70
6	PENINGKATAN JALAN, TROTOAR, JEMBATAN DAN DRAINASE WILAYAH III		1.600,00
	Perbaikan Jalan dan Pengaspalan Jalan Gunung Gede RW 03, Komplek BPT RW 06, Babakan Sari RW 05 dan Babakan RW 07 Kel Babakan		700
	Perbaikan Drainase Tegalega (Lanjutan)		250
	Peningkatan Drainase Jln. Kapt Yusuf Kel. Pasir Jaya (lanjutan)		250
	Peningkatan Jalan Curug Mekar		200
	Peningkatan Jalan Tegalega		200
7	PENINGKATAN JALAN RAYA PEMDA – BATAS KOTA (LANJUTAN)		1.500,00

Pada tahun 2014, pembebasan lahan untuk peningkatan jalan berupa peningkatan kapasitas simpang maupun pelebaran jalan tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan penganggaran kebutuhan pembebasan lahan memerlukan biaya yang cukup besar serta potensi masyarakat terdampak umumnya lebih banyak. Meskipun demikian secara keseluruhan program peningkatan jalan drainase dan jembatan mencapai ±63,257 km atau 92,48% dari target akhir RPJMD sepanjang 68,4 km.

C. Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pada program ini disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tatget	Realisasi
1	Preservasi Rutin Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 1		321,095 m2
	Wilayah 2		
	Wilayah 3		
2	Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I		5.562,92 m2
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda		850,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Majapahit		150,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Rambai		875,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar		359,58
	Pemeliharaan Berkala Jalan Heulang		200,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan menuju Kantor Imigrasi		120,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kencana		185,60
	Pemeliharaan Berkala Jalan Cibuluh		196,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pamikul		182,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Heulang (lanjutan)		220,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ciparigi Indah		101,20
	Perbaikan saluran Depan Mall Jambu Dua		50,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Arzimar 1		168,60
	Pemeliharaan Berkala Jalan Tanah Baru		85,80
	Pemeliharaan Berkala Jalan R.Kan'an		217,00
	Perbaikan Jalan Julang 2		177,40
	Perbaikan Drainase Jalan Merak		183,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Putar		180,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kesehatan		189,17
	Pemeliharaan Berkala Jalan Raden Hanafiah		162,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pacilong		197,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Gor Pemuda		225,00
	Pengasapalan Jalan RT.01 Rw.07 depan Masjid Ar Rahman		40,00
	Pengasapalan Jalan Lingkungan Jl.Tuna-Kakap-Marlin-Nila Rt.04 Rw.13 Kel.Mekarwangi		248,57
3	Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II		2.854,09
	Pem. Berkala Jalan Baranangsiang Indah V		351,00
	Pem. Berkala Jalan Cipinang Gading		230,00
	Pem. Berkala Jalan Durian Raya		140,00
	Pem. Berkala Jalan Sambu		161,00
	Pem. Berkala Jalan U Tum Jalan Padi dan Jl.Adnawijaya		21,33
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pabuaran		106,88
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukasari 3		165,83
	Pem. Berkala Jalan Cipinang Gading (lanjutan)		198,40
	Pemeliharaan Berkala Jalan Lolongok		192,40

	Perbaikan Jalan Binamarga		64,33
	Perbaikan Jalan Gunung Gadung		36,00
	Perbaikan Jalan Rancamaya-Dekeng		250,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Cibeureum		135,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Riau		140,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Loader		116,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Bendung Katulampa		120,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Bitung		164,20
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sadane		196,00
	Pengaspalan Jalan Perumnas Bantar Kemang Jl.Durian Raya Rt.04 Rw. 05 Kel.Baranangsiang		65,71
4	Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III		2.393 m2
	Pemeliharaan Berkala Jalan Cifor		737
	Pemeliharaan Berkala Jalan SBJ (lanjutan)		249
	Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran		196
	Pemeliharaan Berkala Jalan RE.Martadinata		204
	Pemeliharaan Berkala Jalan Semplak		244
	Pemeliharaan Berkala Jalan Cimanggu Pesantren		148
	Pemeliharaan Berkala Jalan Bogor Baru		171
	Pemeliharaan Berkala Jalan Rumah Sakit 2		2.393
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ciwaringin		189
	Pemeliharaan Berkala Jalan Balumbang Jaya		155
	Pemeliharaan Berkala Jalan MA.Salmun		234
	Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang		57
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sudirman		153
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Mulya		120
	Pemeliharaan Berkala Jalan Cimanggu - Yasmin		49
	Pemeliharaan Berkala Jalan Merdeka		74
	Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Oking		85
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sela Kopi		187,6
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pagentongan		72
	Pemeliharaan Berkala Jalan Suryakencana		260
	Pemeliharaan Berkala Jalan Cumpok		178
	Pemeliharaan Berkala Jalan Polisi		144,2
	Pemeliharaan Berkala Jalan Rw.13 Kel.Bubulak		190,25
	Pemeliharaan Berkala Jalan Situ Gede		180,4
	Pemeliharaan Berkala Jalan Sangga Buana		142,4
	Pemeliharaan Berkala Jalan Tangkuban Perahu		111
	Pemeliharaan Berkala Jalan Haur Jaya		176,8
	Pengaspalan Jalan Ciwaringin Rt.03 Rw.08 Kel.Ciwaringin		155
	Perbaikan Jalan Malabar Kel.Babakan		161
	Perbaikan Drainase Jalan Merdeka		102
	Perbaikan Drainase Jalan Gunung Gede		174,6

Untuk mendukung dan menunjang sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas; kegiatan preservasi rutin dilaksanakan dan terbagi dalam tiga wilayah, yaitu wilayah I meliputi Kecamatan

Bogor Utara dan Tanah Sareal, wilayah II meliputi Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor selatan, serta wilayah III meliputi Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Barat.

Dalam program preservasi jalan/pemeliharaan jalan target yang ditetapkan adalah 635 km atau diharapkan seluruh ruas jalan yang ada seluruhnya ditargetkan berkondisi baik. Namun demikian, hingga akhir tahun 2014 baru tercapai 55,37% atau lebih dari setengahnya dari target. Dibutuhkan SDM yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pencapaian target tersebut.

d. Program Pembangunan sistem informasi/data base Jalan, Jembatan

Di tahun anggaran 2014, kegiatan-kegiatan pada program ini tidak lagi dianggarkan karena sampai akhir tahun anggaran 2012, indikator kinerja leger jalan telah mencapai 63,31% dari total target panjang jalan 635 km atau telah melampaui target hingga akhir tahun RPJMD yaitu 60%. Sementara untuk sisanya kondisi lapangan belum siap untuk di lakukan proses leger jalan atau apabila dilakukan menjadi kurang efektif.

e. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatanpada program ini secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tatget	Realisasi
1	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasional Alat Berat	1 Paket	1 Paket
2	Pengadaan Peralatan Penunjang Revitalisasi Sarana SDA Banprov DKI 2014	1 Paket	1 Paket
3	Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan	30 Paket	20 Paket

Meskipun penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan mencapai 94,45% namun untuk pencapaian optimal pelayanan masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana sehingga secara kualitatif diperkirakan masih baru mencapai 65%.

f. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatanpada program ini secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tatget	Realisasi
1	Pelaksanaan tanah Untuk Kolam Retensi	2,43908 ha	1,0285 ha
2	Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah I	3 situ	3 situ
	- Terpeliharanya situ Gede		
	- Terpeliharanya situ Anggalena		

	- Terpeliharanya situ Panjang		
3	Pembangunan TPT Penunjang Kolam Retensi Ciluar	646 m	646 m

g. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tatget	Realisasi
1	Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah I	1.871,40	1.871,40
	Pembangunan TPT Rangka Mekar	33	33
	Pembangunan TPT Saluran Irigasi RW. 07 dan 01 Kel. Pamoyanan	73,1	73,1
	Pembangunan TPT Saluran Irigasi di Jalan Pabuaran Pamoyanan	43	43
	Pembangunan TPT Saluran Irigasi Mulyaharja	165	165
	Pembangunan TPT Saluran Cibanon Katulampa	116	116
	Pembangunan TPT Saluran Irigasi RW.09 Kel. Situgede	333	333
	Pembangunan TPT Sungai di RW 01 Situ Gede	49,7	49,7
	Pembangunan TPT Kampung Jawa RW 5 Situ Gede	99	99
	Pembangunan TPT Saluran di Kelurahan Loji	59,6	59,6
	Pembangunan TPT Saluran Irigasi Cibenda RW 5 Bubulak	111	111
	Pembangunan TPT Sungai Ciparigi RW 3 Kedung Halang	25	25
	Pembangunan TPT Sungai Cibuluh RW 9 Kedung Halang	23	23
	Pembangunan TPT Saluran Cibagolo RW 1 Kelurahan Cibuluh	30	30
	Pembangunan TPT RW 2 Kelurahan Ciparigi	169	169
	Pembangunan TPT Saluran RW 6 Bantarjati	28	28
	Pembangunan TPT Saluran Pembuang RW 12 Bantarjati	122	122
	Pembangunan TPT Saluran Cikerti	67,5	67,5
	Pembangunan TPT Sungai RW 2 Cimahpar	53	53
	Pembangunan TPT Sungai Cilimus Taman Kenari	20	20
	Pembangunan TPT Sungai Cimahpar RW 3 Cimahpar	171	171
	Pembangunan TPT Sungai RW 8 Cimahpar	22	22
	Pembangunan TPT Sungai RW 16 Cimahpar	33,5	33,5
	Pembangunan TPT Saluran Cijabar	25	25
2	Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah I	389,30	389,30
	Pembangunan TPT Sungai Cikaret	88,8	88,8
	Pembangunan TPT di RW 5 Kelurahan Cimahpar	33	33
	Normalisasi Kali Di Wilayah RW.10 Kelurahan Tanah Baru	21,5	21,5
	Normalisasi Saluran Irigasi Ciranjang di Kelurahan Pamoyanan	128	128

	Normalisasi Sungai Ciluar Bogor Utara	38	38
	Normalisasi Sungai Ciheuleut Bogor Utara	80	80
3	Pembangunan/Peningkatan Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah II	2.365,42	2.365,42
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 5 Kel. Sindangsari	126,35	126,35
	Pembangunan/Perbaikan saluran air di RW 05 Kel. Sindangsari	193,6	193,6
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 5 Kel. Baranangsiang	159,2	159,2
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 5 Kel. Sukasari	18,5	18,5
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 11 Kel. Sindangrasa	121,8	121,8
	Pembangunan/Perbaikan Turap di RW 4 Kel. Cilendek Barat	18,5	18,5
	Pembangunan/Perbaikan Turap di RW 8 Kel. Ciwaringin	29	29
	Perbaikan/Perbaikan saluran air Kel. Pabaton	25	25
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 2 dan 10 Kel. Rancamaya	111,2	111,2
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 2 Kel. Kertamaya	70	70
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 2 Kel. Bojongkerta	118,5	118,5
	Pembangunan/Perbaikan TPT saluran hilir pelimpah Kel. Bojongkerta	30	30
	Pembangunan/Perbaikan Turap di RW 1 Kel. Bondongan	25	25
	Pembangunan/Perbaikan Turap di RW 19 Kel. Bondongan	44,05	44,05
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 8 Kel. Batutulis	19,25	19,25
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 4 Kel. Kedung Waringin s/d RW 5 Kel. Cibadak	82	82
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 3 Kel. Kedung Waringin	33,5	33,5
	Pembangunan/Perbaikan TPT di RW 12 Pondok Rumput Kel. Kebon Pedes	75	75
	Pembangunan/Perbaikan TPT Cipakancilan RW 4 Kel. Kedung Badak	70	70
	Pembangunan/Perbaikan Kali Cina RW.6 Kel. Kedung Waringin	166	166
	Pembangunan/Perbaikan TPT Bangunan Pelimpah Kali Kandang sapi Kel. Cibadak	132	132
	Pembangunan/Perbaikan TPT di Cidurian Kel. Sukaresmi	89,27	89,27
	Pembangunan/Perbaikan TPT Saluran Kandang sapi RW 04 Kel. Cibadak	120,6	120,6
	Pembangunan/Perbaikan TPT Cipakancilan Kel. Kebon Pedes (makam blender)	77,8	77,8
	Pembangunan/Perbaikan TPT Saluran Irigasi Kp. Sremped Kel. Cibadak	10	10

	Pembangunan/Perbaikan TPT Sungai Cisdane kel. Paledang	19,9	19,9
	Pembangunan/Perbaikan TPT Cibalok Kel. Batutulis	29,4	29,4
	Pembangunan/Perbaikan TPT Saluran Bojongpesantren Kel. Bojongkerta	227	227
	Pembangunan/Perbaikan TPT Saluran RW 4 Kel. Bojongkerta	49	49
	Pembangunan/Perbaikan TPT Saluran Hilir Mesjid Nurul Yakin Kel. Sindangsari	74	74
4	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA	1.4 73,85	1.473,85
	Pembangunan/Perbaikan TPT sungai Cibalok Rt 05/04 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal	21	21
	Pembangunan/Perbaikan TPT sungai Cipakancilan RT 1/4 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal	21	21
	Pembangunan/Perbaikan Saluran Air Ciereng Rt 3/7 Kel. Kedungjaya	61,9	61,9
	Pembangunan/perbaikan Talud Cipakancilan Rt 02-03 Rw01 Kel. Kebon Pedes Bubulak Kec. Tanah Sareal	63,2	63,2
	Pembangunan/Perbaikan Saluran Kali Ciereng RW 02, RW 03 Kelurahan Kedung Jaya	229,8	229,8
	Pembangunan/perbaikan TPT kali Cipakancilan di jl Dadali rt 3/5 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah sareal	28,75	28,75
	Pembangunan/perbaikan TPT di Kali Gede RT 03 RW2 kel Kayumanis	16,5	16,5
	Pembuatan/perbaikan saluran RT 02 RW 04 Kayumanis	111,5	111,5
	Perbaikan drainase di RT 2, RT 1 RW 6 Kel. Kedungjaya	10	10
	Pembangunan Turap kali kandang sapi di RT 01 RW 01 Kel. Cibadak	48,3	48,3
	Pembangunan Turap kali poncol di RT 02 RW 01 Kel Kayumanis Kec. Tanah Sareal Bogor	36	36
	Perbaikan /Rehab Saluran Irigasi Gang.Mesjid RT 01, RT 02 RW06 sampai RT 03 RW 08 Kel. Kedung Jaya	93,3	93,3
	Pembangunan Sodetan Kali Cibagolo RW 12 Kel. Bantarjati	51,6	51,6
	Pembangunan/perbaikan Turap Penahan Banjir RT 04 RW 01 Kel. Tegal Gundil	43,5	43,5
	Pembangunan/perbaikan TPT/Turap Kali Cibuluh Kel.Ciparigi	31,5	31,5
	Pembangunan Turap Kali Ciluar Asri RT 06 RW 09 Ciluar Kec. Bogor Utara	113,7	113,7
	Pembangunan Turap Kali Ciluar Kp. Babakan RT 02 RW 02 Ciluar Kec. Bogor Utara	26,4	26,4
	Pembangunan/Perbaikan Turap Kali Ciseupan RW 10 dan 11 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur	36,5	36,5

	Pembangunan/perbaikan TPT kali Ciomas di RT 01 RW 05 Kel. Loji	59	59
	Pembangunan/perbaikan TPT kali Ciracas di RT 05 RW 06 Kel. Curug Mekar Kec. Bogor Barat	50	50
	Pembangunan/perbaikan TPT Kali Sindang Barang RT 03 Rw 02 Kel. Sindang Barang	17,8	17,8
	Pembangunan pondasi Saluran air/Irigasi RT 03 RW 03 Kel. Curug Kec. Bogor Barat	65	65
	Pembangunan pondasi saluran irigasi RT 03 RW 02 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat	51,3	51,3
	Pembangunan pondasi saluran air/irigasi RT 05 RW 03 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat	54	54
	Pembangunan pondasi saluran irigasi RT 02 RW 05 Kel. Marga Jaya Kec. Bogor Barat	49,5	49,5
	Pembangunan/perbaikan Pondasi saluran Irigasi RT 06 RW 09 Kel. Curug Mekar	70,3	70,3
	Pembangunan/perbaikan Turap RT 03 RW 05 Kel. Sempur	12,5	12,5
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Untuk Pengendalian Banjir	273,70	273,70
	Pembuatan TPT Saluran Di Kel. Kedung Waringin	176,7	176,7
	Pembangunan TPT Kali di Kel. Kayumanis	97	97
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Di Kecamatan Tanah Sareal	871,60	871,60
	Pembuatan/Perbaikan TPT Saluran Kukupu Kel. Cibadak	581	581
	Normalisasi Bendungan Pengendali Kel. Cibadak Rw 15	290,6	290,6
	Penanganan Pasca Bencana Tahun 2014	1.339,40	1.339,40
	Penanganan Pasca Bencana RT.05/RW.04 Kp. Salabenda Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Tanah Sareal	28,8	28,8
	Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.03 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan	6	6
	Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.02 Lokasi 1 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan	29,5	29,5
	Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.02 Lokasi 2 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan	19	19
	Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.02 Lokasi 3 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan	29	29

Penanganan Pasca Bencana RT.05/RW.01 Lokasi 4 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan	18	18
Penanganan Pasca Bencana Komplek Bogor Lestari RT.01/RW.01 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah	21,3	21,3
Penanganan Pasca Bencana Kampung Pasir RW.12 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara	16,5	16,5
Penanganan Pasca Bencana Kampung Sumur Wangi RT.03/RW.08 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Tanah Sereal	80	80
Penanganan Pasca Bencana Lokasi 1 RT.01/RW.08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	22,2	22,2
Penanganan Pasca Bencana Lokasi 2 RT.02/RW.06 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	51	51
Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.06 Kelurahan Gunungbatu Kecamatan Bogor Barat	27	27
Penanganan Pasca Bencana RT.05/RW.13 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	9	9
Penanganan Pasca Bencana RT.06/RW.07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	22	22
Penanganan Pasca Bencana RT.01/RW.03 Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara	30	30
Penanganan Pasca Bencana RT.01/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	11	11
Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.13 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	15,9	15,9
Penanganan Pasca Bencana RT.04/RW.03 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan	32	32
Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.01 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan	18	18
Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.04 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan	17	17
Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.04 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan	14,5	14,5
Penanganan Pasca Bencana RT.04/RW.01 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan	8,1	8,1
Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.06 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan	10	10
Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.16 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara	15	15
Penanganan Pasca Bencana RT.01/RW.06 Kelurahan Cikaret	15	15

	Kecamatan Bogor Selatan		
	Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.06 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	25,5	25,5
	Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.06 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara	149,3	149,3
	Penanganan Pasca Bencana Jalan Raya Cibereum RT.01/RW.08 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan	27	27
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 1 RT.03/RW.04 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat	34,5	34,5
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 2 RT.03/RW.04 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat	9,7	9,7
	Penanganan Pasca Bencana RT.03/RW.06 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan	37	37
	Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.06 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	22,8	22,8
	Penanganan Pasca Bencana RT.02/RW.06 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat	12	12
	Penanganan Pasca Bencana Jalan Raya Cilebut RT.01 RW.04 (Jembatan 1) Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal	25	25
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 1 di RT.02 RW.08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	25	25
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 2 di RT.02 RW.14 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	20	20
	Penanganan Pasca Bencana RT.02 RW.01 Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sareal	25	25
	Penanganan Pasca Bencana Sungai Kali Murni RT.02 RW.01 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	57,5	57,5
	Penanganan Pasca Bencana RT.04 RW.08 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal	49	49
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 1 di RT.03 RW.09 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara	33	33
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 2 di RT.03 RW.09 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara	30	30
	Penanganan Pasca Bencana RT.03 RW.02 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara	52,5	52,5
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 1 di RT.03 RW.08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	34	34
	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 2 di RT.03 RW.08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	8,5	8,5

	Penanganan Pasca Bencana Lokasi 3 di RT.03 RW.08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	19	19
	Penanganan Pasca Bencana RT.04 RW.09 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal	22	22
	Penanganan Pasca Bencana RT.06 RW.04 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal	28,3	28,3
	Penanganan Pasca Bencana Longsor di RT.01 RW.03 Kel. Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat	12	12
	Penanganan Pasca Bencana RT.03 RW.16 Kel. Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara	15	15
1	Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah I	73,00	73,00
	Perbaikan saluran / sungai	1,13	1,13
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciapus Leutik Balumbang Jaya	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cibagolo Kec Bogor Utara	4	4
	Pembersihan Saluran Irigasi Cibenda Situ Gede	2	2
	Pembersihan Saluran Irigasi Cikaret 1 Cikaret	1,5	1,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cikaret 2 Cikaret	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Cikerti Cimahpar	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cimonyet Mulyaharja	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Cipalayanan Pamoyanan	1,5	1,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciraden Tanah Baru	2	2
	Pembersihan Saluran Irigasi Cisela Jambe Pamoyanan	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Cisempur Mulyaharja	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Lembah Duhur Mulyaharja	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Leuwi Bangke Mulyaharja	2	2
	Pembersihan Saluran Irigasi Parung Banteng Katulampa	2	2
	Pembersihan Saluran Kali Bala Tanah Baru	1,5	1,5
	Pembersihan Sungai Ciheuleut Kec Bogor Utara	1,5	1,5
	Pembersihan Sungai Cilimus Cimahpar	1,7	1,7
	Pembersihan Sungai Cisindang Barang Sindang Barang	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cislak Bogor Barat	2	2
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciseseupan Kec. Bogor Timur	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Citengah Kec. Bogor Selatan	1,5	1,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cialuk Tegal Lega	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Cibanon Kec. Bogor Timur	1,5	1,5

	Pembersihan Saluran Irigasi Cibanten Bubulak	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cibudig Katulampa	1,2	1,2
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciburial Ciparigi	0,3	0,3
	Pembersihan Saluran Irigasi Cigeblug Pamoyanan	1,5	1,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Cikumpa Kec. Bogor Utara	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Cileungsir Pamoyanan	2	2
	Pembersihan Saluran Irigasi Cinangka Mulyaharja	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciputih I Marga Jaya	2	2
	Pembersihan Saluran Irigasi Cisalam Kec. Bogor Utara	0,5	0,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Coblong Mulya Harja	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Mina Mulyaharja	1	1
	Pembersihan Saluran Irigasi Parung Banteng Kiri Katulampa	0,3	0,3
	Pembersihan Saluran Irigasi Pembuang Tari Kolot Ciluar	2,5	2,5
	Pembersihan Sungai Cibeureum Kec. Bogor Selatan	2	2
	Pembersihan Sungai Cijabar Cimahpar	2,3	2,3
	Pembersihan Sungai Cikaret Pasir Jaya	1,7	1,7
	Pembersihan Sungai Cimahpar Kelurahan Cimahpar	3	3
	Pembersihan Sungai Ciparigi Kelurahan Tegal Lega	3,5	3,5
	Pembersihan Situ Anggalena	1,5	1,5
	Pembersihan Situ Gede	4	4
	Pembersihan Situ Panjang	1,5	1,5
2	Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah II	98,10	98,10
	Perbaikan saluran / sungai	0,55	0,55
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciracas Kelurahan Semplak	2,2	2,2
	Pembersihan Saluran Irigasi Cikeumeh Kelurahan Cilendek Timur	2,5	2,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Angke Kelurahan Curug	1,3	1,3
	Pembersihan Saluran Irigasi Cimiis Kelurahan Cilendek Barat	3,5	3,5
	Pembersihan Saluran Irigasi Ciereng Kelurahan Kedung Waringin	2,5	2,5
	Pembersihan saluran cipaku kelurahan cipaku	1	1
	Pembersihan saluran cipancuran kelurahan cipaku	2,5	2,5
	pembersihan saluran cimonyet kelurahan cipaku	1,5	1,5
	Pembersihan saluran irigasi cibalok kelurahan pakuan	2,1	2,1
	Pembersihan saluran irigasi leuwi bangke kelurahan kertamaya	2,6	2,6
	Pembersihan saluran irigasi ciantawis kelurahan genteng	2,5	2,5
	Pembersihan saluran irigasi ciantawis kelurahan genteng	2,5	2,5

Pembersihan saluran irigasi cipakancilan kelurahan kedung badak	1	1
Pembersihan saluran irigasi cibuluh kelurahan kedung badak dan sukaresmi	2	2
Pembersihan saluran irigasi cibalok kelurahan kebon pedes	1,5	1,5
Pembersihan saluran irigasi kandang sapi kelurahan kayu manis	3,1	3,1
Pembersihan saluran irigasi cipakancilan kelurahan kedung badak	2,5	2,5
Pembersihan saluran irigasi cibuluh kelurahan kedung badak	1	1
Pembersihan saluran irigasi pasanggrahan kelurahan sukaresmi	2,5	2,5
Pembersihan saluran irigasi ciduren kelurahan sukaremi	2,50	2,50
Pembersihan saluran irigasi cikeumeh kelurahan cibadak	2,00	2,00
Pembersihan Saluran Irigasi Cikeumeh Wetan Kelurahan Cibadak	1,2	1,2
Pembersihan Saluran Irigasi Cigede Kulon Kelurahan Cibadak	2,6	2,6
Pembersihan Saluran Irigasi Kemuning Kelurahan Kencana	2	2
Pembersihan Saluran Irigasi Kali Bulu Kelurahan Mekarwangi	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Sumur Wangi Kelurahan Kayu Manis	2,5	2,5
Pembersihan Saluran Irigasi Cigede Kulon/Ciereng Kelurahan Kayu Manis	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Kali Murni Kelurahan Kencana	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Bojongpocot Kelurahan Bojong Kerta	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Bakom Kelurahan Bojong Kerta	2	2
Pembersihan Saluran Irigasi Bojongpesantren Kelurahan Bojong Kerta	2,8	2,8
Pembersihan Saluran Irigasi Cadasngampar Kelurahan Kertamaya	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Cinyangkokot Kelurahan Genteng	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Cipaku Kelurahan Genteng	2	2
Pembersihan Saluran Irigasi Lebak Ciawi Kelurahan Bojong Kerta	2,5	2,5
Pembersihan Saluran Irigasi Kali Cina Kelurahan Kedung Waringin	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Ciereng Kelurahan Kedung Jaya	2,5	2,5
Pembersihan Saluran Irigasi Kandang Sapi Kelurahan Cibadak	2	2
Pembersihan Saluran Irigasi Cibuluh Kelurahan Kedung Badak	1,5	1,5
Pembersihan Saluran Irigasi Ciereng Kelurahan Kedung Waringin	2	2
Pembersihan Saluran Irigasi Kali Kayang Kelurahan Kayu Manis	2,5	2,5
Pembersihan Saluran Irigasi Cimanggu Kelurahan Mekarwangi	2,5	2,5
Pembersihan Saluran Irigasi Cibogor kelurahan Cibogor	1,8	1,8
Pembersihan Saluran Irigasi Kali Cina Kelurahan Kedung Waringin	2,4	2,4
Pembersihan Kali Ciracas Kelurahan Curug	2,5	2,5
Pembersihan Kali Cikeumeh Kelurahan Curug	2	2

Pembersihan Saluran Irigasi Cidepit Kelurahan Semplak, Cilendek Barat	3,5	3,5
--	-----	-----

h. Program Pengendalian Banjir

Pencapaian indikator program pengembangan dan pengelolaan konservasi danau/ situ yang menjadi bagian dari program pengendalian banjir pencapaiannya masih sangat rendah. Dari tiga target kolam retensi yang direncanakan untuk dibangun baru satu yang telah siap untuk dilaksanakan konstruksinya. Hal ini dikarenakan sebagai proses perencanaan yang dapat dirampungkan sehingga baru sebagian yang dapat dilakukan proses pembebasan lahannya. Sementara untuk indikator lainnya umumnya relatif baik dan dapat tercapai.

i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur air minum non-PDAM di Kota Bogor melalui sejumlah kegiatan seperti DAK Air Minum. Penyediaan air minum perpipaan mencapai 78,41% dan non-perpipaan baru sekitar 1%. Capaian air minum perpipaan ini dapat dicapai secara signifikan berkat penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan dan juga program sambungan rumah tangga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, untuk air minum non-perpipaan merupakan hasil kontribusi dari kegiatan DAK Air Minum yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan DAK Infrastruktur Air Minum
Alokasi DAK Infratraktur Air Minum dan pendamping dari APBD Kota Bogor sebesar Rp.2.137.500.000,- yang kegiatannya dilaksanakan di 7 lokasi. Capaian yang diraih yaitu cakupan pelayanan sebesar 1% dari total jumlah penduduk Kota Bogor atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,07%.
- 2) Kegiatan Penunjang DAK Infrastruktur Air Minum
Kegiatan ini berupa pemberian dana penunjang untuk pelaksanaan kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum sebesar Rp. 150.000.0000,- yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini.
Sedangkan untuk pengembangan kinerja air limbah telah dilakukan kegiatan DAK dan dana pendamping infrastruktur sanitasi. Ada empat lokasi Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dibiayai dari DAK yaitu 4 unit MCK++ di Kelurahan Katulampa, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cilendek Barat, dan Kelurahan Bondongan. Di Kelurahan Bondongan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena lahan untuk kegiatan DAK SLBM milik Kementerian Kehutanan dan perlu waktu yang lama untuk proses hibahnya sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan. Sebagai ganti dari lokasi tersebut telah tersedia lahan yang berlokasi di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat untuk kegiatan DAK SLBM tahun berikutnya.
Di tahun 2014, telah juga dilaksanakan penambahan 65 Sambungan Rumah di dua Sanimas yaitu di Kelurahan Sindangsari dan Kelurahan Cibadak.

j. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaspalan lahan parkir dan jalan lingkungan (TPU Situ Gede, TPU

Kayumanis, TPU Mulyaharja, TPU Blender, TPU Dreded, dan TPU Cimahpar) ;

- 2) Pembangunan pagar, dan gapura (TPU Mulyaharja)
- 3) Pembangunan gedung kantor (TPU Gununggadung)
- 4) Pembangunan pagar pembatas tanah dan tembok penahan tanah (TPU Situ Gede)

k. Program Peningkatan Utilitas Perkotaan

Tingkat capaian indikator kinerja penambahan titik PJU sebesar 189,98% atau telah memenuhi target capaian. Capaian ini tergambar dari jumlah lampu PJU di lingkungan permukiman terpasang sebanyak 2.301 titik lampu yang terbagi atas dua tipe, yaitu PJU permukiman standar sebanyak 1.527 titik lampu dan PJU permukiman tipe gang sebanyak 769 titik lampu yang keseluruhannya tersebar di berbagai lokasi jalan dan permukiman di 68 kelurahan. Selain itu, dilakukan pemasangan lampu *highmast* sebanyak lima titik lampu di berbagai taman yaitu Jalan Pajajaran Depan Masjid Raya, Taman Pulo Batu Tulis, Pulo Jalan Merdeka, Situ Anggalena, dan Air Mancur

Dalam upaya perwujudan program ini juga dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 3.492 titik lampu dan perbaikan terhadap 3.321 titik lampu PJU serta 171 titik lampu taman dan lampu hias.

l. Program Penataan dan pengaturan Bangunan Gedung

Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Sertifikat yang telah diterbitkan selama tahun 2014 sebanyak 7 sertifikat.
- 2) Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial adalah kegiatan dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan hibah dan bansos yang disampaikan oleh kelompok masyarakat mengenai administrasi dan teknis yang ditindaklanjuti dalam pembuatan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Permohonan NPHD yang telah dibuat oleh Dinas Wasbangkim sebanyak 123 NPHD dari jumlah pemohon 130.
- 3) Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor
Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor rencananya akan dilaksanakan dengan sumber dana dari Bantuan Propinsi Jawa Barat tapi anggaran dari Propinsi Jawa Barat tahun 2014 tidak teralokasikan untuk pembangunan Masjid Agung Kota Bogor.
- 4) Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintahan
Kegiatan ini sebagai tindak lanjut permohonan dari OPD yang bertujuan untuk penghapusan asset OPD dan telah dilakukan penaksiran sebanyak 110 penaksiran bangunan.
- 5) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I
Kegiatan ini bertujuan mengawasi jumlah unit bangunan per tahun di wilayah kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Utara dengan target kinerja sebanyak 215 bangunan. Realisasi pencapaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 909 bangunan sehingga melebihi target yang dicanangkan. Surat teguran yang dikeluarkan sebanyak 167 surat.

- 6) Kegiatan Lanjutan Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS Wilayah ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2013. Pada tahun anggaran 2014,
- 7) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung bertujuan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 8) Kegiatan Verifikasi dan Updating Fasos Fasum (PSU Perumahan) telah melakukan verifikasi terhadap 13 pengembang yang mengajukan permohonan serah terima verifikasi PSU dengan rincian sebagai berikut: yang sudah selesai proses serah terima adanya berita acara 5 pengembang dan sedang berjalan 6 pengembang sedangkan 2 pengembang lainnya masih proses ulang verifikasi
- 9) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Revisi Perda Bangunan Gedung adalah perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung,

m. Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang
Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan pembinaan dan pelatihan teknis terhadap pelaksana jasa konstruksi
- 2) Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi
Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan konstruksi yang dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana (team leader), kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi yaitu manager proyek/ kepala proyek. Sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Dalam pelaksanaan bangunan ini juga diawasi oleh konsultan pengawas (supervision engineer).

MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesehatan Dan Keterampilan Masyarakat

1. Urusan Pendidikan

Penanganan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 8 program, penjabaran program-program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan urusan pendidikan untuk mendukung misi 3 RPJMD Kota Bogor 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran
- 2) Pelatihan dan Workshop Standar PAUD Berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009
- 3) Revitalisasi TK Mexindo
Revitalisasi TK Meksindo sebanyak 3 ruang bermain dan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan sarana ruang belajar siswa yang memadai pada tingkat pendidikan formal

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- 1) DAK Pendidikan SD
Dilaksanakan melalui pengadaan buku kurikulum 2013 untuk siswa di tingkat SD Negeri dan Swasta sebanyak 268 sekolah SD. pengadaan alat peraga IPA sebanyak 18 SD, pengadaan alat peraga IPS sebanyak 20 SD, pengadaan alat peraga matematika sebanyak 23 SD dan rehabilitasi sekolah sebanyak 26 SD
- 2) Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD
- 3) DAK Pendidikan SMP
Pada tahun anggaran 2014, melalui dana DAK telah dilaksanakan pengadaan buku kurikulum 2013 untuk siswa di tingkat SMP Negeri dan Swasta sebanyak 111 SMP, pengadaan alat peraga IPS sebanyak 8 SMP, pengadaan alat peraga matematika sebanyak 9 SMP yaitu SMPN 6, SMPN 10, SMPN 20, SMPN 4, SMPN 14, SMPN 2, SMPN 8, SMPN 15, dan pembangunan ruang kelas baru pada 1 SMP yaitu : SMP Negeri 3, serta pembangunan perpustakaan pada SMP Negeri 16
- 4) Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SMP
Penunjang pelaksanaan DAK pendidikan SMP adalah dana yang dianggarkan sebagai biaya konsultan perencana, konsultan pengawas dan biaya honorarium tim
- 5) Pengadaan Perangkat Komputer
Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyediaan sarana computer dan printer untuk tata administrasi sekolah sebanyak 38 unit yang tersebar di 6 kecamatan dan penyediaan TIK pada SDN Polisi 5 terdiri dari 30 unit komputer, 2 printer, 1 laptop dan 1 proyektor untuk pengembangan lab komputer di sekolah tersebut
- 6) Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar SMP N Terbuka (Banprov 2014)
- 7) Pengadaan Mebeleur
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Paket A
Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A di laksanakan dalam 2 tahap, pada tahap I di laksanakan pada tanggal 19 Mei s.d 21 Mei 2014 yang di ikuti oleh 190 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 163 orang , dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 November 2014 yang di ikuti oleh 99 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 74 orang
- 9) Kegiatan Penyelenggaraan Paket B
Pelaksanaan Ujian Nasional Paket B di laksanakan dalam 2 tahap, pada tahap I di laksanakan pada tanggal 5 Mei s.d 7 Mei 2014 yang di ikuti oleh 534 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 469 orang , dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2014 yang di ikuti oleh 454 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 400 orang.
- 10) Perencanaan Pengadaan Tanah SDN Sukadamai 2
- 11) Persiapan Pengadaan Tanah SDN Sukadamai 2
- 12) Pelaksanaan Pengadaan Tanah SD Sukadamai 2
- 13) Revitalisasi Sekolah Dasar
Kegiatan ini dilaksanakan melalui revitalisasi Sekolah Dasar (SD) sebanyak 38 sekolah meliputi:
 - Pembangunan RKB untuk 4 SD sebanyak 8 ruang yaitu SDN Loji 2, SDN Batutulis 3, SDN Kedung Halang 3, SDN Bantarjati 5.
 - Revitalisasi ruang kelas kontruksi bertingkat untuk 19 SD sebanyak

50 ruang yaitu SDN Kebon Pedes 1, SDN Polisi 1, SDN Empang 4, SDN Pengadilan 5, SDN Balumbangjaya 1 dan 2, SDN Situgede 1,2,3, SDN Semplak 1, SDN Cilendek 1, SDN Kukupu 1, SDN Margajaya 2, SDN Cijahe, SDN Kencana 3, SDN Muarasari3, SDN Tegalega, SDN Pamoyanan 1, SDN Sindang rasa, SDN Kertamaya, SDN Bondongan 1 dan 2 serta SDN Sukadamai 2.

- Restorasi bangunan cagar budaya pada SDN Panaragan 1
- Rehabilitasi ruang cunuk 5 SD sebanyak 11 ruang yaitu: SDN Sindangsari 2, SDN Sukadamai 3, SDN Bangka 3, SDN Pabuaran Cilendek Timur dan SDN Genteng.
- Pengadaan tanah dan bangunan dengan lahan seluas 297 m² untuk akses dan prasarana SDN Sukadamai 2.

14) Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah SD Sukadamai 2

15) Pengembangan Kurikulum Sekolah (KTSP) 2013 untuk SD dan SMP

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pelatihan/ Workshop Kurikulum 2013 bahan ajar dan model pembelajaran untuk peserta SD sebanyak 320 orang dan peserta SMP sebanyak 200 orang,

16) Pengelolaan BOS

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menyelenggarakan sosialisasi BOS Kota, Propinsi dan APBN, tersusunnya monitoring BOS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan kebutuhan administrasi sekolah di semua jenjang. dan terpantaunya jumlah penerima BOS jenjang SD sebanyak 95,240siswa, jenjang SMP 19,278 siswa dan jenjang SMA 9,780 siswa dan SMK 5.014 siswa.

17) Diklat KKG dan Diklat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

18) Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah SD/MI/MTs/ SMA/MA/SMK

19) Revitalisasi SMP

Kegiatan dilaksanakan melalui revitalisasi SMP pada 12 sekolah, yang meliputi:

- Pembangunan RKB untuk 1 SMP yaitu SMPN 4.
- Revitalisasi ruang kelas untuk 6 SMP sebanyak 17 ruang yaitu, SMPN 8 sebanyak 5 ruang, SMPN 13 sebanyak 2 ruang, SMPN 12 sebanyak 6 ruang, SMPN 18 sebanyak 1 ruang, SMPN 19 sebanyak 3 ruang.
- Revitalisasi ruang Guru dan TU pada 2 SMP yaitu SMPN 9 dan SMPN 20 sebanyak 2 ruang.
- Restorasi bangunan cagar budaya pada 2 SMP yaitu SMPN 2 sebanyak 5 ruang dan SMPN 1 sebanyak 3 ruang.

20) Lomba Gugus Sekolah Dasar (SD)

21) Lomba Perpustakaan SD

22) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Dalam rangka percepatan WAJAR DikDas 9 tahun dan berlanjutnya pendidikan dasar bagi siswa yang berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar, maka ditetapkan tim penanganan siswa inklusif (Guru Pendamping) di sekolah penerima bantuan penyelenggara SD inklusif, yang terdiri dari 5 SD dan 1 SMP yaitu:

- SDN Perwira terdiri dari 6 orang guru pendamping.
- SDN Semeru 6 terdiri dari 6 guru pendamping.
- SDN Batu Tulis 2 terdiri dari 6 guru pendamping.
- SDN Julang terdiri dari 6 guru pendamping.

- SD Alam Bogor terdiri dari 6 uru pendamping.
- SMPN 11 terdiri dari 3 guru pendamping.

c. Program Pendidikan Menengah

- 1) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah
- 2) DAK Pendidikan SMK (Tahun 2013)
Melalui dana DAK telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi sekolah swasta sebanyak 14 SMK yaitu SMK Yatek sebanyak 2 Ruang, SMK YZA sebanyak 5 ruang, SMK PGRI 1 sebanyak 6 ruang, SMK AL Fitriyah sebanyak 2 ruang, SMK Analis Kimia Nusa Bangsa sebanyak 2 ruang, SMK Bhakti Taruna 3 sebanyak 2 ruang, SMK Bina Profesi sebanyak 2 ruang, SMK PGRI 3 sebanyak 4 ruang, SMK PUI Kota sebanyak 4 ruang, SMK Sirojul Huda 1 sebanyak 2 ruang, SMK Sirojul Huda 2 sebanyak 2 ruang, SMK TI Suryakencana Yapis sebanyak 6 ruang, SMK Windian Nugraha sebanyak 3 ruang dan SMK Harapan Siswa sebanyak 3 ruang serta pengadaan buku referensi untuk seluruh sekolah SMK se Kota Bogor yaitu sebanyak 270 paket yang diperuntukan bagi 90 Sekolah SMK.
- 3) Biaya Umum DAK SMK (Tahun 2013)
- 4) Pengembangan Robot Pencairan Obyek Antariksa (Banprov 2014)
- 5) Pengadaan Alat Pembelajaran Robotic Untuk SMP dan SMA/SMK (Banprov 2014)
- 6) Penyelenggaraan Paket C
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Ujian Nasional Paket C, dalam 2 tahap, pada tahap I di laksanakan pada tanggal 14 s.d 16 April 2014 yang di ikuti oleh 1.427 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 1.242 orang, dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Agustus 2014 yang di ikuti oleh 1184 orang dengan jumlah kelulusan sebanyak 1022 orang.
- 7) Revitalisasi SMA / SMK
Kegiatan ini dilaksanakan melalui revitalisasi SMA/SMK dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK untuk 3 Sekolah sebanyak 12 Ruang; yaitu SMAN 2, SMAN 8 dan SMKN 2.
 - Rehabilitasi Taman sebanyak untuk 5 sekolah yaitu SMKN 2, SMKN 4 , SMAN 2, SMAN 7 dan SMAN 8.
 - Rehabilitasi pintu gerbang sekolah untuk 1 sekolah yaitu SMAN 9.
 - Pembangunan kantin sekolah untuk 1 sekolah yaitu SMAN 10.
 - Pembangunan ruang Guru/TU untuk satu sekolah sebanyak 2 ruang; yaitu SMKN 2.
 - Pembangunan ruang seni untuk 1 sekolah sebanyak 1 ruang SMAN 1.
 - Rehabilitasi talud untuk 1 sekolah SMAN 10.
 - Pembangunan Talud untuk 1 sekolah SMAN 7.
 - Pemagaran dan pematangan lahan untuk 1 sekolah yaitu SMAN 2.
 - Pengadaan meubelair (meja dan kursi) sebanyak 220 buah untuk SMKN 2.
- 8) Penerimaan Siswa Didik Baru (PSB) Online
- 9) Olimpiade Sains Nasional (OSN)
- 10) EPITECH dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI
- 11) Pengembangan Sistem Informasi Sekolah dan PAS
- 12) Lomba Kompetensi Siswa SMK

- 13) Sosialisasi Pendidikan Menengah Universal (PMU)
- 14) Mentoring Penanganan Perilaku Siswa SMA SMK
- 15) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri (Banprov 2014)

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik

- 1) Pelatihan Instruktur MOS
- 2) Bintek dan Pendamping Pengelolaan dan Penyusunan RKS.
- 3) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Pelatihan SIM Operator Sekolah
- 5) Pembinaan Tutor PAUD
- 6) Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik Tutor PAUD Non Formal
- 7) Penyelenggaraan Sekolah Standard Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar (Banprov 2014)

e. Program Manajemen Layanan Pendidikan

- 1) BOS Kota SMA/SMK
BOS Kota SMA/SMK disalurkan kepada 10 SMAN dengan sasaran sebanyak 9.780 siswa dan 4 SMKN dengan sasaran sebanyak 5.014 siswa dengan besaran masing-masing untuk siswa SMAN sebesar Rp. 1.100.000/siswa/tahun dan siswa SMKN sebesar Rp. 1.127.000/siswa /tahun.
- 2) BOS Kota
BOS Kota disalurkan kepada siswa 114.518 siswa TK, SD , SMP, SMP terbuka dengan besaran sasaran:
 - TKN 1 sekolah Rp. 57.912.600/Tahun
 - SDN 229 sekolah Rp. 130.700/siswa/Tahun
 - SMPN 20 sekolah Rp. 171.000/siswa/Tahun
 - SMP Terbuka 2 sekolah Rp. 71.000/siswa/Tahun
- 3) Penyelenggaraan Lomba MIPA SD Jalur A dan B Tingkat Kota dan Provinsi
- 4) Penyelenggaraan Lomba SAINS SMP Tingkat Kota dan Provinsi
- 5) Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD/SMP/SMA Tingkat Kota dan Provinsi
- 6) Penyelenggaraan Lomba Seni dan Sastra Daerah dan Festival Seni Siswa Nasional Tingkat Kota dan Provinsi
- 7) Penyelenggaraan Pekan Kreativitas Siswa SD Tingkat Kota dan Provinsi
- 8) Penyelenggaraan Calistung SD
- 9) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
- 10) Pendampingan DBE 1, DBE 2 dan DBE 3
- 11) Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK
- 12) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Siswa SMP, SMA/SMK
- 13) Lomojari SMP Terbuka (Ketrampilan dan Akademis)
- 14) Pembuatan Profil Pendidikan dan ICT
- 15) Lomba Siswa Berprestasi Tingkat SD/SM/SMA/SMK Sederajat
- 16) Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- 17) Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik
- 18) Pengadaan Raport
- 19) Penghargaan Prestasi Siswa dan Guru SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi
- 20) Pengadaan Alat Angklung
- 21) Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SMA/SMK

f. Program Pendidikan Formal dan Informal

- 1) Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF)
- 2) Pembinaan Lembaga Kursus

2. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD) yang dijabarkan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan jumlah bahan bacaan untuk masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan Perpustakaan
- 2) Pengadaan Koleksi Buku, CD, Audio Visual Perpustakaan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koleksi pustaka seperti majalah, koran, buku pengetahuan umum, buku perundang-undangan, buku cerita, dan buku *puzzle*. Hingga tahun 2014, jumlah koleksi buku yang dimiliki berjumlah sebanyak 57.654 eksemplar dan 30.177 judul.
- 3) Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan di Kelurahan yang berfungsi dengan baik dan meningkatkan jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Hingga tahun 2014, jumlah perpustakaan di Kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat mencapai sebanyak 136 perpustakaan.
Selain itu, telah dilaksanakan sosialisasi perpustakaan pada tanggal 19 Juni 2014 bertempat di Graha Pool Kota Bogor untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan peserta dari sekolah sebanyak 120 peserta dan pembinaan pengelolaan perpustakaan kepada 68 perpustakaan kelurahan, 10 Taman Bacaan Masyarakat (TMB) dan 58 perpustakaan sekolah.
- 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam mengakses informasi dan mencari koleksi buku yang diinginkan sehingga mudah ditemukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penerbitan Katalog Induk Bersama yang merupakan hasil pengolahan dari bahan pustaka sebanyak 30.177 judul dan 57.654 eksemplar koleksi buku.

3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penanganan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga melalui Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan dan Program Pembinaan serta Pemasayarakatan Olahraga.

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini dijabarkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Peserta Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
- 2) Kegiatan Diklat dan Seleksi Paskibraka
- 3) Jambore Pemuda
- 4) Gebyar Sumpah Pemuda
- 5) Pemilihan Pemuda Pelopor

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- 1) Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
- 2) Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi/olahraga masyarakat (pekan olahraga rekreasi dan tradisional)
- 3) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
- 4) Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi/Pembibitan
- 5) Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olahraga dan Fasilitas Umum Lainnya

4. Urusan Kesehatan

Penanganan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor melalui penjabaran 15 program untuk mendukung misi 3 RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas (Banprov 2014). Kedua kegiatan ini merupakan usaha meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, khususnya dalam memberikan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit.

Adapun pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin yang dilayani di 24 Puskesmas dan pelayanan rujukan yang dilayani di 20 Rumah Sakit strata II, 5 Rumah Sakit strata III dan 1 klinik hemodialisa bagi peserta Jamkesda. Secara keseluruhan, jumlah kunjungan ke Puskesmas sebanyak 30.485 kasus dan yang dirujuk ke tingkat pelayanan selanjutnya sebanyak 10.914 kunjungan.

Disamping itu, untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas, telah terlayani sebanyak 2.128 orang yang dilayani di 6 Rumah Sakit yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RS Marzuki Mahdi, RS Salak, RS Fatmawati, RS Karya Bhakti dan RSUD Ciawi.

b. Program Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Untuk mendukung program ini dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, Pelayanan Keluarga Berencana, dan Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi, kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan siklus hidup. Upaya yang dilakukan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
- 2) Pelayanan Keluarga Berencana
Pada tahun 2014, cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan yang disebabkan adanya pencatatan ganda pada akseptor yang berganti metode kontrasepsi. Namun demikian, cakupan 76% sudah melampaui target nasional pada MDG's yaitu sebesar 66%.
- 3) Kegiatan Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan untuk menurunkan angka kematian baik ibu maupun bayi. Kegiatan meliputi pelacakan kasus kematian, audit penyebab kematian dan pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP). Adapun jumlah kejadian Ibu dan bayi meninggal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14

Data Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2013 dan 2014

No	Indikator	Thn 2013	Thn 2014
1	Jumlah Kematian Ibu	13	6
2	Jumlah Kematian Bayi	62	55

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Anak Remaja
- 2) Pelayanan Kesehatan Lansia

d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Melalui program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Obat-Obatan
- 2) Penyimpanan Obat
- 3) Pendistribusian Obat

e. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini didukung dengan kegiatan Pengendalian Obat dan Makanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari produk obat, kosmetika, obat tradisional dan pangan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan kemanfaatannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah:

- 1) Pengujian Sampel Produk Pangan, Kosmetika dan Obat Tradisional.
- 2) Sosialisasi Keamanan dan Kehalalan Produk.
- 3) Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Pangan.
- 4) Pembinaan Keamanan Pangan Terhadap Pemilik/ Penanggung Jawab Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRTP) Dalam Rangka Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- 2) Peningkatan Promosi Kesehatan
- 3) Peningkatan Penduduk Yang Terlindungi Asuransi Kesehatan

g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Selama tahun 2014, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Status Pertumbuhan Balita di Posyandu
- 2) Bulan Penimbangan Balita (BPB)
- 3) Pemberian Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi bagi Balita dan Ibu Nifas
- 4) Pemberian Fe (Tablet Tambah Darah) untuk Ibu Hamil
- 5) Kegiatan Monitoring Garam Beryodium
- 6) Lomba Balita Sehat Indonesia
- 7) Orientasi SDIDTK (Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang)
- 8) Orientasi PMBA (Pemberian Makan pada Bayi dan Anak)
- 9) Pembentukan Kelas ASI
- 10) Pengadaan Barang dan Jasa

h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, udara, air, dan tanah serta peningkatan mutu makanan. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan pada tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung program tersebut, yaitu:

- 1) Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- 2) Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU)
- 3) Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
- 4) Pengambilan Sampel Jasa Boga
- 5) Pemeriksaan Mutu DAM
- 6) Pengambilan Sampel Makanan Pedagang Makanan Jajanan

i. Program Sumberdaya Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Operasional Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM
- 2) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
- 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas
- 4) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

Kegiatan rehabilitasi gedung puskesmas pembantu yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu:

- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sindangrasa;
- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kedung waringin;
- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Cimahpar;
- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Panaragan;
- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sindangsari; dan
- Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sukamulya.

- 5) Kelanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas PONED Tegal Gundil
- 6) Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Para Medis
- 7) Pembangunan Garasi Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Selama tahun 2014, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Garasi Puskesmas Pasir Mulya;
- Pembangunan Garasi Puskesmas Mekarwangi;
- Pembangunan Garasi Puskesmas Cipaku;
- Pembangunan Halaman Parkir dan Garasi Puskesmas Bogor Utara; dan
- Perluasan dan Pembangunan Garasi Kantor Dinas Kesehatan.

- 8) Pengadaan Ambulan dan Alat Kesehatan serta Jaringannya

j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2014 untuk mendukung program standarisasi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Akreditasi dan ISO Puskesmas
- 2) Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Swasta

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- 1) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

- 1) Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
- 2) Pelayanan Kesehatan Khusus

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor

Dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Bogor telah dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan ditingkat rujukan melalui perubahan Rumah Sakit Karya Bhakti menjadi RSUD Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dan diresmikan pada tanggal 7 Agustus 2014. Penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Bogor pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- 1) Peningkatan Mutu Manajemen RSUD
- 2) Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
- 3) Pelayanan Kehumasan dan Sosialisasi RSUD
- 4) Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)

5. Urusan Sosial

Program Penanganan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor serta Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor melalui program sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

- 1) Kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
- 3) Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 4) Kegiatan Pemutakhiran Data dan Pusat Informasi Kesejahteraan Sosial
- 5) Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat
- 6) Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial
- 7) Kegiatan Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (WKSMB)
- 8) Kegiatan Penanganan Mayat Terlantar
- 9) Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia
- 10) Kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 11) Kegiatan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
- 12) Pembinaan Bagi Korban Narkotika, HIV/AIDS dan WTS

b. Program Pembinaan Anak Terlantar

- 1) Kegiatan Pembinaan Anak Terlantar dan Anak Jalanan
- 2) Kegiatan Penanganan PMKS di Rumah Singgah

c. Program Pembinaan Penyandang Cacat, Trauma dan Korban Bencana

- 1) Kegiatan Pembinaan Penyandang Cacat, Trauma dan Korban Bencana
- 2) Pembinaan Trauma dan Eks Psikotik
- 3) Pemeliharaan Loka Bina Karya Penyandang Cacat dan PMKS lainnya

d. Program Pembinaan Panti/Panti jompo

- 1) Kegiatan Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosia

e. Program Pemberdayaan lembaga Sosial

- 1) Kegiatan Pemeliharaan TMP Dreded
- 2) Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI) dan Kegiatan Keagamaan lainnya
- 4) Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan

6. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan ditangani oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan melaksanakan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengembangan Nilai Budaya. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan dalam rangka menjaga, melestarikan dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi seni budaya yang ada di Kota Bogor dengan memfasilitasi komunitas, sanggar-sanggar seni, lingkungan seni dan organisasi seni lainnya. Sedangkan Program Pengembangan Nilai Budaya adalah usaha menggali nilai-nilai seni budaya yang ada di masyarakat. Untuk menjabarkan program-program tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- 1) Kegiatan Pergelaran Kesenian
- 2) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Tradisional

b. Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan Pemberian Bantuan Hibah Peralatan Alat Musik Marawis

MISI 4 : Peningkatan Pelayanan Publik Dan Partisipasi Masyarakat

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan oleh Inspektorat, Sekretariat Dewan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan se-Kota Bogor. Urusan ini dijabarkan melalui 15 Program yaitu:

a. Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
- 2) Penyusunan Standar Pelayanan
- 3) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
- 4) Evaluasi Jabatan dan Kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah.
- 5) Pelaksanaan Survei dan Pelacakan Serta Penegasan Batas Wilayah/Daerah antar Kelurahan di Kota Bogor
- 6) Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi
- 7) Workshop Pembakuan Nama Rupabumi

b. Program Pengendalian Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Program melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Standar Biaya
- 2) Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014
- 3) Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
- 4) Penyelenggaraan e-Procurement
- 5) Pengendalian Administrasi Pembangunan
- 6) Workshop Penyusunan Dokumen Kontrak Bagi PPK
- 7) Workshop Mutu Konstruksi Bagi PPK

c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 2) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Informasi LPPD Kota Bogor Tahun 2013 serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan 2009-2013
- 3) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor
- 4) Rapat Kerja Daerah
- 5) Penyusunan Perencanaan Pelaporan dan Capaian OPD
- 6) Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor
- 7) Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
- 8) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bogor

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 2) Penyusunan dan Fasilitasi ISO 9001 : 2008
- 3) Pembinaan Terhadap OPD Pelayanan Publik
- 4) Penyusunan dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

e. Program Pembinaan Dan Penataan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan

- 1) Evaluasi Kinerja Kecamatan
- 2) Kegiatan Kajian Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 3) Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
- 4) Kegiatan Workshop Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kecamatan Dan Kelurahan Tahun 2013
- 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- 6) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Pengelolaan Rumah Tangga OPD
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Pelayanan Keprotokolan
- 5) Pengelolaan SIM DPRD
- 6) Pelayanan Kehumasan

g. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
- 2) Pengadaan Alat/Perlengkapan Kantor
- 3) Penyusunan Harga Standar
- 4) Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
- 5) Penyusunan RKBMD/RKPBMD
- 6) Piket Urdal dan Santel
- 7) Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi
- 8) Pengadaan Inventaris Kantor
- 9) Persiapan Pengadaan Rumah Jabatan
- 10) Pelaksanaan Pengadaan Rumah Jabatan
- 11) Penyerahaan Hasil Pengadaan Rumah Jabatan

h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui pelaksanaan kegiatan :

- 1) Pengembangan SDM.
- 2) Diklat Prajabatan.
- 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan III
- 4) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- 5) Diklat Fungsional dan Teknis Umum

i. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Sekretariat Korpri melalui pelaksanaan kegiatan:

- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- 2) Penataan Administrasi Kepegawaian dan LHKPN
- 3) Penerimaan CPNSD dari Pelamar umum
- 4) Penerimaan CPNSD dari Tenaga Honorer Kategori II
- 5) Kegiatan Penyaringan Mahasiswa Ikatan Dinas
- 6) Penyusunan Formasi
- 7) Sumpah Janji dan Konversi NIP, Peningkatan Status PNS dan Perpanjangan SK TKK
- 8) Penatausahaan Pegawai
- 9) Kegiatan Peningkatan Sinegritas Pegawai
- 10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
- 11) Mutasi Pegawai
- 12) Pengembangan Karier
- 13) Penyuluhan Hukum Bagi Anggota Korpri
- 14) Partisipasi PNS dalam PORPEMDA Provinsi Jawa Barat
- 15) Peringatan HUT KORPRI

j. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Keikutsertaan dalam APEKSI, Citynet dan Forum Kerjasama lainnya
- 2) Optimalisasi Kerjasama Daerah dan Luar Negeri
- 3) Optimalisasi CSR Kota Bogor

k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini memiliki peran dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA)
- 2) Pemutakhiran Data
- 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu LKPD) Tahun 2013
- 4) Pengelolaan LP2P PNS Gol.III/a ke atas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- 5) Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)
- 6) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas
- 7) Bantuan Fasilitasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota Bogor (Banprop TA.2014)

l. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 2) Penambahan Sarana JDI Hukum, Pengolahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi
- 3) Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah.
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Hukum

m. Program Penerapan Penegakan hukum dan HAM

- 1) Penunjang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia
- 2) Fasilitasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN
- 3) Penyuluhan dan Bantuan Hukum kepada Aparatur.

n. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,

Program ini bertujuan memberikan dukungan dan kemudahan kepada anggota DPRD Kota Bogor dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Program ini diharapkan membantu pencitraan yang baik bagi DPRD Kota Bogor sebagai lembaga legislatif daerah di Kota Bogor. Melalui program ini terjalin komunikasi timbal balik antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor, masyarakat serta stakeholders Kota Bogordalam rangka *good governance* serta terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Program ini terdiri dari 10 kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan
- 2) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas DPRD

- 4) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
- 5) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 6) Kegiatan Reses
- 7) Rapat – Rapat Paripurna
- 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Kegiatan Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga
- 10) Kegiatan Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD

o. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 1) Penunjang Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota

p. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat, Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melalui beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan
- 2) Pelaporan Keuangan Sekretariat
- 3) Pembinaan Administrasi Keuangan
- 4) Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pembangunan
- 5) Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis
- 6) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
- 7) Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Dana Tugas Pembantuan
- 8) Penyusunan APBD 2015
- 9) Penyusunan Perubahan APBD 2014
- 10) Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
- 11) Penelitian DPA OPD
- 12) Penelitian Pertanggungjawaban OPD
- 13) Pembinaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah
- 14) Pembinaan Pengelolaan Keuangan OPD dengan BPKP.
- 15) Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai pendukung Neraca Daerah
- 16) Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- 17) Asuransi Kendaraan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor
- 18) Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Langsung Pengelola BMD
- 19) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- 20) Pemeliharaan SIMBADA
- 21) Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor.
- 22) Pembinaan Pengelolaan barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang.
- 23) Penggunausahaan Barang Milik Daerah.
- 24) Pengadministrasian tuntutan ganti Rugi (TGR)
- 25) Pemetaan BMD
- 26) Penelitian DPPA OPD
- 27) Pembangunan Gedung Penyimpanan Aset Daerah.
- 28) Pembangunan Gedung Penyimpanan Arsip BMD.

- 29) Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah.
- 30) Kajian Investasi Daerah.
- 31) Pendataan Wajib Pajak Daerah
- 32) Uji Potensi Pajak Daerah
- 33) Penelitian dan Penghitungan Pajak Daerah
- 34) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
- 35) Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah
- 36) Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak
- 37) Analisa/Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 38) Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah
- 39) Pemeliharaan Basis Data PBB
- 40) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
- 41) Pembuatan dan Pemeliharaan Papan Hibauan
- 42) Sistem Pajak Daerah Online
- 43) Pendataan Potensi Reklame Permanen
- 44) Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Maket Gedung Dinas Pendapatan Daerah

q. Program Peningkatan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Sasaran program ini adalah Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan siskamswakarsa, meningkatnya kesadaran masyarakat penegakan peraturan daerah dan menurunnya lokasi rawan PKL, melalui pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Piket Anggota Sat. Pol. PP Kota Bogor
- 2) Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Penertiban PKL
- 4) Penegakan Perda dan Sidang Tipiring
- 5) Penyidikan dan Penindakan
- 6) Pengamanan Hari Besar dan Hari Raya (PHBN)
- 7) Pembinaan Linmas
- 8) Pembongkaran bangunan

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Kantor Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bogor. Penanganan urusan ini dijabarkan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa; Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media; dan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

- 1) Pengendalian Peredaran Film, VCD dan DVD
- 2) Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 3) Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Intranet dan Internet (Backbone) Kota Bogor
- 4) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota
- 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Lab RICE
- 6) Pengadaan Bandwith Internet
- 7) Penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sipatahunan
- 8) Pemeliharaan Portal Web dan Co-Location

- 9) Pengembangan Aplikasi e-government
- 10) Pemeliharaan Close Circuit Television (CCTV)
- 11) Digitalisasi Profil Kota Bogor
- 12) Pengelolaan Multimedia Ruang Rapat
- 13) Pemeliharaan Grounding Listrik, Erester Internet OPD dan Kelurahan
- 14) Pembangunan dan Pengelolaan Network Operation Center (NOC)
- 15) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
- 16) Review Cell Plan dan Penghitungan Potensi Retribusi Menara
- 17) Pengelolaan Media Publikasi Internal
- 18) Pendokumentasian Bidang Kehumasan
- 19) Pengelolaan Informasi Publik Pada Website Kota Bogor

b. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

- 1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 2) Dialog Pembangunan Dan Iklan Layanan Publik

c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Peningkatan Pelayanan Kehumasan

3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penanganan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dan Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Urusan ini dilaksanakan melalui dua program yaitu program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan.

Kedua program ini diurai dalam berbagai kegiatan untuk turut menjawab berbagai tantangan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Tantangan itu diantaranya adalah kondisi terus menurunnya rasa kebangsaan di sebagian masyarakat, dinamika kerukunan antar umat beragama, dan aksi demo masyarakat terhadap isu nasional dan daerah. Tantangan ini bertambah besar di tengah belum idealnya jumlah personil Satpol PP dibandingkan jumlah penduduk.

Berikut rincian kegiatan yang telah dilakukan dalam penanganan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri:

a. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Komunikasi Politik (FKKP)
- 2) Sosialisasi Pemilu Legislatif

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 1) Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- 2) Peningkatan Wawasan Kesatuan Bangsa Bagi Pelajar
- 3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 4) Penyelenggaraan Sosialisasi Kerukunan Etnis
- 5) Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah
- 6) Pembinaan bagi Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
- 7) Pemeliharaan Ketertiban Umum
- 8) Penyelenggaraan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)

4. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor melalui program Penataan Administrasi Kependudukan.

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan
- 3) Kegiatan Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan
- 4) Kegiatan Pelayanan Publik Akte Kelahiran
- 5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan
- 6) Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan
- 7) Kegiatan Penataan Dokumen Kependudukan dan Registrasi Kependudukan
- 8) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
- 9) Kegiatan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Urusan Perencanaan Pembangunan dijabarkan dalam 4 program, yaitu: 1) Program Pengembangan Data dan Informasi, 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan 4) Program Perencanaan Sosial Budaya. Program-program tersebut dilaksanakan dalam 28 kegiatan.

a. Program Pengembangan Data dan Informasi

Indikator kinerja program ini adalah ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan. Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik
- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi dan Penelitian Pengembangan
- 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
- 4) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK)
- 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 6) Kegiatan Pengelolaan Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Kegiatan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi (IME)

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan telah dicapai dengan baik melalui pelaksanaan musrenbang, penyusunan rencana pembangunan tahunan dan 5 (lima) tahunan, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)
- 2) Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2014
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015
- 4) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015
- 5) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2014
- 6) Kegiatan Pengkajian RKA 2015
- 7) Kegiatan Pengkajian RKA Perubahan 2014
- 8) Kegiatan Perencanaan Umum
- 9) Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota
- 10) Kegiatan Penelitian Renja OPD
- 11) Kegiatan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019
- 12) Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
- 13) Kegiatan Updating Data Rencana Jangka Menengah Sarpras Kota

c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator kinerja program ini berupa tingkat penyusunan dokumen sektoral bidang ekonomi yang pada tahun 2014 dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Rencana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Wilayah Kota Bogor 2015-2020
- 2) Kegiatan Kajian Agribisnis dan Agroindustri dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Kota Bogor
- 3) Kegiatan Kajian Hibah Untuk Bantuan Modal Usaha Ekonomi
- 4) Kegiatan Penyusunan Klaster Ekonomi Kreatif Kota Bogor

d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Indikator kinerja program ini berupa tingkat penyusunan dokumen sektoral bidang Sosbud yang pada tahun 2014 dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pembinaan Forum Kota Sehat
- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan
- 3) Kegiatan Monev MDG's dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010
- 4) Kegiatan Komda Lansia

2.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2014

1. Transportasi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2010 – 2014, pelaksanaan pembangunan transportasi tertuang dalam Misi-2, yaitu mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas, yang bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, dengan sasaran terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas dan terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu.

Arah kebijakan penanganan transportasi yang dilaksanakan dalam penanganan permasalahan transportasi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, periode 2010-2014:

- a. Tahap Pertama adalah penataan infrastruktur (Jalan dan Terminal).
 - b. Tahap Kedua adalah *traffic engineering* (penataan sistem lalu lintas).
 - c. Tahap Ketiga adalah penataan angkutan umum.
- Penataan transportasi yang dilaksanakan dalam menangani permasalahan transportasi pada Tahun Anggaran 2014, meliputi:

a. Pengembangan Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase difokuskan pada:

- 1) Pembebasan lahan untuk jalan lingkar ruas R-3 Section 2 dengan realisasi 1,13 km (66,48%) dari rencana 1,70 km dan pembebasan lahan untuk jalan akses Stasiun KA Sukaresmi dengan realisasi 0,22 km (100%)
- 2) Pembangunan jalan lingkar ruas R-3 Section 2 dengan realisasi 1,250 m¹ (100,00%) dan pembangunan jalan akses Stasiun KA Sukaresmi dengan realisasi 250 m¹ (43%)
- 3) Drainase yang disediakan 4,845 km (193,80%) dari rencana 2,5 km
- 4) Jembatan yang disediakan 1 unit (100%) dari rencana 1 unit
- 5) Trotoar yang tersedia 4,020 km (302,26%) dari rencana 1,33 km

b. Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase dengan realisasi:

- 1) Panjang jalan yang berkualitas baik 351,612 km (55,37%) dari panjang jalan Kota Bogor 635 km.
- 2) Panjang pedestrian yang berkualitas baik 20,11 km (100,55%) dari panjang pedestrian Kota Bogor 20 km.
- 3) Jumlah jembatan yang berkualitas baik 27 unit (90,00%) dari jumlah jembatan 30 unit.

c. Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang, difokuskan pada:

- 1) Revitalisasi Terminal Baranangsiang, dengan melakukan evaluasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Panca Grahatama Indonesia tentang Optimalisasi Asset Terminal Baranangsiang dengan Pola Bangun Guna Serah, dimana disepakati dilakukan evaluasi (re-design) terhadap perencanaan teknis pembangunannya (rancang bangun dan analisis dampak lalu lintas), dengan lebih mengoptimalkan fungsi terminal baranangsiang di banding fungsi fasilitas pendukungnya.
- 2) Revitalisasi terminal Bubulak, sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum. Dimana sampai berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara Dinas LLAJ Kabupaten Bogor dengan Dinas LLAJ Kota Bogor nomor:

551/1131-DLLAJ

119/07-Dishubkomin-2010

pada bulan Agustus 2014 belum ada kemajuan atau belum tampak komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor, yang seharusnya membangun Terminal di Ciawi Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dan Terminal Dramaga sebagai pengganti Terminal Bubulak dan Laladon yang direncanakan terbangun tahun 2014. Sampai akhir tahun 2014 belum ada kejelasan pembebasan lahan dan DED yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

- d. Penataan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum**, difokuskan pada:
- 1) Operasional angkutan umum dengan sistem shift, dengan realisasi sebanyak 16 trayek;
 - 2) Pembangunan fasilitas penunjang berupa fasilitas pejalan kaki (pedestrian) dan fasilitas henti (Shelter), baik untuk angkutan kota (3 lokasi) dan penunjang Angkutan Massal Trans Pakuan Koridor-1 melalui revitalisasi/pemeliharaan 6 shelter ;
 - 3) Kajian re-routing terhadap 23 trayek angkutan kota yang dilayani oleh 3.412 unit kendaraan, sebagai dasar dilakukannya penataan ulang jaringan pelayanan angkutan kota, juga sebagai upaya distribusi pelayanan dan peningkatan cakupan layanan angkutan umum di wilayah Kota Bogor, yang dikembangkan sebagai trayek cabang menjadi 28 trayek yang dilayani 2.586 unit kendaraan, dan sebagai angkutan pengumpan/*feeder* trayek utama 7 koridor angkutan massal Trans Pakuan serta tahapan implementasi pengurangan 826 kendaraan angkutan kota;
- e. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**, difokuskan pada:
- 1) Pengawasan – Pengendalian – Penjagaan – Pengaturan (WASDALGATUR) di 11 titik kemacetan berdasar RPJMD Kota Bogor 2010-2014, yaitu simpang Tanjakan Empang; simpang Lawang Seketeng; simpang Gunung Batu; Jembatan Merah; simpang Asem; Sukasari/Depan Shangrila; simpang Bank Jabar; simpang Paledang; simpang Taman Topi; simpang Suryakencana; Jalan Otto Iskandardinata serta titik kemacetan lainnya;
 - 2) Pengadaan dan pembangunan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas (Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, RPPJ, Deliniator, Paku Marka, Guardrail, Water Barrier, Trafficone, Cermin Tikungan);
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan median jalan sebagai pemisah jalur lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas;
 - 4) Pengendalian dan penertiban perparkiran liar untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, Penataan dan pembangunan fasilitas parkir, berupa pengecatan marka parkir untuk pengendalian dan efisiensi penggunaan ruang jalan, serta pemasangan rambu tarif parkir sebagai dasar pengenaan retribusi yang lebih transparan;
 - 5) Pembangunan fasilitas integrasi moda Stasiun KA Bogor berupa fasilitas pejalan kaki (pedestrian) tahap-III (Jl. Kapten Muslihat/ Budimulya s/d Jl. Paledang/Stasiun KA Paledang);
 - 6) Pembangunan dan optimalisasi fungsi APILL, ATCS dan CCTV, melalui pemeliharaan dan rekondisi APILL, pemasangan kabel FO, rekondisi CCTV Lalu lintas dan relokasi Control Room.

Pada Tahun Anggaran 2014, Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Urusan Kebinamargaan dengan Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (*zero pot hole*) rata-rata sebesar 82,89%.

Tabel 2.15

Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Urusan Kebinamargaan Tahun Anggaran 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
5. Program Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Drainase					
1	Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan jalan, drainase dan jembatan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jalan, drainase dan jembatan	100% (sesuai rencana pembangunan jalan)	100%	100
2	Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan	Luas lahan yang disediakan untuk pembangunan jalan dan jembatan	5,90 km	2,713 km	45,98
3	Terbangunnya jalan, drainase dan jembatan	Panjang jaringan jalan, (25,03 km)	5,90 km	1,5 km	25,43
		Panjang drainase yang disediakan	2,5 Km	4,845 km	193,8
		Panjang jembatan yang disediakan	1 Unit	1 unit	100
		Panjang Trotoar yang tersedia	220 m2	4.020 m2	24,73
B. Program Peningkatan Jalan, Jembatan, dan Drainase					
4	Meningkatnya ketersediaan perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan	Jumlah perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan	(100%) sesuai rencana pembangunan jalan	100%	100
5	Tersedianya lahan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase	Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase	9,7 km	0,00 km	0,00
6	Meningkatnya daya dukung dan kapasitas beban lintas jalan, drainase dan jembatan	Panjang jaringan jalan, drainase dan jembatan yang ditingkatkan (68,4 km)	9,7 km	14,4 km	148,45
C. Program Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Drainase					
7	Meningkatnya ketersediaan perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase	Jumlah perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase	(100%) sesuai rencana pembangunan jalan	100%	100

8	Terpeliharanya jalan, jembatan dan drainase secara rutin dan berkala	Panjang jalan yang berkualitas baik	635 Km	351,612 km	55,37
		Panjang pedestrian yang berkualitas baik	350 Km	269,51 km	77
		Jembatan yang berkualitas baik	30 Unit	27 unit	90
D. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan, Jembatan, dan Drainase					
9	Meningkatnya kualitas data jalan, jembatan dan drainase	Leger jalan	60.00%	63.31%	105,52
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
10	Meningkatnya pengelolaan kebinamargaan	Tingkat penyediaan sarana kebinamargaan	85%	65%	76,47
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2014					84,32

Tingkat capaian Kinerja Pelayanan Dinas LLAJ Kota Bogor tahun anggaran 2014, berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Urusan Perhubungan dengan Strategi Penataan Lalu Lintas di Kawasan Kemacetan rata-rata sebesar 107,25,50%.

Tabel 2.16
Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					
1	Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan	Jenis perencanaan	8	16	200,00
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perhubungan	Kecepatan (km/jam) & Waktu Tempuh (mnt/km)	21,00 2,86	21,59 2,78	102,81
3	Tersedianya sarana prasarana perhubungan	Kegiatan pengadaan & pemeliharaan Fasilitas Lalin	8	10	125,00
B. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas					
4	Tertatanya lalu lintas di lokasi rawan kemacetan	Jumlah Zona Kemacetan	3	5	60,00
5	Tertatanya lokasi eks PKL	Jumlah Lokasi PKL	0	1	100,00
C. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum					
6	Meningkatnya kinerja pelayanan angk. Umum	Jumlah Trayek Penataan Shift	23	16	69,57

7	Meningkatnya kedisiplinan pengemudi	Jumlah Pelanggaran Lalin	30	30	100,00
D. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					
8	Meningkatnya Kelaikan Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang di Uji	23.006	23.156	100,65
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2014					107,25

Dengan melihat permasalahan transportasi saat ini dengan pencapaian program sampai dengan tahun 2014, transportasi masih relevan dijadikan program prioritas dengan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sasaran dan program terhadap Visi – Misi – Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019.

2. Kemiskinan

Salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2010-2014 adalah penanganan masalah kemiskinan dalam pembangunan kota jasa yang bersih, indah, aman dan nyaman. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah. Karena kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks baik faktor penyebabnya maupun dampak yang akan ditimbulkannya maka penanggulangan kemiskinan harus terus diupayakan secara lebih sinergis dan terpadu.

Sebagai gambaran umum bahwa target penurunan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Bogor berdasarkan Dokumen RPJMD tahun 2010-2014, pada akhir tahun 2014 target penduduk miskin di Kota Bogor dapat menurun menjadi 14,67 %.

Untuk mewujudkan tercapainya target tersebut di atas, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan melalui urusan yang dituangkan kedalam program-program yaitu :

a. Urusan Ketahanan Pangan

Program peningkatan ketahanan pangan, dengan sasaran program meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikasi kegiatan peningkatan distribusi, mutu, dan ketersediaan pangan masyarakat, melalui penyediaan beras bagi masyarakat miskin (Raskin)

b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan, dengan sasaran pengembangan sikap dan mental wirausaha, dengan indikasi kegiatan pelatihan dan pembinaan LKM UEK-SP, biaya operasional dan subsidi pendamping UEK-SP, pelatihan pengelola ekonomi masyarakat syariah, penilaian kinerja pengurus UEK-SP, Pelatihan pengelola ekonomi syariah masjid.

c. Urusan Perumahan Rakyat

Program lingkungan sehat perumahan, dengan sasaran tertatanya kawasan perumahan kumuh untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan, dengan indikasi kegiatan

- 1) Perbaiki rumah tidak layak huni

- 2) Penataan kawasan kumuh (*urban renewal*)

d. Urusan Pendidikan

- 1) Program peningkatan pendidikan anak usia dini, dengan sasaran meningkatnya akses layanan dan mutu pendidikan anak usia dini (pra sekolah), dengan indikasi kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pelatihan Tutor PAUD
- 2) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan sasaran meningkatnya akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan dasar 9 tahun, dengan indikasi kegiatan beasiswa bagi siswa gakin tingkat SD/MI/SMP/MTs
- 3) Program pendidikan menengah, dengan sasaran meningkatnya akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan menengah, dengan indikasi kegiatan beasiswa bagi gakin tingkat SMA/MA/SMK
- 4) Program pendidikan non-formal, dengan sasaran meningkatnya akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C), dengan indikasi kegiatan:
 - Pelaksanaan Kejar Paket A dan Pelatihan Tutor
 - Pelaksanaan Kejar Paket B dan Pelatihan Tutor
 - Pelaksanaan Kejar Paket C dan Pelatihan Tutor
 - Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

e. Urusan Kesehatan

- 1) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin, dengan indikasi kegiatan pelayanan rujukan masyarakat miskin dan jamkesmas.
- 2) Program kesehatan ibu melahirkan dan anak, dengan sasaran:
 - Meningkatnya kunjungan ibu hamil ke sarana pelayanan kesehatan
 - Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan
 - Meningkatnya kunjungan neonatal ke tenaga kesehatan
 - Meningkatnya kunjungan bayi yang dibawa ke tenaga kesehatan
- 3) Program perbaikan gizi masyarakat, dengan sasaran:
 - Meningkatnya kualitas gizi balita
 - Meningkatnya cakupan Vitamin A Balita
 - Meningkatnya cakupan Zat besi pada Ibu hamil
 - Meningkatnya konsumsi garam beryodium
 - Meningkatnya balita yang dipantau pertumbuhannya
 - Meningkatkan perbaikan gizi siswa sekolah melalui UKS
- 4) Program pengembangan lingkungan sehat, dengan sasaran:
 - Meningkatnya sanitasi dasar perumahan, penyehatan TTU dan TPM, dengan indikasi kegiatan yakni Pembangunan sarana prasarana sanitasi masyarakat
 - Penyehatan TTU dan TPM, dengan indikasi kegiatan Pelayanan puskesmas, jasa pelayanan, pembinaan, manajemen dan peningkatan SDM

- 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dengan sasaran:
- Mencegah atau menurunkan berjangkitnya penyakit menular, dengan indikasi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
 - Mencegah atau menanggulangi penyakit tidak menular, dengan indikasi kegiatan Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular

f. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan sasaran:

- 1) Peningkatan peran wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dengan indikasi kegiatan Peningkatan P2WKSS
- 2) Meningkatnya keluarga sehat sejahtera di Kota Bogor, dengan indikasi kegiatan Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi kader PKK dan Pelatihan usaha PKK dan para akseptor

g. Urusan Sosial

- 1) Program pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, dengan sasaran meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesos lainnya indikasi kegiatan Penanganan Masalah Kesejahteraan sosial.
- 2) Program pembinaan anak terlantar , dengan sasaran Terbinanya anak terlantar, dengan indikasi kegiatan Penanganan Anak Terlantar dan Rehab Gedung PMKS serta Pembangunan Rumah Singgah
- 3) Program pembinaan penyandang cacat, trauma dan korban bencana, dengan sasaran :
 - Terbinanya para penyandang cacat, trauma, dan korban bencana, dengan indikasi kegiatan Penanganan penyandang cacat, trauman dan bencana
 - Menurunnya jumlah penyandang penyakit sosial, dengan indikasi kegiatan Penanganan Masalah Penyakit Sosial

Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda kebijakan penting bukan hanya untuk Pemerintah Kota Bogor, melainkan telah menjadi komitmen nasional dan komitmen global, hal ini terlihat dengan munculnya *Deklarasi Millennium* saat berlangsung *UN's Millennium Summit* di New York September Tahun 2000, yang diikuti oleh 150 kepala negara. Deklarasi tersebut tertuang dalam rumusan *New Millennium Development Goals*, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasinya.

MDG's tersebut merupakan delapan Tujuan Pembangunan Milenium yang berisikan tujuan kuantitatif yang mesti dicapai secara global pada tahun 2015. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDG's terdiri dari target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan

Pembangunan Milenium tersebut adalah :

- Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem dan Kelaparan
- Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
- Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan
- Mengurangi Tingkat Kematian Anak
- Meningkatkan Kesehatan Ibu
- Memerangi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya
- Memastikan Kelestarian Lingkungan
- Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan

Secara garis besar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor melibatkan beberapa sektor OPD (lintas sektoral) yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2014, berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang terbagi dalam 4 klaster sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat, yaitu:

1) Klaster I

Program dan kegiatan yang termasuk dalam Klaster I bertujuan memberikan bantuan dan perlindungan sosial serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih, seperti pemberian Raskin, pelayanan Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa untuk siswa miskin, bantuan sosial untuk penyandang cacat, lansia, dan lain sebagainya.

2) Klaster II

Program dan kegiatan yang termasuk dalam Klaster II bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan serta pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan mengedepankan pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Di sisi lain, kegiatan yang dilakukan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, pemilikan tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta perumahan.

3) Klaster III

Program dan kegiatan yang termasuk dalam Klaster III difokuskan terhadap upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan tersebut mencakup pemberian bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan akses pada pasar.

4) Klaster IV

Program dan kegiatan yang termasuk dalam Klaster IV dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan dengan target-target spesifik dan pemberdayaan nelayan, yang diantaranya adalah pemberian

bantuan penyediaan rumah murah, sumber daya air bersih dan sambungan listrik.

Perkembangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2014.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Kota Bogor menurut data TNP2K/BPS mencapai 49.522 RTS yang dibagi kedalam tiga kelompok atau katagori yaitu :

1. Kelompok pertama sebanyak 17.188 RTS ((Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) / Paling Miskin)
2. Kelompok kedua sebanyak 16.167 RTS (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)/ Hampir Miskin), dan
3. Kelompok ketiga sebanyak 16.167 RTS (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia) / Rentan Miskin)

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan dan mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan tersebut, perlu terus digalakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor dan stakeholder yang peduli dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor serta tim monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Indikator kemiskinan menurut data TNP2K adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Indikator Dalam Data TNP2K

1. Lapangan Usaha	10. Tempat pembuangan air tinja
2. Status kedudukan dalam pekerjaan	11, Kepesertaan KB
3. Status Penguasaan bangunan/tempat tinggal	12. Jenis cacat
4. Jenis Atap Terlluas	13. Penyakit kronis
5. Jenis dinding terlluas	14. Pendidikan tertinggi
6. Jenis lantai	15. Partisipasi sekolah
7. Sumber air minum	16. Ijazah tertinggi
8. Sumber penerangan utama	17. Kelas tertinggi.
9. Fasilitas tempat BAB	

Dari 68 Kelurahan se Kota Bogor, terdapat 10 Kelurahan yang memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang paling banyak masuk dalam katagori 1 adalah Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cikaret, kelurahan Tegallega, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedung Badak dan kelurahan Kencana. Adapun rinciannya sebagaimana tabel 2.18 berikut :

Tabel 2.18

Data 10 Kelurahan terbanyak warga miskin kategori 1

No	Kelurahan	Kecamatan	Kategori 1
1	Mulyaharja	Bogor Selatan	582
2	Pamoyanan	Bogor Selatan	557
3	Cimahpar	Bogor Utara	553
4	Pasir Jaya	Bogor Barat	535
5	Katulampa	Bogor Timur	501
6	Cikaret	Bogor Selatan	494
7	Tegallega	Bogor Tengah	460
8	Ciparigi	Bogor Utara	459
9	Kedung Badak	Tanah Sareal	391
10	Kencana	Tanah Sareal	389

Setelah dilakukan intervensi program-program penanggulangan kemiskinan, berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bogor, Jumlah RTS pada tahun 2014 sebesar 16.424 RTS, menurun dari tahun 2013 sebesar 253 RTS atau 1,43 persen, dengan rincian sebagaimana tabel 2.19 dan 2.20 berikut :

Tabel 2.19

Rincian Penurunan Perkembangan KK/RTS Miskin di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah KK Miskin	
		RTS	Jiwa
1	Bogor Selatan	71	355
2	Bogor Timur	5	25
3	Bogor Tengah	85	425
4	Bogor Utara	31	155
5	Bogor Barat	32	160
6	Tanah Sareal	29	145
	Jumlah	253	1265

Sumber Data : Laporan Monev Kemiskinan 2014

Tabel 2.20

Perkembangan KK/RTS Miskin di Kota Bogor 2009-2014

Tahun	Jumlah KK Miskin	
	KK/RTS	Jiwa
2009	42.328 KK	169.312
2010	40.876 KK	163.504
2011	17.188 RTS	89.139
2012	16,930 RTS	87,802
2013	16,676 RTS	86,485

2014	16.424 RTS	85.220
------	------------	--------

Dengan demikian, penanganan kemiskinan di Kota Bogor sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 14,61 % pada akhir tahun 2014, sedangkan realisasinya pada akhir tahun 2014 telah mencapai 8,86 %.(melebihi target RPJMD)

3. Kebersihan

Penanganan kebersihan sepanjang tahun 2014 mengacu pada target kinerja pelayanan persampahan yang ditetapkan sebesar 70,4% dari total luas wilayah Kota Bogor. Target tersebut diusahakan tercapai dengan melaksanakan Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Persampahan.

Program ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan pengelolaan biaya operasional pelayanan kebersihan, peremajaan dan pemeliharaan armada pengangkutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari sumber dengan konsep 3R(Reduce, Reuse dan Recycle), serta Pengelolaan sampah di TPA Galuga yang berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2014, timbulan sampah Kota Bogor diperkirakan mencapai 2.673m³/hari. Ada peningkatan sebesar 189 m³/hari atau 7,07 % dari timbulan tahun 2013 yang mencapai 2.484m³/hari. Dari volume tersebut sampah yang terangkut ke TPA Galuga sebanyak 1.884 m³/hari, yang berarti meningkat sebesar 136 m³/hari atau 7,22% bila dibanding dengan tahun 2013 yang mencapai 1748 m³/hari.

Dari volume sampah yang terangkut ke TPA, maka dapat diketahui pelayanan persampahan di Kota Bogor telah mencakup kawasan seluas 8.351,88 ha atau 70,48% dari luas Kota Bogor. Berarti pada tahun 2014 prosentase pelayanan persampahan naik sebesar 0.11% atau 13.04 Ha dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 70,37 % atau 8.338,84 Ha. Capaian tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2014, karena target tersebut hanya ditetapkan sebesar 70,4%. Adapun jumlah timbunan sampah terangkut sebagaimana tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Timbulan dan Sampah Terangkut 2009-2014

TAHUN	∑ TIMBULAN SAMPAH (m³/hari)	∑ SAMPAH TERANGKUT (m³/hari)	CAKUPAN WILAYAH PELAYANAN (%)
2009	2,294	1,602	69.8
2010	2,337	1,636	70.0
2011	2,402	1,685	70.14
2012	2,447	1,718	70.21
2013	2,484	1,748	70.37
2014	2,673	1,884	70,48

Sumber : Bidang Kebersihan, DKP Kota Bogor 2014

Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan serta perluasan wilayah cakupan pelayanan, telah berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja pelayanan persampahan. Sarana prasarana persampahan yang telah mendukung teknis operasional Pengelolaan Persampahan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.22
Sarana Prasarana Persampahan

NO	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA	JUMLAH ARMADA EFEKTIF
1.	Dump Truk	88	81
2.	Arm Roll	42	30
3.	Compactor Truk	5	4
4.	Alat Berat	13	8
5.	Pick Up	17	12
6.	Motor Sampah	59	25
7.	Gerobak Sampah	718	718
8.	Container	105	105
9.	TPS	957	Campuran : 807
			Organik-anorganik: 150
10.	Transfer Depo	7	7
11.	TPS 3R	12	12

Sumber : DKP Kota Bogor 2014

Dalam menangani sampah dan kebersihan, selain menugaskan PNS dan tenaga kontrak, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga mempekerjakan 699 orang tenaga padat karya. Penugasan mereka tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor dengan tugas menyapu dan mengangkut sampah. Upaya peningkatan kualitas teknis operasional persampahan pada sistem pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dilaksanakan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut :

- Peremajaan dan pengadaan Dump Truk sebanyak 20 unit
- Peremajaan dan pengadaan Arm Roll sebanyak 5 unit
- Penyediaan dan peremajaan kontainer sebanyak 24 unit
- Penyediaan gerobak sampah sebanyak 259 unit
- Pengadaan Kendaraan Mobil Pick Up 1 unit
- Perbaikan landasan container 7 unit dan pembangunan landasan container 4 unit
- Pembangunan TPS sebanyak 11 unit dan peremajaan TPS sebanyak 108 unit
- Pengadaan Tong Sampah Organik dan An-organik sebanyak 265 unit
- Pengadaan Tong Sampah beroda sebanyak 100 unit

Lokasi penempatan sarana pengumpulan sampah berupa container pada tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- Jl. Bina Marga
- Bantarjati
- Gg Kelor Semplak
- Jl. Pengadilan

- Jl. Cilebut Sukaesmi
- Eks Pasar Tanah Baru
- Jl. Kantor Batu
- Sukamulya Gardu
- Jl. Paledang
- Simpang Bangbarung
- Jl. Mayor Oking

Kegiatan pengumpulan sampah juga dilakukan dengan memanfaatkan Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ditempatkan di pinggir jalan, pasar, toko dan permukiman yang jumlahnya mencapai 957 unit. Terdiri dari 807 unit TPS satu warna dan 150 unit TPS dua warna (organik dan anorganik). TPS satu warna rata-rata dapat menampung sampah sebanyak 1,5 m³ dan TPS dua warna rata-rata dapat menampung 3 m³, sehingga daya tampung seluruh TPS se Kota Bogor sebesar 1.660,5 m³.

Dari Perbandingan antara tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dapat diketahui rasio TPS per 1000 penduduk adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{1.660,5 \times 1.000}{1.004.831} = 1,65$$

Berdasarkan perhitungan tersebut berarti pada setiap 1.000 penduduk terdapat 1,65 TPS yang menampung sampah sebelum diangkut ke lokasi pembuangan akhir.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan sistem pengelolaan persampahan, serta pengelolaan persampahan yang berkelanjutan melalui pengurangan timbulan sampah; telah dilanjutkan pengembangan program 3R terutama di daerah yang belum terlayani kendaraan angkutan sampah. Program ini dijabarkan dengan cara mengajak masyarakat memilah dan mengurangi sampah di sumber, agar target reduksi dan penyediaan fasilitas pengurangan sampah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 20% sampai tahun 2019 dapat tercapai.

Sampai dengan tahun 2014 di Kota Bogor terdapat 12 lokasi TPS 3R berbasis masyarakat, yaitu :

- RW X Perumahan Griya Katulampa, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur;
- RW XVII Perumahan Mutiara Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur;
- RW 06 Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan;
- RW 03 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan;
- RW 02 Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan;
- RW XV Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan;
- RW 04 Kampung Ciburial Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara;
- RW 02 UPTD Rusunawa Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat;

- RW 02 Kampung Situ Pete Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal;
- RW 04 Kampung Seremped Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal;
- RW 04 Kampung Salabenda Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal
- RW 13 Perumahan Dharmais Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal

Sebagai upaya keberlanjutan dan replikasi program 3R yang sudah ada di Kota Bogor, pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Upaya optimalisasi TPS 3R dalam bentuk :
 - a. Membangun Jalan Akses ke TPS 3R di 3 (tiga) lokasi yaitu di TPS 3R Cibadak, Kertamaya dan Mutiara Bogor Raya Katulampa
 - b. Memasang Jaringan Air Bersih di TPS 3R Kertamaya;
 - c. Membuat RAM TPS 3R di 4 (empat) lokasi yaitu TPS 3R Kertamaya, TPS 3R Mulyaharja, TPS 3R Mutiara Bogor Raya dan TPS 3R Griya Katulampa;
 - d. Membangun Tempat Pengolahan Sampah An Organik di 2 (dua) lokasi yaitu TPS 3R Mulyaharja dan TPS 3R Mutiara Bogor Raya;
 - e. Membangun Kantor untuk Bank Sampah di 4 (empat) Lokasi yaitu TPS 3R Rusunawa, TPS 3R Kertamaya, TPS 3R Griya Katulampa dan TPS 3R Kencana;
 - f. Membangun Ruang Pemilahan di 1 (satu) lokasi yaitu di TPS 3R Ciparigi;
 - g. Terbangunnya Dapur dan Kamar Mandi di 1 (satu) lokasi yaitu TPS 3R Rusunawa
2. Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal berupa penyediaan fasilitas pengurangan sampah di wilayah perkotaan sebesar 20 % telah dilaksanakan replikasi program 3R yaitu Pembangunan 1 lokasi TPS 3R oleh Propinsi Jawa Barat melalui Satker PPLP di RW XV Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan dengan penerima manfaat sejumlah 4 RW yaitu RW 03, 04, 12 dan 15 atau 595 KK.

Upaya optimalisasi dan replikasi program 3R tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pengurangan sampah Kota Bogor sebesar $\pm 4\%$ ($\pm 80 \text{ m}^3$) pada tahun 2014 dan peningkatan cakupan wilayah pelayanan kebersihan sebesar 70,48%.

Selanjutnya dalam rangka memberikan pemahaman dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pembentukan KSM Pengelola Sampah 3R di Kelurahan Cipaku (KSM Ciremai)
2. Bekerjasama dengan PKK Kota Bogor, masyarakat telah dilibatkan dalam pembuatan kompos dengan metoda komposter (drum Berputar) serta strategi 3R melalui Bank Sampah di 2 (dua) lokasi yaitu di Kampung Rambay Kelurahan Ciluar dalam rangka Lomba P2WKSS dan di Kelurahan Kebon Kalapa dalam rangka Lomba Posyandu.
3. Memberikan insentif kepada tenaga pemilah dan pengolah (operator TPS 3R) sebagai petugas padat karya sebanyak 26 orang .
4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke 12 (dua belas) lokasi 3R eksisting;
5. Sosialisasi dan pembinaan tentang Pengelolaan Sampah khususnya Bank Sampah di 4 (empat) lokasi yaitu TPS 3R Kencana, TPS 3R Kertamaya, TPS

- 3R Griya Katulampa dan TPS 3R Rusunawa;
6. Melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah 3R dan pengangkutan residu di 12 lokasi 3R;
 7. Memberikan Peralatan Media Ajar Pemberdayaan sebanyak 3.000 Buku Tabungan, 1000 karung, 2 unit komposter dan 10 timbangan untuk mengimplementasikan serta mensinergiskan program 3R melalui Bank Sampah di 10 Lokasi.

Dalam rangka mendukung peningkatan cakupan wilayah pelayanan kebersihan dan mendukung penyediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan sampai dengan tahun 2019, perlu disediakan lahan untuk pengelolaan sampah 3R. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah dilakukan pembebasan lahan di 2 lokasi, yaitu di RW 04 Kelurahan Ciparigi seluas ± 400 m² dan di RW 04 Kelurahan Cibadak seluas ± 713 m²

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jasa Retribusi Umum dan dalam rangka memenuhi target perolehan retribusi persampahan, telah dilaksanakan kerjasama melalui kemitraan dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dalam bentuk penitipan pembayaran retribusi pelayanan persampahan pada rekening pelanggan PDAM.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung peningkatan perolehan retribusi jasa pelayanan persampahan diantaranya adalah menyusun Sistem Informasi Manajemen Retribusi Sampah dalam bentuk perangkat lunak (aplikasi soft ware). Sistem ini diterapkan untuk memudahkan penghitungan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjangkau potensi pada jalur-jalur areal komersial yang berada di golongan perdagangan dan jasa serta untuk menghitung volume sampah yang dihasilkan.

Target dan realisasi Retribusi Persampahan tahun 2014 dapat dilihat lebih detail dalam tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2014

No	Jenis Retribusi Yang Ditarik	Target	Realisasi
1.	PDAM	Rp. 6.366.305.412,-	Rp. 6.639.040.200,-
2.	Non PDAM	Rp. 780.000.000,-	Rp. 976.302.383,-
3.	Jumlah	Rp. 7.146.305.412,-	Rp. 7.615.342.583,-

Berlanjut pada kegiatan peningkatan kerjasama Pengelolaan TPA Galuga dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan yang telah dilakukan adalah membuat Perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Galuga yang telah berakhir pada tanggal 24 Juli 2012. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Galuga antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 658.1/2/PRJN/KS/2012 dan 658.1/Perj.199-DKP/2012 tanggal 16 Juni 2012, berlaku selama 4 tahun 6 bulan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2015.

Di dalam naskah perjanjian kerjasama pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Galuga tercantum hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bogor.

4. Pedagang Kaki Lima

Upaya pembinaan dan penataan PKL di Kota Bogor diarahkan dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

- a. Tujuan penataan PKL adalah mewujudkan Kota Bogor yang bersih, indah dan nyaman dengan PKL yang tertib dan teratur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
- b. Sasaran penataan PKL adalah Kota Bogor Bersih dan bebas macet akibat PKL serta tertatanya PKL yang tidak mengganggu ketertiban umum.
- c. Strategi umum penataan PKL adalah dengan mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan cara:
 - Menata ruang kegiatan sektor informal yang ada.
 - Mengalokasikan ruang baru untuk sektor informal.
 - Melibatkan masyarakat dalam pengendalian ruang sektor informal.
- d. Rencana penataan PKL dilaksanakan melalui :
 - Menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan.
 - Menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal.
 - Membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang.
 - Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal.
 - Mengintegrasikan kegiatan sektor formal dan sektor informal.
 - Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal.
 - Mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk mengalokasikan ruang bagi kegiatan sektor informal.

Melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.23.45.-63 Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan 14 lokasi zona PKL, yang awalnya adalah 18 lokasi zona PKL (Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.23.45-146 tahun 2008). Zona PKL tersebut adalah sebagai berikut:

- Jalan Bangbarung Raya/Kelurahan Bantar Jati. Kecamatan Bogor Utara
- Jalan Batu Tulis/Kelurahan Batu Tulis. Kecamatan Bogor Selatan
- Jalan Papandayan/ Kelurahan Babakan. Kecamatan Bogor Tengah
- Jalan Oto Iskandar Dinata (jembatan Sungai Ciliwung sampai dengan jalan Bangka)/kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah
- Gang Selot-jalan Ir. H. Juanda/ Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah
- Samping dinas Cipta Karya dan Tata Ruang –Jalan Pengadilan/ Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah
- Jalan Cidangiang Bawah/Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah
- Jalan Bina Marga/Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur
- Jalan Sukasari III (sebelah Vihara)/ Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur
- Jalan Siliwangi (CV Murni Motor-Gereja)/ Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur
- Jalan Pejagalan/ Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal
- Jalan Dadali/ Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal
- Jalan Ahmad Yani/Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal

Pelaksanaan program-program Penataan dan Pembinaan PKL bersifat lintas sektor dan melibatkan lebih dari satu OPD, yakni:

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman.
- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Kantor Koperasi dan UMKM.
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PD. Pasar Pakuan Jaya.
- Kantor Kesbang dan Politik.
- Kecamatan dan Kelurahan.

Di Tahun Anggaran 2014, ada 2 sub program yang dilaksanakan yaitu Upaya Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Bogor meliputi:

1) Program Penataan PKL.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah menurunnya jumlah PKL di tempat terlarang dengan target capaian 1.000 PKL Program ini direalisasikan melalui :

a. Pendataan PKL.

Hasil kegiatan ini adalah terdatanya 1.316 PKL di 13 titik lokasi pendataan, yakni:

- Jl. M.A. Salmun, mulai dari Asem-rel kereta-Jl. Dewi Sartika sebanyak 568 PKL.
- Jl. Mayor Oking sebanyak 34 PKL.
- Jl. J. Panaragan sebanyak 77 PKL
- Jembatan Merah sebanyak 14 PKL.
- Jl. Kapten Muslihat sampai dengan Jl. Panaragan sebanyak 186 PKL.
- Jl. Kesehatan sebanyak 12 PKL.
- Seputar Air Mancur sebanyak 56 PKL.
- Jl. Pemuda sebanyak 125 PKL.
- Jl. Achmad Yani sebanyak 16 PKL.
- Jl. Pajajaran di depan Botani Square sebanyak 10 PKL.
- Jl. Binamarga sebanyak 14 PKL.
- Sekitar Pasar Jambu Dua sebanyak 204 PKL.
- Jl. Dewi Sartika.

b. Relokasi PKL.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yakni:

- Relokasi sementara PKL Jl. Dewi Sartika terbagi menjadi 2 kelompok PKL, yakni pedagang pagi sampai dengan sore dan petang sampai dengan malam hari. PKL pagi berasal dari PKL sekitar stasiun kereta api dan pedestrian, ditambah PKL eksisting Jl. Dewi Sartika. Jumlah PKL pagi-siang yang berjualan di trotoar 211 PKL dan di badan jalan 292 PKL. PKL yang berjualan di malam hari sebanyak 106 PKL berasal dari Jl. Kapten Muslihat, Jembatan Merah, dan sebagian dari Jl. Panaragan serta depan PLN.
- Relokasi PKL dari Jl. Achmad Yani ke Jl. R3 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur.
- Pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Jl. MA. Salmun di

Pasar Warung Jambu.

- Pembangunan Gedung Destinasi Wisata Kuliner di Jl. Bina Marga Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur (dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor dengan bantuan dana Provinsi Jawa Barat).
- Pematangan lahan pembangunan Sentra Kuliner tahap I di Jl. Adnawijaya.

2) Program Pembinaan/Pemberdayaan.

- a. Monitoring dan Evaluasi PKL.
Kegiatan ini dilaksanakan di 14 zona dengan sasaran sebanyak 356 PKL.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bisnis untuk PKL.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan 50 PKL yang didanai APBN. Diklat ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan.
- c. Bimbingan Teknis Higienis dan Sanitasi Pasar.
Kegiatan ini didanai oleh APBN melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan 53 PKL.

3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Sasaran program ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas taman kota dan taman lingkungan, termasuk lokasi eks penertiban PKL. Program ini direalisasikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau .
Lokasi area yang direvitalisasi beberapa merupakan area eks PKL, seperti Jl. Batu Tulis, Jl. Pajajaran (pertigaan Jl. Pakuan sampai dengan sampai dengan pertigaan Pajajaran Indah), revitalisasi jalur hijau Jl. Otto Iskandardinata.
- b. Pengadaan Sarana dan Pendukung Pemeliharaan Taman.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan dalam upaya pemeliharaan taman. Salah satu wujudnya adalah pemasangan alat fitnes taman di taman Eks PKL pinggir Kali Ciliwung Kelurahan Sempur.

4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

Dalam RPJMD Kota Bogor 2010-2014, program ini diwujudkan melalui 2 indikasi kegiatan, yakni Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Zona eks PKL, serta Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas. Realisasi program ini adalah :

- a. Kegiatan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Rawan Kemacetan.
Tujuan kegiatan ini adalah menyusun kajian tentang manajemen dan rekomendasi rekayasa lalu lintas untuk mengurangi tingkat kemacetan di kawasan persimpangan. Fokus manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah 11 titik rawan kemacetan. Beberapa dari titik tersebut merupakan lokasi rawan PKL, yakni:
 - Simpang Tanjakan Empang;
 - Simpang Lawang Seketeng;
 - Jembatan Merah;
 - Sukasari (Depan Shangrila);

- Simpang Bank Jabar;
- Simpang Paledang;
- Simpang Taman Topi;
- Simpang Suryakencana;
- Jalan Otto Iskandardinata.

Keluaran kegiatan ini adalah buku kajian sebanyak 10 eksemplar dan kajian dalam bentuk softcopy (CD) sebanyak 5 buah. Hasil kajian ini adalah rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan persimpangan.

b. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Pengaman Lalu Lintas.

Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Bogor dengan tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan perhubungan yang tertib, selamat, dan aman. Kegiatan ini terealisasi sebesar 32,43%. Keluaran dari kegiatan ini adalah beberapa sarana pengaman lalu lintas seperti antara lain: marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, warning light, paku marka, water barrier, traffic cone, cermin tikungan, papan nama jalan, shelter, dan median jalan.

5) Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.

a. Penertiban PKL.

Bentuk kegiatan ini adalah dengan membongkar kios/warung/lapak yang didirikan ditempat fasilitas / sarana umum kota seperti bahu jalan, trotoar, dan jalur hijau. Penertiban dilaksanakan di beberapa titik, yakni:

- Jl. Sawojajar.
- Jl. Sudirman.
- Jl. Mayor Oking.
- Jl. Sholeh Iskandar.
- Jl. MA.Salmun;
- Jl. Pajajaran;
- Kawasan Sempur dan Taman Kencana.
- Kawasan Pasar Bogor: Jl. Tanjakan Empang, Jl. Juanda, Jl. Surya Kencana, Jl. Pedati, Jl. Lawang Saketeng, Jl. Roda, dan Jl. Otista.

Hasil capaian dari kegiatan sebesar 75% PKL tidak kembali berdagang ke lokasi yang ditertibkan. Khusus untuk Jl. M.A. Salmun, penertiban melibatkan banyak pihak, yakni: Sat Pol PP, DLLAJ, Dinas Bima Marga, Dinas Koperasi dan UMKM, Kantor Kesbang, unsur Kecamatan, unsur Kelurahan dan dibantu oleh unsur jajaran TNI, Polri (yang terdiri dari PM, Yonif 315 Garuda, Intel Kodim, Intel Korem, Koramil, Intel Polresta, Intel Reskrim, Dalmas dan Bagian Operasional Polres Bogor Kota).

b. Penegakan Perda dan Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan).

Sidang Tipiring terhadap PKL terlaksana sebanyak 5 kali dengan hasil 115 pelanggar. Hasil dari Sidang Tipiring tersebut adalah keluarnya 44 putusan hakim dan 38 dilimpahkan ke Kejaksaan. Sidang Tipiring dilaksanakan di Jl. Salmun, Jl. Pajajaran, Jl. Dewi Sartika, kawasan Sempur, Jl. Sudirman.

Dalam upaya mendapatkan formulasi terbaik untuk menata PKL, Kantor Koperasi dan UMKM sudah memiliki Master Plan Penataan PKL Kota Bogor. Master Plan Penataan PKL menghasilkan indikasi Program Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Bogor tahun 2014-2034 yang mencakup Gambaran Konsep Penataan PKL, Penurunan Jumlah PKL di lokasi terlarang dan tersedianya Maket Penataan PKL dalam bentuk Buku, Peta dan Gambar. Maksud dan tujuan Master Plan adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RTRW Kota Bogor terkait pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk PKL dalam bentuk pedoman.
2. Menyiapkan rumusan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan perubahan RAPERDA tentang Penataan PKL.
3. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data PKL existing 2013 meliputi karakteristik PKL, domisili PKL, Komoditi PKL, waktu berjualan PKL, titik konsentrasi PKL dan jumlah PKL secara keseluruhan di Kota Bogor dari olahan hasil survey.
4. Melakukan identifikasi pemetaan sebaran PKL berbasis sistem informasi geografis.
5. Melakukan Penataan Lokasi berdagang PKL berdasarkan ketersediaan lahan dan arahan rencana pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan upaya penataan dan pembinaan PKL terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara bertahap oleh pemerintah daerah, DPRD dan *stakeholders* lainnya. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Belum stabilnya kondisi perekonomian menyebabkan adanya PHK dan urbanisasi. Sementara itu, sektor formal memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menampung angkatan kerja. Keadaan ini menjadikan PKL adalah pilihan yang dianggap paling cepat untuk memperoleh penghasilan.
- b. PKL terkonsentrasi di pusat – pusat keramaian di Kota Bogor, seperti di Kecamatan Bogor Tengah (Jl. sawojajar, Jl. Pamada, Jl. Mayor Oking, Jl. Pengadilan, Jl. M.A. Salmun, Jl. Dewi Sartika, Jl. Nyi Raja Permas, Jl. Veteran/Devris, dan Jl. Merdeka).
- c. Keterbatasan jumlah lahan untuk relokasi PKL. Sementara, PKL sering menolak dipindahkan. Alasan PKL tersebut bahwa lokasi baru dianggap tidak menguntungkan, karena lokasi yang jauh dari keramaian dan minim dilalui angkutan umum.
- d. Walau penertiban kerap dilakukan, namun aktifitas PKL selalu kembali muncul di lokasi yang ditertibkan.

Permasalahan-permasalahan di atas tidak dapat begitu saja diselesaikan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, solusi langkah ke depan yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor secara berkelanjutan adalah:

- a. Menyediakan tempat relokasi terhadap para PKL.
- b. Menyediakan tempat khusus sebagai kawasan PKL Binaan yang strategis pasca dilaksanakan penertiban.
- c. Melaksanakan pemantauan/penertiban PKL secara terus menerus oleh Kantor Koperasi dan UMKM dan instansi terkait.

- d. Menjaga lokasi yang telah ditertibkan selama 24 jam, agar PDG tidak berkesempatan kembali beraktifitas lagi di zona tersebut.
- e. Perlu adanya revisi Zona PKL Nomor 511.45-63 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Lokasi Pembinaan dan Penataan Usaha Pedagang Kaki Lima.

Hasil nyata dari pelaksanaan penataan dan penertiban PKL di Kota Bogor selama tahun 2014 adalah Kota Bogor dipilih menjadi salah satu kota binaan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam hal penataan pedagang kaki lima (PKL).PKL yang beroperasi di lima zona yakni Zona Bina Marga, Zona Ekalosari.

2. 6 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2014

Indikator pencapaian kinerja pemerintah Kota Bogor selama tahun 2010-2014,sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2010 - 2014 yang dijabarkan kedalam masing-masing misi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.24
Pencapaian Indikator kinerja Tahun 2010 - 2014
Misi I

No	Nama Urusan	Indikator	Kondisi Existing 2008	Realisasi Pencapaian				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	Perdagangan	Rasio los terisi terhadap jumlah los yang tersedia	34,88%	50%	45%	50%	55%	60%
		Tingkat pengawasan barang beredar dan pengujian mutu barang	50%	53%	56%	60%	62%	65%
		Peningkatan nilai ekspor	144.147.336	151.860.268,9	156.204.592	156.299.627,32	994168.631	175.377.273,76
2	Perindustrian	Jumlah industri kecil dan menengah (kumulatif)	3.028 Unit	3.365 Unit	3.477	3.565	3.408	3.510 Unit
		Jumlah industri yang memanfaatkan teknologi tepat guna	500 Unit Usaha	550	600	655	700	750 Unit Usaha
3	Koperasi/UMKM	Persentase pertambahan UMKM yang dibina dari total UMKM	6%	32,901	2.377/32,901(7,22%)	2.649/33,572(7,89%)	8%	9%
		Persentase koperasi aktif	20%	33,73%	255/756(35,77%)	287/774(37,08%)	20%	353 (17,3 %)
4	Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	913.471 milyar	1.002,67 milyar	7.645.526,58	8.766.879,00*	9.118.606,55	2.805.642.264.788
5	Pariwisata	Laju wisatawan yang berkunjung ke kota bogor	Wisatawan mancanegara 24.385 orang Wisatawan nusantara 1.087.900 Orang	13,16%	3.264.169 (300,04%)	3.592.217 (330,19%)	10%	10% /Tahun
6	Ketenagakerjaan	Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja	8,9%	27,44%	19505/8170 (41%)	6359/8170 (100%)	30%	35%
		UMK yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak	Rp 893.000	Rp 1.079	Rp 1.300	2.002.000	2.002.000	Rp 1.045.52

		(KHL)		.100	.000			1
7	Ketahanan Pangan	Skor PPH	81,1%	92,6%	83	92,6%	85	86%
8	Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi	100 KK	10 KK	N/A	N/A	30KK	150 kk 30KK
9	Pertanian	Jumlah hewan yang dipotong di RPH	10.749 Ekor	20.360	20,515	23.998	25.909	27.829 Ekor
		Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi -tanaman hias, ikan hias, jambu	18 komoditi	21	23	25	26	27 komoditi
		Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar	6	9	9	9	9	9 jenis /Tahun
		Persentase ternak dan unggas yang divaksin (jumlah yang divaksin /total jumlah ternak unggas	555.600 ekor	151.130	201.800	202.450	203.100	203.750 ekor
10	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya penggunaan TTG oleh masyarakat	1 kali	1	2	2	2	2 kali
		Meningkatnya profesionalisme pengelolaan kinerja modal UEK-SP	0	68	68	68	68	68 UEK-SP

Tabel 2.25
Pencapaian Indikator kinerja Tahun 2010 – 2014
Misi II

No	Nama Urusan	Indikator	Kondisi Existing 2008	Realisasi Pencapaian				2014
				2010	2011	2012	2013*	
1	Lingkungan Hidup	Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas air	0	98	98	98	98	98 % /tahun
		Persentase jumlah sampling yang dipantau	100%	100	100	100	100	100% /tahun
		Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara	0	-	80	80	80	80% /tahun
		Persentase jumlah sampling yang dipantau (30 titik lokasi)	100%	100	100	100	100	100% /tahun
		Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas tanah	0	-	-	5	5	5% /tahun
		Persentase jumlah sampling yang dipantau	0	-	10%	10%	10%	10% /tahun
		Persentase usaha /kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan	0	5%	10%	15%	20%	25% /tahun
		Persentase pelanggaran pengelolaan lingkungan	0	100%	95%	90%	85%	80% /tahun
		Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang	0	-	10%	10%	10%	10% /tahun
		Persentase jumlah sampling yang dipantau	0	-	10%	10%	10%	10% /tahun
		Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair	20%	20%	25%	30% (100%)	35%	40%
		Persentase jumlah sampling yang dipantau	20%	20%	30%	40% (100%)	50%	60% /tahun

		Jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	0	-	30 keg	30 keg (100%)	30 keg	30 kegiatan /tahun
		Jumlah biodiesel yang dihasilkan	8.252 liter /tahun	8.760	43.800	16.658 (38,02%)	43.800	43.800 liter /tahun
		Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang kendaraan pengguna biodiesel	0	100%	100%	100%	100%	100% /tahun
		Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan pertahun	3 sekolah	1	1	6 (600%)	1	1 sekolah /tahun
		Jumlah kelompok masyarakat yang terbina aspek lingkungan hidup	0	2	2	2kl (100%)	2	2 kelompok /tahun
		Tingkat ketersediaan SLHD	75%	80%	85%	90% (100%)	95%	100% /tahun
		Jumlah kemitraan	1	1	1	2 (200%)	1	1 kemitraan /tahun
		Persentase luas penanganan lahan kritis (kumulatif)	0,75%	0,85	0,91	2,6% (265%)	1,06	1,13%
		Jumlah mata air yang dilindungi	432	3	5	2 (40%)	5	5 mata air /tahun
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah dalamnya	150 kegiatan usaha/in dustri	150	150	169 (112,6%)	150	150 usaha /tahun
		Jumlah sumber resapan	743 unit	793	843	1.065 (112,94%)	943	993 unit
		Wilayah pelayanan persampahan	69,50%	70%	70,14%	70,21%	70,3%	70,4%
		Luas taman kota dan taman lingkungan	396.256,63 m ²	396.666,63	397.076,63	397.508,63 m ² (37,75)	397.918,63	398.328,63 m ²
		Jumlah titik lokasi PKL	17 Titik	4	4	2	4	3 Titik
2	Pekerjaan Umum	Ketersediaan dokumen perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dan konservasi danau atau situ	3 paket	0	3	0		0 paket
		Luas lahan danau atau situ dan kolam retensi	6 situ	-	-	-		6 situ
		Jumlah danau atau situ dan kolam retensi berkondisi baik	6 situ	6	6	6	6	6 situ dan 2 Kolam retensi
		Terbangunnya danau atau situ dan kolam retensi	0	-	-	1	2	3 kolam retensi
		Ketersediaan dokumen perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi dan sungai	Belum ada	100	100	100	100	100% sesuai penanganan saluran (induk/primer), sungai dan irigasi
		Luas lahan untuk peningkatan kapasitas saluran, sungai dan jaringan irigasi	Belum ada	-	8594,5 m ²	17189 m ²	25783,5 m ²	34.378m ²

	(34.378m2)							
	Panjang saluran, sungai dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai (peningkatan sepanjang 3 km)	Belum ada	-	0,75 km	1,5 km	2,25 km	3 km	
	Panjang saluran dan sungai terkondisi baik (terpelihara)	360 km (panjang saluran eksisting)	73 km	146 km	219 km	292 km	360 km	
	Penurunan luas kawasan genangan banjir	52 Ha	52 Ha	42 Ha	32 Ha	22 Ha	0 Ha	
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jalan, drainase dan jembatan	0	100	100	100	100	100%	(sesuai rencana pembangunan jalan)
	Luas lahan yang disediakan untuk pembangunan jalan dan jembatan	Belum (menyesuaikan panjang jalan)	1 km	3,5 km	7,9 km	6,73 km	Pada 5,9 km	
	Panjang jaringan jalan, (25,03 km)	Belum ada	5,29 %	3,5 km	7,9 km	6,73 km	5,9 km	
	Panjang drainase yang disediakan	Data belum tersedia	21,28 %	2,5 km	2,5 km	2,5 km	2,5 km /tahun	
	Panjang jembatan yang disediakan	Data belum tersedia	1	1	1	1	1 unit /tahun	
	Panjang trotoar yang tersedia	Data belum tersedia	320 m2	300 m2	250 m2	240 m2	1.330 m2	
	Jumlah perencanaan peningkatan jalan, drainase dan jembatan	0	100%	100%	100%	100%	(100%) sesuai rencana pembangunan jalan	
	Luas lahan yang disediakan untuk peningkatan jalan, jembatan dan drainase	Belum (menyesuaikan p.jalan)	15	13,5	15	15,2	Pada 68.4 km	
	Jumlah perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase	0	100%	100%	100%	100%	(100%) sesuai rencana pembangunan jalan	
	Panjang jalan yang berkualitas baik	635 km	39,85 %	635 km	635 km	635 km	635 km /tahun	
	Panjang pedestrian yang berkualitas baik	1.617 km	16,07 %	290	310	330	350 km	
	Jembatan yang berkualitas baik	193 unit	30 unit	30	30	30	30 unit /tahun	
	Leger jalan	Belum ada	20	30	40	50	60.00%	
	Tingkat penyediaan sarana kebinamargaan	Belum ada	65	70	75	80	85%	
	Persentase penduduk berakses air minum	48,02%	62,43 %	57,38	61,72	66,06	70,40%	
	Cakupan rumah tangga bersanitasi /jumlah rumah tangga	78,61%	64,13 %	78,74	78,72	78,82	78,86%	
	Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi)	0	7 lokasi	7	7	7	7 lokasi	
	Jumlah PJU	5.583 titik	5.500 titik	-	20.181	2.081	6.862 titik	
	Response Time kebakaran (menit)	12 menit	11 menit	6262	6462	6666	11 menit	
	Jumlah pembangunan atau perbaikan gedung pemerintah (kumulatif)	5 unit	25 bangunan	11	15	23	25 unit	

		Jumlah bangunan terawasi /tahun (unit)	700 unit	360 unit	420	480	560	650 unit
		Jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan teknis	300 penyedia jasa	60 penyedia jasa	25	25	25	25 penyedia jasa pertahun
		Jumlah bangunan terawasi /tahun (unit)	700 unit	360 unit	420	480	560	650 unit
3	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan kumuh /luas wilayah (kumulatif)	257,59 Ha	7.688,48 m2	247,59 ha	227,59 ha	217,59 ha	297,59 Ha
		Luas tembok penahan tanah (TPT) lingkungan perumahan, yang dibangun atau diperbaiki (kumulatif)	2.725,69 m3	7.402,65 m3	2900	3000	3100	3.200 m3
		Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang dibangun atau diperbaiki (kumulatif)	2.067 m	1.147,98 m	2200	2300	2400	2.500 m
		Jumlah jembatan lingkungan yang dibangun dan diperbaiki	7 unit	17 unit	22 unit	27 unit	32 unit	37 unit
		Jumlah rumah susun	4 twin block	1 unit	1	1	1	4 unit
		Jumlah twinblock yang berkondisi baik	3 twin block	14 unit	4	4	4	4 jenis
4	Perhubungan	Jenis perencanaan perhubungan	4 jenis	5	4	4	8	8 jenis
		Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan	15 km /jam	17	18	19	20	21 km /jam
		Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas perhubungan	6 kegiatan	7	8	8	8	8 kegiatan pertahun
		Jumlah zona kemacetan	14 lokasi	5 zona	-	-	-	3 zona
		Jumlah lokasi pkl	17 titik	1	2	2	1	6 lokasi
		Jumlah trayek penataan shift angkot	0	6	10	15	20	23 trayek
		Jumlah pelanggaran lalu lintas	57 pelanggaran	50	45	40	35	30 pelanggaran
		Jumlah pelanggaran lalu lintas	57 pelanggaran	-	-	-	-	30 pelanggaran
5	Penataan ruang	Jumlah rencana umum dan rencana rinci atau ruang yang sedang disusun	8 jenis dokumen	50%	50	80	90	100%
		Persentase proposal SKPR yang diterima dan jumlah total proposal SKPR	98,76%	88,7%	99	99	99	99%
		Frekuensi penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang	Belum ada	0%	20	50	80	100%

Tabel 2.26
Pencapaian Indikator kinerja Tahun 2010 – 2014
Misi III

No	Nama Urusan	Indikator	Kondisi Existing 2008	Realisasi Pencapaian				2014
				2010	2011	2012	2013	
1	Pendidikan	Angka Melek Huruf	98,70%	98,77	98,79	98,83	99,05	99,16
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	9,60 tahun	9,79	9,80	9,92	9,82	9,96
		APM SD/MI	93%	99,28	97,52	103,06	105	95,40

		APM SMP/MTS	72%	74,27	82,73	77,88	80,20	91.12
		APM SMA/MA/SMK	70%	83,09	79,95	116,48	117,10	87.05
2	Kesehatan	Persentase balita gizi buruk	0,4%	0,38	0,39	0,38	0,37	0.42
		Angka Usia Harapan Hidup	68,68 tahun	68,87	68,97	69,05	69,51	69,62
		Pasien gakin terlayani di sarana pelayanan dasar dan rujukan	100%	100	100	100	100	100%
		Rumah tangga sehat	33,69%	79,50	50.10	51.90	85	62.10
3	Pemuda dan Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga berprestasi	5 organisasi	4 organisasi	7	8	9	10 organisasi
		Persentase organisasi pemuda yang telah aktif dalam menampung kegiatan kepemudaan	30%	30%	50	70	80	90%
4	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase kesertaan KB	75,43%	82,15	82,28%	82,35%	78%	78,25%
		Persentase kelurahan, model PUP	0	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah kader kegiatan tribina PKLK, BLK dan UPPKS	476 kader	940	1010	1131	1102	1.168 kader
		Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan KB	70%	79,79 %	74	76	78	80%
5	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase organisasi perempuan yang berperan aktif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak	50%	71,43 %	60	65	70	75%
		Persentase perempuan berperan aktif dalam pembangunan	50%	34.04 %	60	65	70	75%
		Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap kelurahan dalam kegiatan P2WKSS	100 kk	100 kk	100	100	100	100 %
6	Sosial	Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial / tahun (orang)	14,35%	12,66 7%	14.359	104% 14900/14358	14,35 9%	15.060
		Berkurangnya jumlah anak terlantar	804 anak	704	604	47 (47%)	404	25 orang
		Persentase penurunan jumlah penyandang penyakit sosial	25	25%	15%	10%	5%	0%
		Persentase penanganan bencana	100%	100	100,5% (34020)	101% (38962)	100%	100%
7	Perpustakaan	Persentase rasio siswa yang berkunjung perpustakaan sekolah per siswa sekolah	10%	15%	20%	25%	30%	35%
		Jumlah pengunjung perpustakaan	24.500 orang	32.610	31.000	34.000	37.000	40.000 orang
8	Kebudayaan	Jumlah benda, situs kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	30 Jenis	N/A	N/A	15	30 Jenis
		Jumlah sanggar yang aktif memelihara dan mengembangkan seni	20 sanggar	25 sanggar	26	35	28	29 sanggar
		Jumlah kemitraan dalam bidang pengembangan budaya	0	2 kemitraan	2	2	2	2 kemitraan

9	Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang terlatih dari jumlah tenaga kerja	18.740 orang	1,06 %	0,3	0,5	0,5	0.55%
		Jumlah kejuruan yang memiliki sarana dan prasarana PK memadai	12 kejuruan	12 kejuruan	13	13	13	6 kejuruan
		Jumlah lembaga latihan swasta (LLS) terbina	33 LLS	41 LLS	37 LLS	40 LLS	45 LLS	48 LLS

Tabel 2.27
Pencapaian Indikator kinerja Tahun 2010–2012 Terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2010–2014
Misi IV

No	Nama Urusan	Indikator	Kondisi Existing 2008	Realisasi Pencapaian				2014
				2010	2011	2012	2013	
1	Kependudukan dan catatan sipil	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	76,01%	87,88	78	79	80	94.53
		Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	20%	70%	30	36	45	91.90 %
2	Komunikasi dan informasi	Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah	0%	58	75	80	85	90%
		jumlah SDM terlatih di bidang komunikasi dan informasi	50%	60	65	70	75	85%
		Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa	50%	56	65	70	75	85%
3	Pertanahan	Persentase Luas lahan bersertifikat	71,56%	10,08 %	72,5	73	73,5	74
		Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan	70%	98%	76	77	80	82,5
4	Perencanaan pembangunan	Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan	80%	85	85	90	90	95%
		Tingkat pelaksanaan monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat pencapaian koordinasi pembangunan	100	100	100	100	100	100%
		Peningkatan SDM aparatur Bappeda	30%	40	50	60	70	90%
		Peningkatan Bidang Perencanaan	70%	100	85	90	95	100%
		Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi	-	20	40	60	80	100%
		Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya	20%	20	40	60	80	100%
		Tingkat penyusunan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	20%	20	40	60	80	100%
		Tingkat penyusunan dokumen perencanaan daerah rawan bencana	-	20	40	60	80	100%

5	Statistik	Persentase ketersediaan Data/Informasi statistik daerah	80%	85	90	95%	100	100%
6	Kearsipan	Persentase kelengkapan administrasi kearsipan	80%	90	95	100	100	100%
		Persentase Rata-rata periode pemindahan arsip OPD ke KAPD (ideal 1 x dalam 2 bulan)	50%	43	70	80	90	175%
		Persentase arsip daerah yang terpelihara	50%	100	65	70	75	143,8%
7	Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	N/A	100	100	100	100	100%
		Tingkat kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	65%	N/A	N/A	N/A	N/A	78%
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	N/A	39	39	39	39	450
8	Otonomi Daerah, dst	Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja	Belum ada	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat pelaksanaan monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian tata naskah dinas dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian batas wilayah	25%	74,9 %	60	76	91	30%
		Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat pencapaian penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), evaluasi LAKIP, dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat realisasi agenda kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional OPD/UPTD	100%	95%	95%	95%	95%	100%
		Tingkat ketrampilan aparatur	100%	98%	98%	98%	97%	97%
		Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian internal dan eksternal	3623 orang	2.097 org	N/A	N/A	N/A	1892 orang
		Tingkat produktifitas	60%	55%	60%	65%	70%	75%

		aparatur						
		Tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian	15%	13%	12%	11%	10%	10%
		Persentase Pembinaan	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	50%	69,23 %	80%	80%	85%	90%
		Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain, dan antara daerah dengan kota-kota di luar negeri	-	80%	80%	80%	80%	80%
		Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	80%	85%	90%	90%	95%	95%
		Waktu proses perijinan	Maks 18 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	Maks 5-14 hari kerja
		Tingkat penyelesaian produk hukum daerah	100%	98%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketercapaian rapat kerja dewan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
9	Pemberdayaan masyarakat	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	50%	84%	85%	85%	70%	75%

2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian terdapat permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan dan telah mengakibatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terrealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2010-2014.

2.7.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

a. **Transportasi**

Sarana transportasi di Kota Bogor yang belum berstandar minimal dan hal ini tercermin dari adanya titik-titik rawan kemacetan di berbagai wilayah Kota dan kesemrawutan lalu lintas.

1. Kualitas pelayanan transportasi umum yang kurang memadai.
2. Lintasan angkutan barang yang belum teratur.
3. Rendahnya disiplin masyarakat dalam bertransportasi.
4. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mentaati rambu lalu lintas.

b. **PKL:**

1. Kesadaran para pelaku usaha informal masih rendah
2. Konsistensi dalam penegakan hukum dan penertiban PKL belum optimal

c. **Kebersihan:**

1. Volume sampah terangkut terhadap jumlah timbunan sampah belum seimbang
2. Sarana angkutan sampah yang belum memadai.

d.

Kemiskinan:

1. Rendahnya kesempatan kerja bagi Keluarga Miskin
2. Rendahnya Pendidikan Keluarga Miskin
3. Aksesibilitas transportasi, sarana pendidikan, kesehatan yang belum merata.
4. Daya beli atau pendapatan kepala keluarga yang masih rendah. termasuk aksesibilitas terhadap sarana perekonomian

2.7.2 Permasalahan Pembangunan

1.

Pendidikan

Antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup :

- ✓ Mutu dan akses pelayanan pendidikan masih belum merata
- ✓ Penyediaan sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- ✓ Masih terdapat Masyarakat yang masih Buta Aksara dan putus jenjang.
- ✓ Ruang kelas yang belum memadai.

2.

Kesehatan

Antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup :

- ✓ Mutu layanan kesehatan yang masih belum merata dan belum memadai
- ✓ Masih rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- ✓ Masih terdapat penyakit yang disebabkan oleh faktor epidemi.
- ✓ Masih terdapat anak balita gizi kurang

3.

Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi dan olah raga tradisional di lingkungan masyarakat, serta olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Kota Bogor dalam pentas kompetisi olahraga nasional. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

4.

Pemberdayaan perempuan dan

Perlindungan Anak

Masih sangat terbatasnya program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha. Di samping itu masih terdapat perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak.

5.

Budaya

Potensi dan kearifan budaya lokal (*indigeneos knowledge*) sebagai modal sosial dalam pembangunan, belum tergali dan dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu perlu ditingkatkan ketahanan budaya masyarakat akibat imbas pengaruh globalisasi.

6.

Sosial

Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir yang menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

7.

Penanaman Modal

Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan belum mampu menyediakan lapangan/ kesempatan kerja untuk mengimbangi jumlah penganggur/ pencari kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kota Bogor, antara lain:

- ✓ Belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung.
- ✓ Ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di Kota Bogor belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.

8.

Otonomi Daerah

Permasalahan dalam urusan otonomi daerah adalah perlunya peningkatan penatausahaan keuangan yang akuntabel, penataan organisasi, penataan naskah dinas, penataan perijinan, peningkatan pelayanan publik. Pendayagunaan aparatur sesuai dengan keahlian (reformasi birokrasi), pembangunan sarana kantor yang memadai, peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Permasalahan lain yang memerlukan perhatian adalah pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Kota Bogor

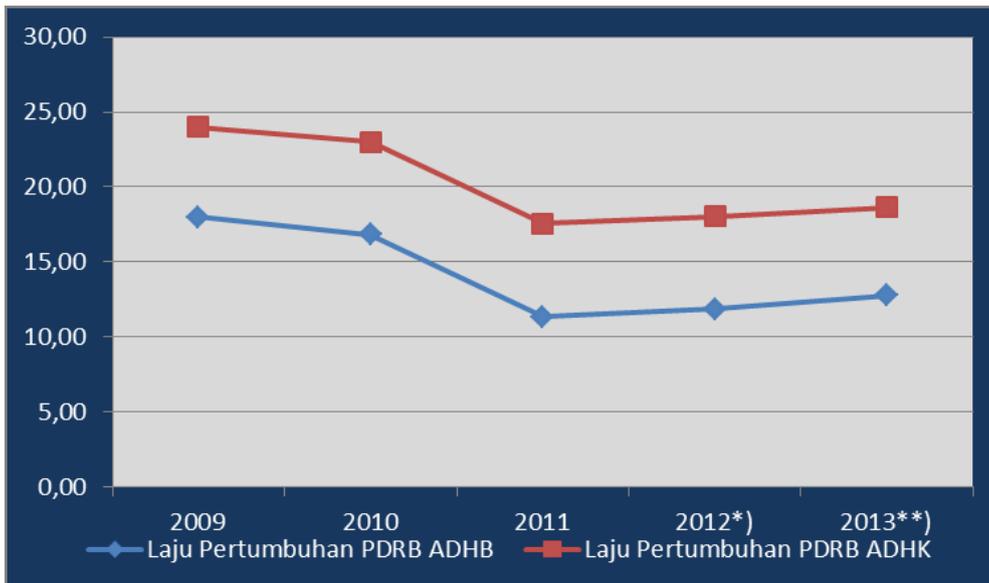
Salah satu indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang bisa dilihat dari pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini menunjukkan perkembangan /pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut menurut sektor pada kurun waktu tertentu. Dari angka PDRB yang disajikan menurut sektor, dapat terlihat struktur perekonomian suatu daerah, sektor dominan yang menunjukkan karakteristik lapangan usaha masyarakat wilayah tersebut, juga peranan masing-masing sektor atau kontribusinya terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan. Untuk lebih jelas melihat Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor menurut Sektor Lapangan Usaha disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012-2013 (%)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	2012	*2013	2012	*2013
Pertanian	7,67	9,49	2,22	1,95
Pertambangan & Penggalian	-2,57	-0,31	-9,20	-6,90
Industri Pengolahan	14,59	12,63	6,14	6,14
Listrik, Gas dan Air Bersih	12,23	6,92	7,02	1,72
Bangunan	9,18	10,90	4,02	3,25
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,58	11,29	5,31	5,27
Angkutan dan Komunikasi	10,10	18,14	7,03	6,59
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13,94	13,81	8,51	7,71
Jasa-jasa	9,93	9,32	5,22	4,72
PDRB	11,86	12,77	6,16	5,86

Untuk melihat perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB pada kurun waktu 2009 - 2013 disajikan pada grafik 3.1

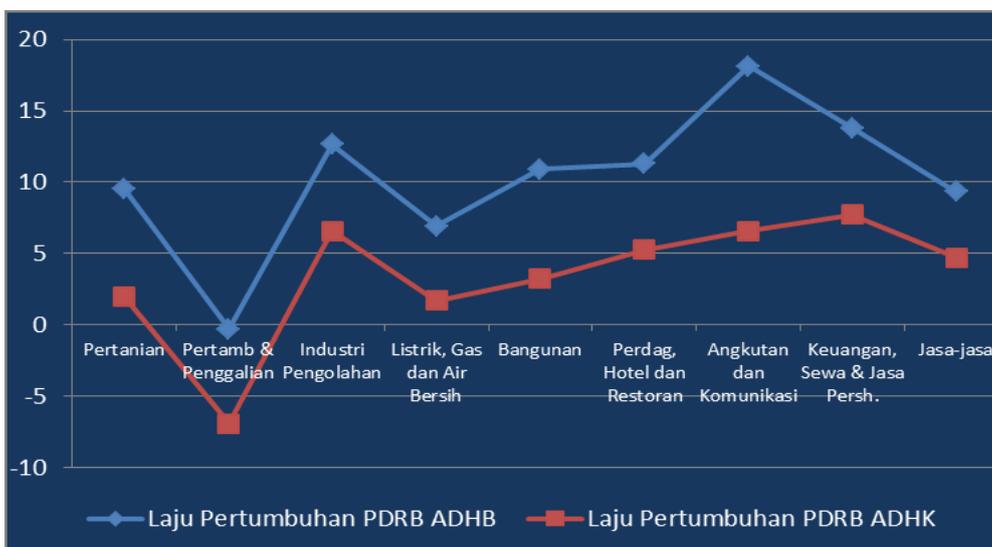
Gambar 3.1
Grafik 2. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Tahun 2009
- 2013 (%)



Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2014

Pada grafik 2 terlihat bahwa selama 2009-2010 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (yaitu PDRB yang dinilai berdasarkan harga tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi, biaya antara, maupun komponen nilai tambahnya) mengalami sedikit penurunan. Tetapi mulai tahun 2010-2011 pertumbuhannya semakin melambat, dan pertumbuhan mengalami percepatan kembali pada periode 2011-2013. Sebaliknya pada Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, (yaitu PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun dasar dalam hal ini tahun 2000 sehingga terlihat perubahan kuantitas produk secara lebih nyata) selama 2009-2012 rata-rata sebesar 6 persen dan sedikit melambat pada tahun 2013, yaitu sebesar 5,86 persen. Untuk melihat perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB antar Sektor Tahun 2013 disajikan pada grafik 3.2

Grafik 3.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Antar Sektor Kota Bogor Tahun 2013 (%)



Pada grafik 3.2 terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Bogor

merupakan struktur yang didominasi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan (Sub Sektor Industri Non Migas) dan Sektor Angkutan dan Komunikasi. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu sebesar 18,14 persen dan Sektor yang pertumbuhannya negatif adalah Sektor Pertambangan dan Pengolahan sebesar minus 0,31 persen.

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan paling tinggi pertumbuhannya yaitu 7,71 persen. Sedangkan sektor yang pertumbuhannya negatif adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan yaitu minus 6,90 persen dikarenakan terjadinya penurunan kuantitas yang sangat signifikan selama tahun 2013 pada sektor ini.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan PDRB yang disebabkan faktor perubahan kuantitas tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat digunakan sebagai alat analisis yang lebih valid untuk melihat perkembangan produktivitas secara riil di suatu wilayah pada suatu periode tertentu karena mengabaikan pengaruh fluktuasi harga secara umum.

Untuk lebih jelasnya gambaran kemajuan ekonomi suatu daerah biasanya dilakukan pengelompokan sektor ekonomi yang terdiri atas :

Sektor Primer, yaitu Sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalan

Sektor Sekunder, yaitu Sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari Sektor Primer maupun dari Sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas dan Air Minum dan Sektor Bangunan (Konstruksi).

Sektor Tersier atau dikenal sebagai Sektor Jasa, yaitu Sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk Jasa. Sektor yang tercakup adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa.

Bila Lapangan Usaha dikelompokkan kedalam kelompok Sektor Primer, Sekunder dan Tersier, maka Laju Pertumbuhan Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2013, masing-masing 9,42 persen, 12,05 persen dan 13,16 persen. Pengaruh harga yang cenderung meningkat dan tinggi di Sektor Tersier, yaitu Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengakibatkan Laju Pertumbuhan Sektor Tersier cukup tinggi.

Sedangkan Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2013 masing-masing 1,89 persen, 5,60 persen dan 6,04 persen. Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pertumbuhan sektor tersier mengalami pertumbuhan tercepat dibanding sektor primer dan sekunder dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013 sektor tersier tumbuh sebesar 6,04 persen. Pertumbuhan yang cukup cepat di sektor ini dipicu juga oleh makin melambatnya pertumbuhan sektor primer dan sektor sekunder di Kota Bogor. Sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan perusahaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa berkembang cukup pesat di Kota Bogor karena hal ini sesuai dengan karakteristik perekonomian perkotaan secara umum.

Untuk melihat Laju Pertumbuhan menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Sektor Tersier dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kelompok Sektor Tahun 2012-2013

KELOMPOK SEKTOR	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	2012	2013	2012	2013
Primer	7,59	9,42	2,14	1,89
Sekunder	13,63	12,05	5,85	5,60
Tersier	10,95	13,16	6,37	6,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11,86	12,77	6,16	5,86

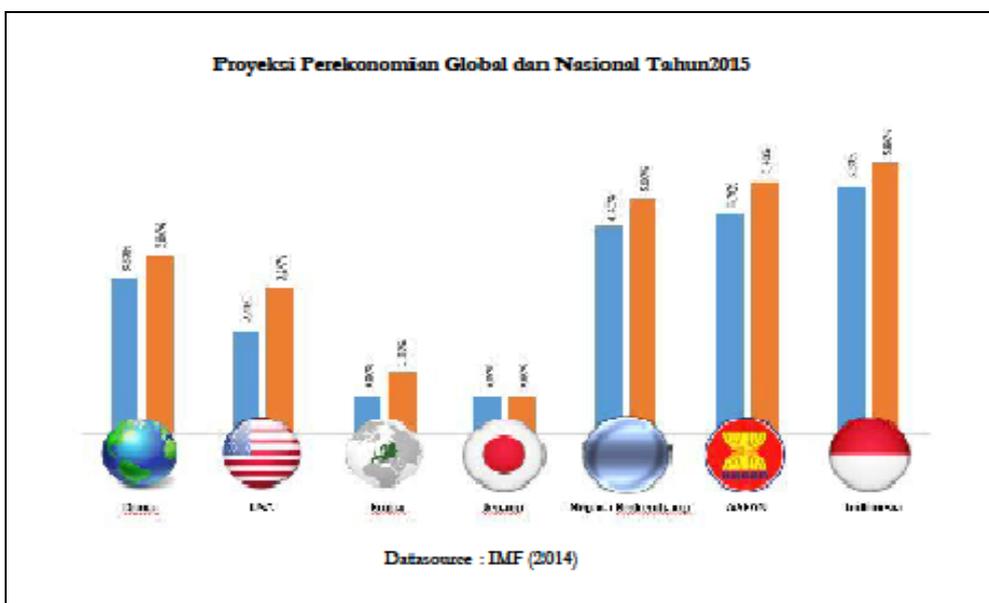
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk sektor sekunder mengalami laju tertinggi yaitu sebesar 13,63 persen di tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 sektor tersier mengalami laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,16 persen. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan, sektor tersier menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,37 persen pada tahun 2012 dan sebesar 6,04 persen pada tahun 2013 ini menunjukkan bahwa sektor tersier pertumbuhannya riil dipengaruhi oleh peningkatan kuantitas produksinya.

Sektor primer merupakan sektor dengan pertumbuhan paling lambat selama periode 2012-2013, karena sektor primer bukan merupakan sektor potensi di daerah perkotaan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor

3.1.2.1. Global dan Nasional

Proyeksi perekonomian global dan nasional Tahun 2015 berdasarkan sumber dari IMF, ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Berdasarkan gambar tersebut, kondisi ekonomi internasional dan nasional secara umum diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan meningkat dari 3,3 persen pada 2014 menjadi 3,8 persen pada Tahun 2015. Begitupun dengan Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan meningkat dari 2,2 persen menjadi 3,1 persen. Perekonomian Eropa juga akan memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, LPE positif sebesar 0,8 persen pada Tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 1,3 persen di Tahun 2015. Jepang diperkirakan akan tetap tumbuh stabil di angka 0,8 persen, walaupun dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sehingga target tersebut masih dalam skenario pesimis

Di negara berkembang pertumbuhan PDB secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat dari 4,4 persen pada Tahun 2014 menjadi 5 persen pada Tahun 2015, sedangkan ASEAN diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari 4,7 persen menjadi 5,4 persen. Kondisi tersebut jelas sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia karena diharapkan dapat memicu peningkatan ekspor dan investasi di berbagai sector

Membaiknya kondisi perekonomian secara global, diharapkan mampu mendongkrak kondisi perekonomian Indonesia menuju 5,8% pada Tahun 2015 (ADB, 2014). Angka tersebut mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RAPBN 2015 yang berada di kisaran 5,4%-5,8%. Angka tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang akan berada diatas 5,8% mengingat Jawa Barat selalu berada di atas nasional dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif terhadap indikator makroekonomi dan pembangunan secara keseluruhan mengingat Jawa Barat harus berupaya keras untuk dapat memperbaiki *Quality of performance* (kinerja) yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, masih disertai rendahnya kualitas dari indikator pembangunan yang ada seperti tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Gini Rasio).

Asumsi dasar ekonomi makro nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diproyeksikan pada APBN perubahan mencapai 5,7 %, dan pada tahun 2016 diproyeksikan berkisar antara 5,8 -6,6 %, inflasi pada tahun 2015 diproyeksikan dalam APBNP mencapai 5,0 % dan pada tahun 2016 diproyeksikan berkisar antara 3,0 -5,0 %, tingkat bunga, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, *lifting* minyak dan *lifting* gas pada tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro (realisasi 2015 dan 2016)

Indikator	2015		2016
	APBNP	Outlook	
a. Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,7	5,2 - 5,7	5,8 - 6,6
b. Inflasi (% yoy)	5,0	4,0 - 5,0	3,0 - 5,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,2	5,0 - 7,0	4,0 - 6,0
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	12.500	12.500 - 13.000	12.800 - 13.200
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	60	55 - 60	60 - 80
f. Lifting Minyak (ribu barell per hari)	825	825	830 - 850
g. Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.221	1.221	1.100 - 1.200

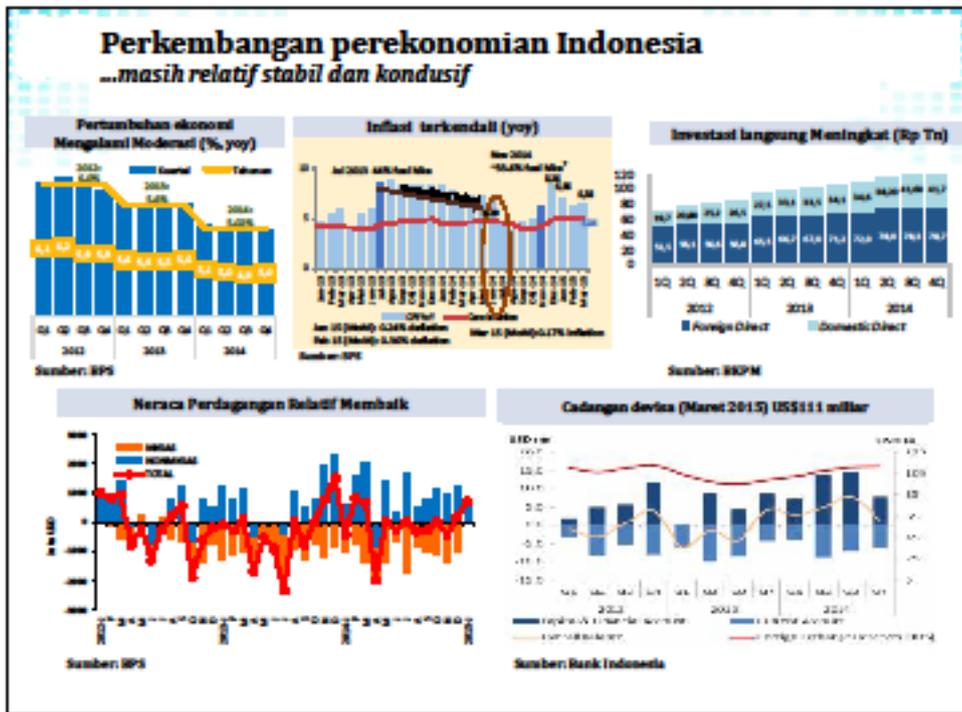
Walaupun mengalami pergeseran dari *track* awal, laju pertumbuhan ekonomi tetap menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat yang dipengaruhi :

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur
2. Perkembangan investasi dan iklim usaha yang ditunjang oleh peningkatan financial deepening dan inflasi yang cukup rendah dan stabil.
3. Arah kebijakan penguatan dan revitalisasi industri domestik
4. Insentif fiskal yang terukur dan tepat sasaran untuk mendorong investasi dan perbaikan iklim usaha
5. Perbaikan kualitas SDM meningkatkan produktivitas
6. Fundamental dan stabilnya kondisi ekonomi makro

Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan tahun 2007-2010. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 %, namun terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional. Meskipun penurunan itu relatif kecil, tetapi berimplikasi pada peningkatan pengangguran yang terjadi pada kelompok SMA/SMK.

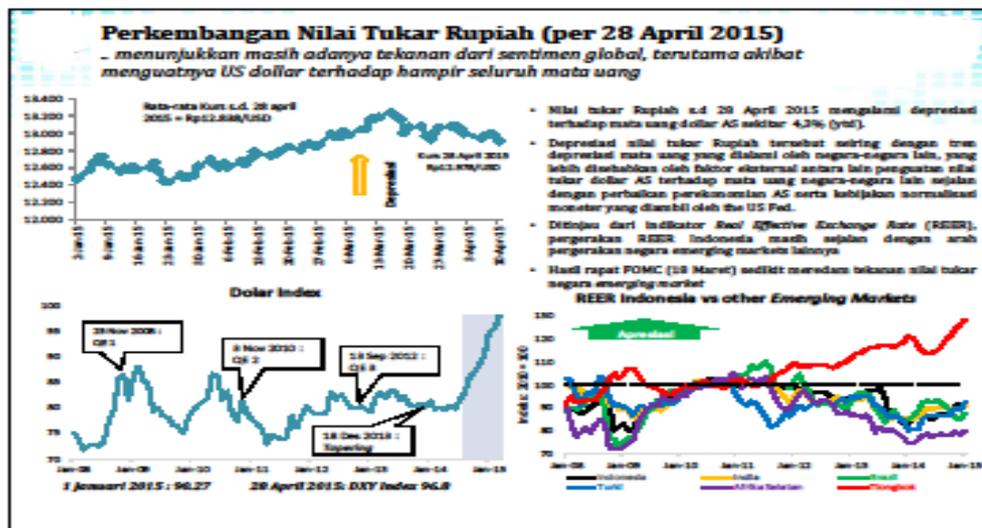
Perkembangan perekonomian Indonesia masih relatif stabil dan kondusif yang dibuktikan dengan nilai investasi yang terus meningkat, dan neraca perdagangan relatif stabil sebagaimana grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan Perekonomian Indonesia



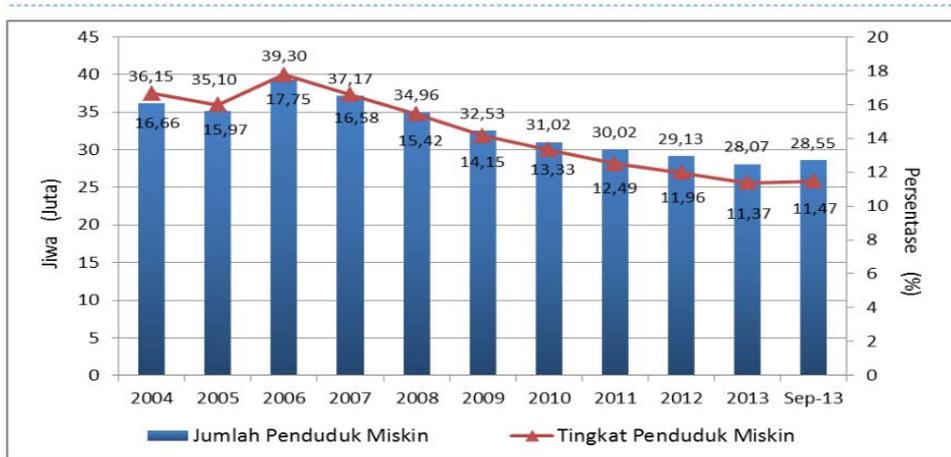
Sedangkan perkembangan nilai tukar rupiah menunjukkan masih adanya tekanan dari sentimen global, terutama akibat munguatnya US dolar terhadap hampir semua mata uang termasuk rupiah. sebagaimana grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2
Perkembangan Nilai Tukar Rpiyah terhadap Dolar Amerika



Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%), dengan rincian sebagaimana grafik 3.3 berikut :

Grafik 3.3
Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2004 -2013



Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Nasional diperkirakan mencapai 5,5 % - 6,3 %, inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 % \pm 1 %, tingkat kemiskinan diperkirakan berkisar antara 9 - 10 persen dan tingkat pengangguran diperkirakan berkisar antara 5,7% - 5,9 %.

1.1.2.2. Provinsi Jawa Barat

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat hingga triwulan III Tahun 2014 mencapai 5,61 %. Sementara pada triwulan II sebesar 5,63% dan triwulan I hanya 5,49%. Dengan pencapaian demikian, tampaknya hingga akhir Tahun 2014, LPE Jabar tidak akan lebih dari 5,8%. Inflasi posisi Oktober 2014 (*yoy*) sebesar 4,04 %. Kenaikan BBM sebesar Rp 2000 pada bulan November akan meningkatkan inflasi sehingga di akhir Tahun kemungkinan besar di atas 5%. Tingkat pengangguran sebesar 8,45% pada posisi Agustus 2014, menurun cukup signifikan dibandingkan akhir Tahun 2013 yang mencapai 9,22%. Tingkat kemiskinan posisi Maret 2014 masih berada di level 9,44%, tidak jauh berbeda dengan akhir Tahun 2013, yakni 9,61%.

Tabel 3.4
Poyeksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat Tahun 2015-2016

Uraian	Tahun	
	2015	2016
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,6 - 6,3	6,3 - 6,9
2. Inflasi	4,7 - 5,5	4,5 - 5,5
3. Kemiskinan	6,8 - 5,9	5,9 - 5,5
4. Laju Pertumbuhan Investasi (persen)	9,3 - 9,5	9,3 - 9,5
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	8,2 - 8,4	7,5 - 7,0

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Hasil analisis *tren*, LPE Jawa Barat di Tahun 2015 berada di rentang 5,65% - 6,35%. Meningkatnya LPE dibanding ini terkait peluang pertumbuhan tinggi di sektor-sektor *non tradeable* terutama sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran dan Jasa-jasa. Selain itu meningkatnya LPE dunia akan mendorong peningkatan ekspor Jabar dan investasi yang masuk

Proyeksi angka tersebut cukup rasional jika dikaitkan dengan kemampuan menyerap investasi selama ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Rata-rata efisiensi investasi atau *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Jawa Barat 2009-2013 sebesar 3,08. Pertumbuhan dalam range 5,5%-6,0% yang membutuhkan investasi antara Rp 70-80 trilyun rupiah (harga konstan). Angka tersebut tidak sulit dicapai jika upaya kinerja menarik investasi selama ini dapat dipertahankan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan agar Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 tetap di atas nasional. Kedepan Jawa Barat akan mulai *concern* kepada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pangan, agar tidak hanya memproduksi *raw material* namun harus sudah mulai mengangkat nilai tambah (*value*). Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan industri kreatif akan mendapatkan prioritas mengingat dua sektor tersebut merupakan sektor yang paling memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Inflasi Jawa Barat Tahun 2015 diperkirakan 6,0%-6,4% karena masih adanya efek kenaikan harga pasca kenaikan harga BBM November 2014. Hasil perhitungan Tim Ekonomi Makro Bappeda Provinsi Jawa Barat memang agak berbeda, karena kenaikan harga BBM 1% akan meningkatkan inflasi Jawa Barat sebesar 0,054%, sehingga prediksi inflasi Tahun 2015 di kisaran 4,7%-5,5%. Tidak mungkin di Tahun 2015 meningkat lagi lebih dari 5,5%, apalagi jika pemerintah kembali menyesuaikan harga BBM dengan penurunan harga minyak mentah dunia, sangat dimungkinkan inflasi berada di kisaran 4%. Meski sempat menghentak publik, kebijakan kenaikan BBM di akhir Tahun oleh Pemerintah Jokowi telah dilaksanakan. Sektor pemerintah dan swasta harus dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan dan bisnis dengan lebih baik di awal. Kinerja inflasi memang ditentukan oleh kebijakan harga yang diputuskan oleh pemerintah. Karena itu inflasi Jabar pernah tinggi saat ada pengurangan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah pada 2008 dan 2013

Sementara untuk angka pengangguran, berdasarkan pola sebelumnya, pada 2015, diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan yang tidak terlalu besar dan berada di kisaran 8,2%-8,4%. Dari 9 sektor lapangan usaha, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih tetap menduduki potensi penyerapan tenaga kerja yang paling besar. Dalam beberapa waktu terakhir mulai ada pembangunan hotel-hotel berbintang di wilayah Karawang dan Cirebon. Beberapa program pemerintah dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur akan membantu dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui program seperti pembangunan waduk dan saluran irigasi.

Tahun 2015 juga memberikan tantangan dengan mulai berlakunya agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015. Tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat adalah bagaimanapun menciptakan produk inovatif yang berdaya saing tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur, dan teknologi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya keras mempersiapkan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan industri kreatif serta terus menerus memperkenalkan kepada masyarakat hasil produksinya. Jawa Barat merupakan bagian dari masyarakat global, untuk itu

perlu mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi tantangan dalam persaingan MEA 2015.

3.1.2.3.Kota Bogor

Dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025, tercantum Misi pertama yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pada tahun 2015-2019 arah pembangunan Kota Bogor lebih difokuskan pada sektor tersier sebagai sektor unggulan pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi, mempertahankan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung perekonomian Kota Bogor

Tantangan paling besar adalah masih besarnya jumlah pencari kerja yang mencapai 15.309 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 6.359 orang. Peningkatan terjadi akibat beberapa faktor, terutama ketersediaan lowongan kerja pada tahun 2013 yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2012.

Pada tahun 2013, tersedia 4.843 lowongan kerja, sedangkan pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 8.170. Pada saat yang sama, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor belum dapat mengisi seluruh lowongan yang tersedia. Hal ini antara lain akibat kompetensi yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan yang tersedia dan lowongan pekerjaan kurang/ tidak diminati oleh para pencari kerja.

Tantangan lainnya adalah keberadaan jumlah organisasi ketenagakerjaan yang mencapai 21. Terdiri dari 20 organisasi pekerja yang beranggota 6.102 orang dan 1 organisasi pengusaha yaitu APINDO yang beranggota 40 perusahaan. Penanganan masalah ketenagakerjaan memiliki daya dukung, karena ada 24 Bursa Kerja Khusus (BKK) yang diselenggarakan. Terdiri dari bursa kerja yang berada di lingkungan satuan pendidikan menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja. Juga ada 7 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang merupakan lembaga berbadan hukum dan memiliki ijin untuk melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta ada 50 Lembaga Pendidikan Keterampilan yang aktif dari 68 lembaga serupa di Kota Bogor.

Daya dukung lain adalah jumlah perusahaan yang pada tahun 2013 mencapai 944 unit. Terdiri dari perusahaan skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Jumlah tersebut meningkat 100 perusahaan dibanding tahun 2012.

Laju inflasi Kota Bogor pada bulan Maret 2014 sebesar 0.28 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 112.43. Inflasi terjadi karena secara umum ada kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks, serta deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks. Perubahan indeks tersebut yaitu : Kelompok bahan makanan 0.03 persen; Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0.72 persen; kelompok pendidikan rekreasi, dan olah raga 0.07 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0.06 persen.

Di sisi lain pemberlakuan pasar bebas akan mempengaruhi industri kecil di Kota Bogor dalam menghadapi persaingan, baik dalam hal mutu produk maupun faktor produksi diantaranya SDM. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Bogor di tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian Kota Bogor diperkirakan akan lebih baik dan diharapkan dapat tumbuh mencapai

6,0%-6,5%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 13, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Berdasarkan data series kurun waktu 2014-2015, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara konsisten mengalami kenaikan, begitu juga dengan kelompok dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan peningkatan baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah, seperti terlihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Pendapatan Kota Bogor Tahun 2015 dan Target Tahun 2016

NO.	PELAKSANA / JENIS PUNGUTAN	Tahun 2015	Target 2016
1	2	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	617,062,227,085	625,332,839,673
1	Pajak Daerah	395,428,650,000	404,615,000,000
2	Retribusi Daerah	57,149,708,057	58,344,130,510
		25,256,473,551	15,996,857,686
3	Bagian Laba Usaha Daerah		
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		146,376,851,477
4		139,227,395,477	
	DANA PERIMBANGAN	840,331,669,000	831.404.969.000
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak	60,835,650,000	93.571.811.000

2	Dana Alokasi Umum	737.833.158.000	737.833.158.000
3	Dana Alokasi Khusus	8.926.700.000	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	369,614,377,843	401.452.817.607
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	165,521,033,843	197,359,473,607
2	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	201,093,344,000	201,093,344,000
3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3,000,000,000	3.000.000.000
	JUMLAH	1,827,008,273,928	1.858.190.626.280

Sumber : BPKAD Kota Bogor

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah yang berpotensi besar adalah pajak restoran yang juga menunjukkan peningkatan. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak daerah menunjukkan tren meningkat. Hal ini, antara lain disebabkan adanya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada kabupaten/kota, sehingga terjadi pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Provinsi ke Kabupaten / Kota, yaitu untuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dimana setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak sebesar 20% dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimana dikenakan pajak sebesar 5%.

Dengan demikian dari ketiga komponen pendapatan tersebut, pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.827.008.273.928,00 sedangkan Tahun 2016, ditargetkan pendapatan daerah mencapai Rp. 1.858.190.626.280,00. Target pendapatan daerah Tahun 2016 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan pajak dari PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2) yang dialihkelolakan menjadi pajak Daerah Kota Bogor.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2015 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Bogor sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan OPD Penghasil;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi daerah;

6. Meningkatkan peran OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
8. Memberikan penghargaan kepada OPD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama, termasuk penanganan 6 Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2015-2019 yaitu: Penataan Transportasi dan Angkutan Umum, Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, Penataan dan Pemberdayaan PKL, Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan RTH, Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi serta Penanggulangan Kemiskinan.

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pemanfaatan alokasi belanja diupayakan agar bisa efisien, efektif, dan proporsional.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2016 tetap diarahkan untuk mendukung peningkatan IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM Kota Bogor pada akhir tahun 2019 mencapai 79,77% yang diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan target pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dituangkan dalam tabel 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 dan Target 2016

URAIAN	Tahun 2015	Target 2016
BELANJA DAERAH		
BELANJA TIDAK LANGSUNG		
Belanja Pegawai	818,447,053,251	982.136.463.901
(Bel. Tidak Langsung)		
Belanja Bunga	6,603,600,000	6,603,600,000
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah	45,274,828,729	30.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	49,274,000,000	59.274.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	1,115,203,192	1,115,203,192
Belanja Tidak Terduga	12,202,182,360	12,202,182,360
JUMLAH BELANJA	932,916,867,532	1.091.331.449.453
TIDAK LANGSUNG		
BELANJA LANGSUNG		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,105,630,661,497	1,659,953,036,876
JUMLAH BELANJA DAERAH	2,038,547,529,029	2,751.284.486.329

Sumber : BPKAD Kota Bogor

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yaitu:
 - 1) Penataan transportasi dan angkutan umum
 - 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
 - 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan strategi
 - 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
 - 6) Penanggulangan Kemiskinan
- d. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus mengalokasikan 20 %. Alokasi anggaran tidak termasuk untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam upaya peningkatan indeks pendidikan yang meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menuju 10% sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak.
- f. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- g. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah.
- h. Peningkatan efektivitas penggunaan dana PDPMK oleh masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Bogor dengan masyarakat melalui kelurahan;

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pembiayaan daerah tahun 2015, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SILPA yang relatif besar ini, terutama disebabkan melebihi target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Besaran SiLPA dari kegiatan yang belum terlaksana ditargetkan/diupayakan terus menurun, sehingga disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaan semakin mengecil.

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan dapat ditempuh melalui:

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya).
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri atau dalam bentuk pinjaman lainnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.

Adapun pembiayaan tahun 2015 dan target tahun 2016 penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tabel 3.9. dibawah ini :

Tabel 3.9.
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Target Tahun 2016

URAIAN	Tahun 2015	Target Tahun
		2016
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	211,539,255,101	50.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Penerimaan Pengembalian Pinjaman Daerah		
Penerimaan Piutang Daerah	936,048,000	936,048,000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	212,475,303,101	50.936.048.000

Sumber : BPKAD Kota Bogor

3.2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagaimana tabel 3.10. berikut:

Tabel 3.10.

**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2015 dan Target Tahun 2016**

URAIAN	Tahun 2015	Target Tahun 2016
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
Pembentukan Dana Cadangan		-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang		
Pemberian Pinjaman Daerah	936,048, 000	936,0 48,000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	936,048 ,000	936,0 48,000
PEMBIAYAAN NETO	211,539,255 ,101	50.000.00 0.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	

Sumber : BPKAD Kota Bogor

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Daerah tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019. Pembangunan menekankan pada diversifikasi pembangunan Kota Bogor menuju pemantapan terwujudnya visi pembangunan secara menyeluruh, untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2019 yaitu:

“Kota Bogor yang Nyaman, Beriman dan Transparan”

Untuk mempercepat pencapaian Visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2015-2019, ditetapkan 6 misi yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan implementasi e-government	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara <i>online</i> yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan

	komunikasi	produktif di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>eliteracy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.
2. Menciptakan Lingkungan Belajar Dengan Modal Sosial yang Kuat	Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
	Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat	Menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif
3. Mendorong Proses Pengambilan Keputusan Publik yang Cerdas	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Mengembangkan sistem perencanaan dan <i>monev</i> pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis
	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan	Perhatian perlu diberikan pada fenomena kelelahan berpartisipasi” (<i>participation fatigue</i>), dimana masyarakat
	Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan	jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
	Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir	Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. <i>Baseline</i> data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung

		pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline</i> data dan <i>decision supporting system</i> .
4. Mengembangkan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan Dalam Upaya Mencetak Generasi Muda yang Tangguh dan Berkompeten	Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas
	Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kesadaran Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Hidup Dan Berperilaku Sehat	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan

		program nasional khususnya BPJS.
	Menurunnya kasus penyakit menular	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular
	Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia.
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, <i>redesign</i> permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.
	Berkurangnya kawasan pemukiman kumuh	
	Tersedianya pelayanan air minum yang memadai	
3. Merevitalisasi Ruang Perkotaan yang Lebih Sehat dan Nyaman untuk Semua Elemen Masyarakat (Termasuk Anak, Perempuan, Lansia, Dan Difabel)	Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna	Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka
	Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang public	

		pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota
4. Meningkatkan Ketahanan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pemngembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan
5. Meningkatkan Produktifitas dan Akses Masyarakat Terhadap Penghidupan yang Layak	Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	Mengembangkan sistem ketenaga kerjaan terpadu melalui pemngembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang <i>up-to-date</i> dan iklim bekerja
	Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat	
	Berkembangnya Agribisnis perkotaan	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang

		produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan
	Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan

3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengem balikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian
	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	
	Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimisasikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.
	Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan
	Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.
	Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Mewujudkan kota <i>riverfront</i> melalui sterilasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.

	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.
3. Mengembangkan Transportasi Kota yang Mengutamakan Angkutan Umum Massal, Pejalan Kaki dan Pesepeda	Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport Improvement Project</i> (SUTIP GIZ) akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.
	Berkurangnya kemacetan	Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir. Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan pada akuisisi lahan dan land banking
4. Mendorong Pembangunan Kota yang Tanggap Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-
	Meningkatnya tanggap darurat saat bencana	
	Meningkatnya	

	pemulihan pasca bencana	sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .
	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	
5. Menerapkan Pengelolaan Sampah yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem <i>sanitary landfill</i> serta pelayanan pengangkutan sampah.
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (<i>Reuse Reduce Recycle</i>) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.
	Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat	

4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Menjadikan Warisan Budaya Sebagai Aset Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi
	Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi,
	Tersedianya	

	kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya	kemitraan antar pihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya
2. Menguatkan Identitas dan Citra Kota Bogor (<i>City Branding</i>)	Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Menguatkan fungsi Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai pusat identitas Kota Bogor melalui perencanaan kawasan penyangganya
	Diterapkannya konsep perencanaan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> , yang meningkatkan citra kota	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan <i>City Branding</i>
	Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang pertanian dan botani	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
	Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events</i>)	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.
3. Mengembangkan Pariwisata Kota Bogor yang Berkarakter	Berkembangnya destinasi wisata	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi antara pengembangan paket, dengan sarana prasarana, promosi dan
	Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata	

		pemasaran pariwisata.
4. Mengembangkan Iklim Ekonomi Kreatif	Terciptanya iklim industri kreatif	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut:
	Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Creative-waves</i>, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2. <i>Creative-network</i>, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3. <i>Creative-preneur</i>, yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan
	Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	Dibutuhkan model <i>triple-helix</i> dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap

		pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka
	Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik	
2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional	Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup	Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pembangunan dalam bidang - bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam Konstelasi Jabode tabek-punjur
	Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional	
3. Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Kota Dengan Elemen Masyarakat	Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.
	Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki focus terhadap pemb kota	
	Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai	Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan

	perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan
	Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis
4. Menguatkan Perundangan Daerah	Tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis	Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah
	Harmonisnya perundangan daerah	
	Tegaknya perundangan daerah	Menegakkan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Kemanusiaan Dalam Implementasi Kehidupan	Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas dan penyakit masyarakat
2. Mendorong Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.
	Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media

<p>3. Mendorong Peran Lembaga-Lembaga Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Umat</p>	<p>Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat</p>	<p>Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.</p>
--	--	---

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031 menetapkan Wilayah Pengembangan (WP), dan Sub Wilayah Pengembangan (SWP). Ditetapkan dengan mempertimbangkan batasan fisik, batasan administrasi, kesesuaian karakteristik alam dan pemanfaatan lahan, kesamaan tipologi penanganan, kesatuan cakupan pelayanan dan posisinya dalam struktur kota. WP A disebut juga dengan wilayah pusat kota; Pembagian Rencana Pengembangan WP dan SWP adalah sebagai berikut :

- a. WP A disebut juga dengan wilayah pusat kota, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional di sepanjang koridor jalan utama seperti Jalan Raya Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan;
 2. Revitalisasi kawasan Stasiun Kereta Api Bogor, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta Kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya
 3. Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur, terutama yang berlokasi pada bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane dan Sungai Cipakancilan dengan mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman; dan
 4. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan
- b. WP B terdiri dari 2 SWP yaitu SWP B1 dan SWP B2;
 1. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga,

Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh serta rencana jalan *inner ring road*;

2. Pengembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala WP dan skala kota di sub pusat kota;
3. Perlindungan kawasan lindung Situ Gede dan hutan kota CIFOR dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan ini;
4. Mempertahankan luasan lahan pertanian kota;
5. Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan agar tetap berkepadatan sedang dan rendah;
6. Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi yang horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertikal dengan KDB rendah; dan
7. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan

c. WP C terdiri dari 4 SWP yaitu SWP C1, SWP C2, SWP C3, SWP C4;

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Abdullah Bin M.Nuh;
2. Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala kota dan WP di pusat WP C;
3. Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya; dan
4. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.

d. WP D terdiri dari 4 SWP yaitu SWP D1, SWP D2, SWP D3, SWP D4;

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Raya Pajajaran, Jalan KS. Tubun, Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru;
2. Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala kota dan WP di pusat WP D;
3. Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya;
4. Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi yang horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertikal dengan KDB rendah; dan
5. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan

e. WP E terdiri dari 4 SWP yaitu SWP E1, SWP E2, SWP E3, SWP E4

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Raya Tajur, rencana jalan R3, rencana jalan *inner ring road*, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret;
2. Membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan perumahan dengan KDB rendah;
3. Melindungi kawasan resapan air dan mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan;
4. Mengembangkan ekowisata;
5. Mengembangkan sarana umum skala kota; dan
6. Mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan

1.2. Prioritas Pembangunan Daerah.

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Kota Bogor dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Bogor sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan isu strategis dan target indikator pembangunan Kota Bogor Tahun 2016.

4.2.1 Isue Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Penetapan isu strategis didasarkan pada situasi dan kondisi yang akan dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan Tahun 2013-2014. Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2013-2014 dan Target Indikator Pembangunan Tahun 2015-2016 dijelaskan pada tabel 4.1

Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Kota Bogor tahun 2013, 2014 dan proyeksi 2015 -2016 sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Realisasi dan Target Indikator Makro Kota Bogor
Tahun 2013-2016

Indikator	Tahun			
	2013	2014	*2015	**2016
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.013.019	1.030.720	1.047.903	1.064.700
Kepadatan Penduduk (per Km ²)	8.549	8.698	8.843	8.985
Tingkat Kemiskinan (%)	8,97	8,86	8,30	8,19
IPM	76,82	77,07	77,77	78,27
a. Indeks Pendidikan		88,03		
- Angka Melek Huruf (%)	99,05	99,03	99,09	99,15
- Rata Lama Sekolah (tahun)	9,82	9,93	10,02	10,06

b. Indeks Kesehatan	73,75	73,78	73,84	74,62
- Angka Harapan Hidup (tahun)	69,25	69,27	69,41	69,51
c. Indeks Daya Beli	68,86	67,86	68,89	69,15
- Purchasing Power Parity (Rp)	657.970	648.415	660,95	663,45
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,80	1,75	1,89	1,89
Pengangguran terbuka (%)	9,48	9,33	8,44	7,64
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,15	6,26	6,36
PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)	19.283.951,17	21.285.360,45	21.700.000,00	23.000.000,00
Jumlah Investasi (Juta Rp)	3.583.359.898,46	2.800.642.264,78	2.100.000.000,000	2.205.000.000,000
Inflasi (%)	8,55	6,83	4,05	4,05

Sumber : BPS Kota Bogor tahun 2013 dan proyeksi RPJMD 2015-2019

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta hasil evaluasi pembangunan Kota Bogor, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2016, yaitu:

- 1) Pencemaran Lingkungan Dan Perubahan Iklim Mikro Kota Bogor
- 2) Ketidaksiesuaian Antara Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana
- 3) Ancaman dan Penanggulangan Bencana
- 4) Mobilitas Penduduk Yang Aman, Efektif, Efisien, dan Ramah Lingkungan
- 5) Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Sosial
- 6) Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi
- 7) Warisan Budaya Yang Belum Mengakar Sebagai Bagian Dari Karakter Kota
- 8) Pengembangan Kepariwisata Yang Berkarakter Dan Penguatan Citra Kota Bogor (*City Branding*)
- 9) Pengembangan Sektor Unggulan Dan Ekonomi Kreatif
- 10) Penataan, Penertiban dan Pemberdayaan PKL
- 11) Pengelolaan Kota Berbasis *Smart City*

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan kebijakan strategi pembangunan Kota Bogor, maka tema pembangunan Kota Bogor Tahun 2016 adalah :

“Kita Wujudkan Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dalam rangka mendukung Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”

Tema pembangunan Kota Bogor Tahun 2016 tersebut mengarahkan pada perumusan prioritas pembangunan di berbagai bidang pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Penataan transportasi dan angkutan umum
2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
6. Penanggulangan Kemiskinan

4.2.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kota Bogor 2015-2019 berjumlah 159 program yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

- a. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- c. Pendidikan Menengah
- d. Manajemen Layanan Pendidikan
- e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Pendidikan Non-Formal

2. Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- b. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- d. Upaya Kesehatan Masyarakat
- e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- f. Perbaikan Gizi Masyarakat
- g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- i. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- j. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- k. Pengembangan Lingkungan Sehat
- l. Pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3. Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA
- c. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
- d. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- e. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
- h. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- i. Kemitraan Lingkungan Hidup

4. Pekerjaan Umum

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- c. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
- d. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda
- e. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- g. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan
- h. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- i. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- j. Pengendalian Banjir
- k. Pembangunan Dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Sumber Daya Air
- l. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Sumber Daya Air
- m. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- n. Tanggap Darurat Bencana Daerah
- o. Pemulihan Pasca Bencana

5. Penataan Ruang

- a. Perencanaan Tata Ruang
- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

6. Perencanaan Pembangunan

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- b. Perencanaan Sarana Prasarana Kota
- c. Kerja Sama Pembangunan
- d. Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Pengembangan Data dan Informasi
- g. Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
- h. Perencanaan Sosial Budaya
- i. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

7. Perumahan

- a. Lingkungan Sehat Perumahan
- b. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- c. Pengelolaan Areal Pemakaman
- d. Peningkatan Utilitas Perkotaan
- e. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung
- f. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi

8. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Peningkatan Peran serta kepemudaan
- b. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- c. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

9. Penanaman Modal

Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan administrasi kependudukan

12. Ketenagakerjaan

- a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- c. Peningkatan Kesempatan Kerja

13. Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Kesehatan Reproduksi Remaja
- b. Keluarga Berencana
- c. Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

16. Perhubungan

- a. Peningkatan Pelayanan Angkutan
- b. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
- c. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- d. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
- e. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

17. Komunikasi dan Informatika

- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
- c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

18. Pertanahan

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Pendidikan Politik Masyarakat
- d. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- e. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
- h. Pengendalian Pembangunan
- i. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
- j. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- k. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
- l. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- m. Pemberdayaan Lembaga Sosial
- n. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- o. Penataan Tata Laksana
- p. Penataan dan Penguatan Organisasi
- q. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- r. Penerapan Reformasi Birokrasi
- s. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- t. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- u. Kerjasama Pembangunan
- v. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- w. Penegakan Hukum dan Penerapan HAM
- x. Penelitian Pengembangan
- y. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- z. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

- a. Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
- c. Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
- d. Peningkatan Kreatifitas Masyarakat
- e. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
- f. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan

22. Sosial

- a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
- b. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- c. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- d. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- e. Pembinaan Anak Terlantar
- f. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- g. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- h. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

23. Kebudayaan

- a. Pengembangan Nilai Budaya
- b. Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

24. Statistik

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

25. Kearsipan

- a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

26. Perpustakaan

- a. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

- a. Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- d. Peningkatan Kesejahteraan Petani

2. Perindustrian

- a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- c. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Perdagangan

- a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

4. Pariwisata

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Pengembangan Kemitraan

5. Ketransmigrasian

- a. Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kecamatan

Rencana Program dan Kegiatan diwilayah Kecamatan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Kecamatan, yang berpedoman pada hasil Musrenbang Tingkat Kota

Bogor Tahun 2015, yaitu:

1. Kecamatan Bogor Utara

- a. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati
- b. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- c. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah dikecamatan
- d. Kegiatan Paket Akselarasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PA-PDPM) Kecamatan dan Kelurahan
- e. Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- f. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- g. Pembinaan pengelolaan persampahan
- h. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)

2. Kecamatan Bogor Barat

- a. Pembangunan Kantor Kecamatan
- b. Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kelurahan
- c. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- d. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah diKecamatan
- e. Kegiatan Paket Akselarasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PA-PDPM) Kecamatan dan Kelurahan
- f. Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- g. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- h. Pembinaan pengelolaan persampahan
- i. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)

3. Kecamatan Tanah Sareal

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- b. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah diKecamatan
- c. Kegiatan Paket Akselarasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PA-PDPM) Kecamatan dan Kelurahan
- d. Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- e. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan pengelolaan persampahan
- g. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
- h. Pamagaran Kantor Kelurahan
- i. Pemetaan wilayah potensi ekonomi di Kecamatan Tanah Sareal

4. Kecamatan Bogor Selatan

- a. Kegiatan Pengadaan Tanah Kelurahan Pakuan
- b. Kegiatan pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan
- c. Kegiatan Pamagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan
- d. Pembangunan Kantor Kelurahan Rancamaya
- a. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- b. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah diKecamatan

- c. Kegiatan Paket Akselerasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PA-PDPM) Kecamatan dan Kelurahan
- d. Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- e. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- f. Pembinaan pengelolaan persampahan
- g. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)

5. Kecamatan Bogor Tengah

- a. Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Pabaton
- b. Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan
- c. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- d. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah diKecamatan
- e. Kegiatan Paket Akselerasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PA-PDPM) Kecamatan dan Kelurahan
- f. Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- g. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- h. Pembinaan pengelolaan persampahan
- i. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)

6. Kecamatan Bogor Timur

- a. Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan
- b. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- c. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah diKecamatan
- d. Kegiatan Paket Akselerasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PA-PDPM) Kecamatan dan Kelurahan
- e. Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
- f. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- g. Pembinaan pengelolaan persampahan
- h. Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD Kota Bogor dan (ii) Usulan Rencana Program dan Kegiatan Kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2016.

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta (iii) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah memuat rencana program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kota Bogor. Pagu indikatif belanja daerah tahun 2016 sebesar Rp 2.751.284.486.329,00 terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 1.659.953.036.876,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.091.331.449.453,00

e.1 Rencana Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2016

Sesuai arah kebijakan belanja daerah tahun 2016, pengaturan pola pembelanjaan dilaksanakan secara proporsional, efisien dan efektif, Pagu indikatif Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp 1,659.953.036.876,00 diarahkan kepada :

- a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (welfare state) oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
- a. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yang meliputi :
 - 1) Penataan transportasi dan angkutan umum
 - 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
 - 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
 - 6) Penanggulangan Kemiskinan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi janji-janji politik dan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor
- d. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
- e. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- f. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah.

Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan. Adapun rincian Belanja Langsung

adalah sebagaimana tertuang dalam mantrik.

e.2 Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2016

Rencana indikatif Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,091.331.449.453,00 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol, serta Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 5.1. berikut:

**Tabel 5.1.
Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2016**

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	Belanja Pegawai
2	Belanja Bunga
3	Belanja Hibah
4	Belanja Subsidi
5	Belanja Bantuan Sosial
-	Bantuan sosial bidang kemasyarakatan (organisasi, pejuang, kepemudaan, dll)
-	Penguatan Kelembagaan RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, dan kelembagaan lainnya
-	Bantuan keolahragaan
-	Bantuan sosial bidang pendidikan
-	Bantuan untuk guru honorer madrasah ibtida'iyah, madrasah diniyah dan guru ngaji TPA

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD Kota Bogor dan (ii) Usulan Rencana Program dan Kegiatan Kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2016.

Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta (iii) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah memuat rencana program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kota Bogor. Pagu indikatif belanja daerah tahun 2016 sebesar Rp 2.751.284.486.329,00 terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 1.659.953.036.876,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.091.331.449.453,00

e.1 Rencana Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2016

Sesuai arah kebijakan belanja daerah tahun 2016, pengaturan pola pembelanjaan dilaksanakan secara proporsional, efisien dan efektif, Pagu indikatif Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp 1,659.953.036.876,00 diarahkan kepada :

- a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (welfare state) oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
- α. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yang meliputi :
 - 1) Penataan transportasi dan angkutan umum
 - 2) Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
 - 3) Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - 4) Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 5) Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
 - 6) Penanggulangan Kemiskinan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi janji-janji politik dan isu-isu

strategis pembangunan Kota Bogor

- d. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
- e. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- f. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah.

Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan. Adapun rincian Belanja Langsung adalah sebagaimana tertuang dalam mantrik.

e.2 **Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2016**

Rencana indikatif Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,091.331.449.453,00 yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol, serta Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	Belanja Pegawai
2	Belanja Bunga
3	Belanja Hibah
4	Belanja Subsidi
5	Belanja Bantuan Sosial
-	Bantuan sosial bidang kemasyarakatan (organisasi, pejuang, kepemudaan, dll)
-	Penguatan Kelembagaan RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, dan kelembagaan lainnya
-	Bantuan keolahragaan
-	Bantuan sosial bidang pendidikan
-	Bantuan untuk guru honorer madrasah ibtida'iyah, madrasah diniyah dan guru ngaji TPA

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2016, merupakan tahun kedua dalam rangka perwujudan visi Kota Bogor yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019. RKPD 2016 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan pelaksanaan tahun berjalan 2015. RKPD 2016 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD 2015-2019, dengan demikian tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD tahun 2016 ini merupakan langkah kedua terwujudnya visi RPJMD Kota Bogor yakni “Kota Bogor Yang Nyaman, Beriman, dan Transparan”

Selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2016 menjadi dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2016, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2016. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, Bappeda menyusun evaluasi mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2014 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2016.
4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, RKPD 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor.
5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan Sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2016.
6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi. Oleh karena itu diharapkan tim penyusun RKPD 2016 harus mengawal secara seksama aspirasi dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Pusat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG).

7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota Bogor, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor.
8. Secara Proaktif, BAPPEDA Kota Bogor, wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2016 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Walikota Bogor.
9. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Walikota Bogor melalui BAPPEDA.
10. Tatacara penyusunan RKPD Tahun 2016 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta forum OPD Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Provinsi Jawa Barat sampai dengan tingkat nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan.
11. RKPD Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsi-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**WALIKOTA BOGOR,
TTD**

BIMA ARYA